



Kelas 12

SEJARAH

Dinamika Sejarah Indonesia

Buku Pegangan Sejarah untuk Siswa Kelas 12

Daftar Isi

BAB 1: JEJAK SEJARAH PANJANG DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN.....	4
1. Pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia sebagai Awal Kedaulatan Bangsa...	6
2. Pengambilalihan Kekuasaan dan Aset Jepang.....	10
3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dengan Kekuatan Senjata	14
4. Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan melalui Diplomasi	19
5. Pengakuan Kedaulatan	24
6. Kembali ke Bentuk Negara Kesatuan (17 Agustus 1950)	27
Rangkuman.....	30
Latihan Soal	31
Referensi	33
BAB 2: DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA DARI DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN	34
1. Transformasi Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia	36
2. Perkembangan Demokrasi Indonesia pada Awal Kemerdekaan	39
3. Perjalanan Indonesia di Era Demokrasi Liberal.....	42
4. Perjalanan Indonesia di Era Demokrasi Terpimpin.....	47
5. Perbedaan Pelaksanaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia ..	51
6. Langkah Strategis Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia dari Ancaman Disintegrasi	54
Rangkuman.....	57
Latihan Soal	59
Referensi	61
BAB 3: MENGGALI DINAMIKA INDONESIA DI ERA ORDE BARU.....	62
1. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru.....	64
2. Penataan Kehidupan Politik Indonesia Masa Orde Baru.....	67
3. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru	72
4. Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru	79
5. Berakhirnya Masa Pemerintahan Orde Baru	82
Rangkuman.....	87
Latihan Soal	88
Referensi	89

BAB 4: JEJAK LANGKAH BANGSA DI ERA REFORMASI	91
1. Awal Terbukanya Gerbang Reformasi Menuju Demokrasi	93
2. Era Kebebasan Politik.....	95
3. Menata Kembali Fondasi Negara melalui Reformasi Birokrasi.....	97
4. Reformasi Ekonomi untuk Indonesia yang Lebih Kokoh	103
5. Kebangkitan Budaya di Era Reformasi.....	105
6. Transformasi Pendidikan di Era Reformasi.....	107
7. Kebijakan Para Presiden Pasca-Reformasi 1998.....	109
Rangkuman.....	113
Latihan Soal	114
Referensi	116

BAB 1

JEJAK SEJARAH PANJANG DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Mandiri

Memahami peran setiap individu dalam perjalanan sejarah bangsa, dalam bidang diplomasi, perjuangan bersenjata, maupun aspek ekonomi sosial.

▷ Bernalar Kritis

Mengkritisi berbagai peristiwa sejarah, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta mengaitkan berbagai proses diplomasi dan perlawanan bersenjata dengan konteks global dan dampaknya bagi pembangunan Indonesia.

Kata Kunci: Proklamasi, Tokoh Perjuangan, Kemerdekaan Bangsa, Perlawanan Bersenjata, Perundingan

Tujuan Pembelajaran: Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

1. Menjelaskan Latar Belakang Kedatangan Tentara Sekutu ke Indonesia

- ▷ Mengidentifikasi alasan-alasan kedatangan tentara Sekutu pasca Perang Dunia II.
- ▷ Menganalisis hubungan kedatangan Sekutu dengan kepentingan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*).
- ▷ Menjelaskan pengaruh kedatangan Sekutu terhadap situasi politik di Indonesia.

2. Menganalisis Pentingnya Mempertahankan Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia

- ▷ Memahami makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.
- ▷ Menganalisis ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dari pihak luar.

- ▷ Menjelaskan peran rakyat dan pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan.

3. Mengidentifikasi Perlawanan Bersenjata yang Terjadi di Berbagai Daerah

- ▷ Menyusun daftar pertempuran besar seperti Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, dan Medan Area.
- ▷ Mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perlawanan bersenjata.
- ▷ Menganalisis dampak perlawanan bersenjata terhadap keberlangsungan kemerdekaan Indonesia.

4. Mengidentifikasi Langkah Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan

- ▷ Menguraikan proses-proses perundingan diplomasi seperti Linggarjati, Renville, dan Roem-Royen.
- ▷ Menjelaskan pentingnya diplomasi sebagai alat mempertahankan kedaulatan selain perlawanan fisik
- ▷ Mengidentifikasi peran tokoh diplomasi dalam perundingan dengan Belanda.

5. Menyimpulkan Hasil Perundingan hingga Pengakuan Kedaulatan

- ▷ Menguraikan tahapan perundingan antara Indonesia dan Belanda.
- ▷ Menyimpulkan hasil-hasil penting dari setiap perundingan diplomatik.
- ▷ Mengidentifikasi momen penting pengakuan kedaulatan Indonesia, seperti Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.



FITRI



1. Pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia sebagai Awal Kedaulatan Bangsa

Tahukah kamu, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar untuk membentuk negara yang kokoh dan pemerintahan yang terstruktur? Meskipun sudah merdeka, bangsa Indonesia belum memiliki sistem pemerintahan yang lengkap dan diakui secara internasional.

Para tokoh besar seperti **Ir. Soekarno**, **Drs. Mohammad Hatta**, **Mr. Ahmad Subardjo**, dan **Sutan Sjahrir** bekerja keras untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya merdeka di atas kertas, tetapi juga memiliki pemerintahan yang berjalan dengan baik. Mereka harus segera membentuk konstitusi sebagai dasar hukum negara, membangun lembaga pemerintahan, dan menciptakan tata kelola yang dapat menjalankan pemerintahan secara efektif.

Pembentukan negara ini sangat penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap mengelola kemerdekaannya sendiri. Dengan dukungan para pahlawan, Indonesia mulai menata dirinya agar dapat berfungsi sebagai negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia internasional.



Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 – commons.wikimedia.org

UUD 1945 Disusun sebagai Konstitusi Dasar Negara

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)** mengadakan sidang pertamanya. Salah satu keputusan terpenting yang diambil dalam sidang ini adalah pengesahan **Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)** sebagai konstitusi resmi negara. Keputusan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan negara yang baru merdeka karena UUD 1945 menjadi landasan hukum tertinggi yang akan mengatur jalannya pemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta tata kelola negara. UUD 1945 disusun dengan memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menyesuaikan dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Konstitusi ini memuat prinsip-prinsip dasar negara, antara lain:

a. Kedaulatan Rakyat

UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia tidak berada pada seorang raja atau pemerintah pusat, melainkan di tangan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berhak menentukan arah dan kebijakan negara melalui proses demokratis, seperti pemilu dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik. Prinsip kedaulatan rakyat ini sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa yang ingin lepas dari penjajahan, di mana rakyat berhak menentukan nasib bangsanya sendiri.

b. Sistem Demokrasi

Indonesia memilih untuk menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Dalam UUD 1945, demokrasi dijelaskan sebagai sistem di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintahan Indonesia terdiri dari tiga cabang kekuasaan utama yang bekerja secara terpisah namun saling mengawasi: eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (Lembaga peradilan). Sistem ini mencegah kekuasaan berpusat pada satu pihak saja dan menjamin adanya checks and balances, sehingga rakyat memiliki kendali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Demokrasi yang dipilih Indonesia juga menekankan pada prinsip musyawarah dan mufakat, di mana keputusan diambil melalui pembahasan bersama dan kesepakatan antar berbagai pihak. Sistem ini sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kebersamaan.

c. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara dan panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia:

- ▷ Ketuhanan Yang Maha Esa
- ▷ Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- ▷ Persatuan Indonesia
- ▷ Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- ▷ Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Selain itu, Pancasila juga diharapkan menjadi fondasi bagi kehidupan sosial dan politik yang harmonis di Indonesia. Dengan adanya Pancasila, Indonesia diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan saling menghormati, terlepas dari perbedaan suku, agama, atau golongan.



Pidato pertama Ir. Soekarno mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945 – commons.wikimedia.org

Lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan roda pemerintahan

Pada sidang yang sama, PPKI juga membuat tiga keputusan penting yang terkait dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan awal, yaitu:

- a. **Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP):** KNIP dibentuk sebagai lembaga legislatif sementara sebelum diadakannya pemilihan umum. KNIP bertugas untuk memberikan masukan kepada Presiden dalam penyusunan kebijakan serta mewakili aspirasi rakyat di masa transisi ini.
- b. **Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI):** PPKI juga memutuskan pembentukan PNI sebagai partai politik pertama yang bertujuan menggerakkan dukungan rakyat terhadap pemerintahan baru. PNI diharapkan menjadi wadah bagi rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka secara politik dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
- c. **Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR):** BKR dibentuk sebagai organisasi yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasca kemerdekaan. BKR di kemudian hari berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Para anggota BKR, sebagian besar terdiri dari mantan prajurit PETA dan Heiho, memiliki tugas menjaga keamanan nasional dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal, termasuk invasi Belanda yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer.



Sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Malang Jawa Timur – arsip.jogjaprov.go.id

Struktur Negara Diorganisir demi Mendapatkan Pengakuan Dunia Internasional

Langkah selanjutnya setelah pembentukan lembaga-lembaga dasar pemerintahan adalah mengorganisir negara untuk mendapatkan pengakuan internasional. Pemerintah Indonesia segera membentuk beberapa kementerian yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan dan memastikan Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Beberapa langkah yang diambil adalah:

- a. **Pembentukan Kementerian Luar Negeri:** **Mr. Ahmad Subardjo** menjadi Menteri Luar Negeri pertama dan bertugas menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing serta memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional.
- b. **Pembentukan Departemen Pertahanan:** Untuk mempertahankan kedaulatan negara, Departemen Pertahanan dibentuk dan kemudian dipimpin oleh **Amir Sjarifuddin**. Angkatan bersenjata mulai diorganisir melalui BKR yang kemudian menjadi cikal bakal TNI.
- c. **Diplomasi Aktif:** Pemerintah juga segera menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang bersedia mendukung kemerdekaan Indonesia. Hubungan ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi Indonesia di mata dunia dan membangun posisi Indonesia di forum internasional.

Negara-Negara yang Mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia

Pengakuan internasional sangat penting dalam mengokohkan status Indonesia sebagai negara merdeka. Melalui diplomasi yang intensif, beberapa negara memberikan pengakuan resmi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk bergabung dengan masyarakat internasional dan membangun hubungan diplomatik yang lebih luas. Berikut beberapa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia:

- a. **Mesir:** Pada tahun 1947, Mesir menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini sangat penting karena Mesir memiliki pengaruh besar di dunia Arab dan Islam. Pengakuan Mesir diikuti oleh negara-negara Arab lainnya.
- b. **Suriah:** Suriah, yang saat itu juga baru saja merdeka, memberikan pengakuan resmi kepada Indonesia. Dukungan dari Suriah memperkuat posisi Indonesia di dunia Timur Tengah.
- c. **Lebanon:** Lebanon menjadi salah satu negara Timur Tengah lainnya yang memberikan pengakuan resmi kepada Indonesia.
- d. **Vatikan:** Vatikan juga termasuk negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun Vatikan bukan negara besar secara militer atau ekonomi, pengakuannya memiliki nilai simbolis yang penting karena Vatikan adalah pusat gereja Katolik dunia.

Selain negara-negara di atas, beberapa negara lainnya juga mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk **India** dan **Uni Soviet**. Pengakuan dari negara-negara ini menunjukkan bahwa perjuangan diplomasi Indonesia berhasil membawa negara ini diakui sebagai negara merdeka yang sah di kancah internasional.

Contoh Soal

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia segera menyusun UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Menurut pendapatmu, mengapa penyusunan konstitusi sesegera mungkin setelah proklamasi menjadi langkah yang krusial dalam upaya membangun kedaulatan bangsa dan mendapatkan pengakuan internasional? Jelaskan dengan mengaitkan peran UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan yang terbentuk.

Jawaban:

Penyusunan UUD 1945 segera setelah proklamasi sangat penting karena konstitusi menjadi dasar hukum yang menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya merdeka secara de facto (fakta kemerdekaan), tetapi juga de jure (memiliki sistem hukum dan pemerintahan sah). UUD 1945 menetapkan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan Pancasila sebagai ideologi negara, serta membentuk struktur pemerintahan yang sah (eksekutif, legislatif, yudikatif). Ini memberi legitimasi bahwa Indonesia mampu mengatur dirinya sendiri, sehingga memperkuat klaim kedaulatan di mata dunia internasional.

Pembahasan:

- ▷ Negara yang baru merdeka harus membuktikan bahwa ia mampu menjalankan sistem kenegaraan.
- ▷ Konstitusi menunjukkan kesiapan untuk memerintah secara terstruktur dan tertib.

UUD 1945 menjadi bukti bahwa kemerdekaan bukan sekadar deklaratif, tapi juga substantif dan sistematis.



2. Pengambilalihan Kekuasaan dan Aset Jepang

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan akhir dari perjuangan. Kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan karena Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II mulai kehilangan kendali, tetapi kekuasaan dan aset yang mereka tinggalkan tidak serta-merta berpindah ke tangan bangsa Indonesia. Para pemimpin nasional harus berupaya keras mengambil alih pemerintahan dan mengamankan aset-aset penting.

Masyarakat perlu memahami, pengambilalihan kekuasaan tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah. Di beberapa daerah, rakyat segera bergerak dengan semangat revolusi. Di daerah lain, proses berlangsung lambat dan menghadapi berbagai hambatan. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Kondisi lokal sangat memengaruhi dinamika di lapangan. Penguasaan atas kekuasaan dan aset menjadi langkah penting dalam mewujudkan kemerdekaan yang sejati dan membangun masa depan bangsa.

Status Quo Pasca Proklamasi

Status quo adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "keadaan saat ini" atau "keadaan sebagaimana adanya". Dalam konteks politik, **status quo** mengacu pada kondisi di mana suatu situasi yang ada dipertahankan tanpa perubahan. Ini bisa terjadi karena adanya kekuatan yang menginginkan stabilitas atau karena pihak-pihak yang terlibat belum siap atau tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi yang ada. **Dalam status quo**, kekuasaan, aturan, dan otoritas yang ada tetap berjalan tanpa adanya peralihan yang signifikan.



Kantor RRI pusat di seputar lapangan Monumen Nasional, Jakarta, 2007 - Bukti Sejarah adanya Status Quo – commons.wikimedia.org

Dalam sejarah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, istilah **status quo** merujuk pada keadaan di mana kendali atas wilayah Indonesia secara *de facto* masih berada di tangan Jepang meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena Sekutu, yang memenangkan Perang Dunia II, memberikan instruksi kepada Jepang untuk tetap memegang kendali sementara sampai pasukan Sekutu tiba di Indonesia untuk mengatur penyerahan kekuasaan.

a. Instruksi Sekutu kepada Jepang

Sekutu menginstruksikan Jepang untuk menjaga status quo dan tidak menyerahkan kekuasaan kepada pihak mana pun sampai mereka tiba. Jepang bertindak sebagai penguasa sementara sampai pasukan Sekutu datang ke Indonesia.

b. Keberadaan Pasukan Jepang

Meski Jepang telah kalah, ribuan tentara Jepang masih tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka masih bertugas menjaga fasilitas penting, seperti kantor pemerintahan, pelabuhan, dan markas militer.

c. Kekhawatiran di Kalangan Masyarakat

Banyak masyarakat Indonesia merasa tidak yakin tentang masa depan karena Jepang masih berkuasa, sementara pasukan Sekutu belum datang. Di sisi lain, mereka juga khawatir Sekutu, khususnya Belanda, akan berusaha mengambil alih kembali kekuasaan.

Pengambilalihan Kekuasaan di Daerah-Daerah

Setelah proklamasi kemerdekaan, upaya untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam proses ini. Di kota-kota besar, proses pengambilalihan berjalan cepat dan dipimpin oleh pemuda revolusioner. Di daerah terpencil, prosesnya lebih lambat dan kadang-kadang tergantung pada kekuatan lokal yang berkuasa. Gerakan pengambilalihan kekuasaan menjadi penting untuk memastikan kemerdekaan Indonesia dapat diakui secara nyata di setiap wilayah.

Di kota-kota besar seperti **Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta**, pemuda-pemuda Indonesia segera bergerak untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas penting yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Pengambilalihan ini terjadi secara cepat dan spontan, dipicu oleh semangat nasionalisme dan keinginan untuk memastikan kemerdekaan Indonesia segera diwujudkan secara nyata.

a. Jakarta

▷ Pengambilalihan Gedung-gedung Pemerintahan

Setelah mendengar berita proklamasi, para pemuda Jakarta, termasuk kelompok-kelompok seperti **Menteng 31**, bergerak menduduki kantor-kantor pemerintahan yang masih dikuasai Jepang.

▷ Stasiun Radio

Pemuda Jakarta juga mengambil alih stasiun radio untuk menyebarkan berita kemerdekaan secara lebih luas. Hal ini sangat penting untuk memberi tahu masyarakat luas tentang proklamasi dan mendorong dukungan nasional.

b. Surabaya

▷ Stasiun Radio di Surabaya

Di Surabaya, pengambilalihan fasilitas publik dipimpin oleh **Bung Tomo** dan para pemuda Surabaya. Mereka mengambil alih stasiun radio dan menyiarkan berita proklamasi serta seruan untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu penting dalam pertempuran 10 November 1945, yang menjadikan Surabaya sebagai "Kota Pahlawan."

▷ Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Militer

Selain itu, pemuda Surabaya juga merebut kantor-kantor pemerintahan Jepang, pabrik, dan fasilitas militer. Peristiwa ini menegaskan semangat perlawanan rakyat Surabaya terhadap kekuatan asing yang ingin merebut kembali Indonesia.

c. Yogyakarta

▷ Inisiatif Sultan Hamengkubuwono IX

Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai pemimpin Yogyakarta, berperan sangat penting dalam mendukung pengambilalihan kekuasaan oleh pemuda di wilayah ini. Beliau dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia, bahkan menyerahkan kekuasaan Keraton Yogyakarta kepada pemerintah Indonesia.

▷ Pengambilalihan Kantor Pemerintahan

Pemuda Yogyakarta, dengan dukungan Sultan, segera mengambil alih kantor-kantor administrasi yang masih dikuasai Jepang dan mulai mengibarkan bendera Merah Putih di berbagai tempat penting di kota ini.

Tantangan di Kota-Kota Besar

- a. **Resistensi Jepang:** Meskipun banyak tentara Jepang yang menyerah, beberapa unit Jepang masih mencoba mempertahankan kontrol atas fasilitas penting, seperti stasiun radio dan markas militer.
- b. **Ketiadaan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat:** Karena situasi yang sangat dinamis, banyak pemuda bergerak tanpa menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi, meskipun di sisi lain mencerminkan inisiatif dan semangat revolusioner yang kuat.

Peran Organisasi Pemuda

Kelompok-kelompok pemuda memainkan peran utama dalam pengambilalihan kekuasaan di berbagai daerah, terutama melalui organisasi-organisasi yang dibentuk pasca proklamasi. Organisasi-organisasi ini menjadi penggerak utama perjuangan di lapangan.

a. Pemuda Republik Indonesia (PRI)

- ▷ **Aktivitas di Jakarta:** PRI aktif dalam berbagai aksi pengambilalihan kekuasaan, termasuk menduduki kantor-kantor pemerintahan Jepang dan stasiun-stasiun radio di Jakarta.
- ▷ **Peran dalam Koordinasi Nasional:** Meskipun belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik di tingkat pusat, PRI sering bekerja sama dengan kelompok-kelompok lokal lainnya untuk mengorganisir massa dan melawan Jepang.



Fakta Unik di Balik Sejarah

Di Jakarta, anggota Pemuda Republik Indonesia (PRI) tidak hanya merebut gedung-gedung pemerintahan Jepang, tetapi juga mengambil alih stasiun radio, termasuk Radio Jepang (Hoso Kyoku). Tujuannya? Untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh pelosok Indonesia. Mereka sadar bahwa perang informasi sama pentingnya dengan perang fisik.



Kantor RRI pusat di seputar lapangan Monumen Nasional, Jakarta, 2007 - Wikipedia.com

b. Barisan Banteng

- ▷ **Basis di Sumatra Barat:** Di Sumatra, organisasi **Barisan Banteng** berperan aktif dalam pengambilalihan fasilitas Jepang. Mereka menduduki gedung-gedung pemerintahan dan memobilisasi massa untuk melawan upaya penjajahan kembali oleh Belanda.
- ▷ **Tokoh Penting: Mohammad Yamin,** seorang nasionalis dan tokoh penting dari Sumatra Barat, memberikan dukungan kepada organisasi pemuda lokal untuk mempertahankan kemerdekaan di daerah tersebut.

c. Angkatan Pemuda Indonesia (API):

Aktif di Jawa Barat dan Jawa Timur: API berperan besar dalam merebut kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama di kota-kota seperti Bandung dan Malang. Organisasi ini terlibat dalam pengambilalihan markas Jepang serta memobilisasi masyarakat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan.

Penguasaan Aset Jepang

Selain pengambilalihan kekuasaan, penguasaan aset-aset ekonomi yang ditinggalkan Jepang juga menjadi salah satu prioritas utama. Aset-aset ini meliputi pabrik, perkebunan, tambang, dan infrastruktur yang sebelumnya dikelola Jepang untuk kepentingan perang. Pemuda dan buruh setempat bergerak cepat untuk mengambil alih dan mengoperasikan aset-aset ini demi menjaga keberlangsungan ekonomi Indonesia yang baru merdeka.

a. Aset Vital Jepang

Aset-aset seperti pabrik, tambang, perkebunan, dan jalur transportasi merupakan sumber daya penting yang selama pendudukan Jepang digunakan untuk mendukung upaya perang mereka. Aset-aset ini harus segera diambil alih agar dapat digunakan untuk kepentingan Indonesia. Contohnya adalah, pabrik gula, tambang batubara, dan pabrik semen yang dimiliki Jepang langsung diambil alih oleh buruh lokal.

b. Peran Buruh dan Masyarakat Lokal

Buruh-buruh yang sebelumnya bekerja di bawah Jepang segera menduduki dan mengoperasikan pabrik-pabrik serta fasilitas produksi lainnya. Mereka berusaha menjaga agar produksi tetap berjalan meskipun sering kali tanpa dukungan teknis atau manajerial yang cukup.

c. Kondisi Aset

Banyak aset yang ditinggalkan Jepang dalam kondisi rusak atau terbengkalai. Akibat perang dan kekalahan Jepang, beberapa pabrik tidak dapat berfungsi penuh, dan perkebunan yang luas juga mengalami kerusakan. Hal ini menambah tantangan bagi Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya ini secara efektif.

d. Simbol Kemandirian Ekonomi

Mengambil alih aset Jepang bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga simbol penting dari kemandirian Indonesia. Dengan menguasai aset-aset ini, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengelola sumber daya negara secara mandiri dan tidak bergantung pada kekuatan asing.

Contoh Soal

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sekutu menginstruksikan Jepang untuk mempertahankan status quo hingga mereka tiba di Indonesia. Jelaskan bagaimana kebijakan ini mempengaruhi dinamika perjuangan pemuda di berbagai daerah, dan mengapa pengambilalihan kekuasaan tetap dilakukan meskipun bertentangan dengan instruksi tersebut?

Jawaban:

Pemuda tetap melakukan pengambilalihan karena mereka melihat bahwa mempertahankan status quo justru menghambat proses kemerdekaan. Mereka merasa harus bertindak cepat sebelum Belanda kembali.

Pembahasan:

Instruksi status quo secara tidak langsung menunda proses penyerahan kekuasaan kepada bangsa Indonesia. Namun, semangat revolusioner dan ketidakpercayaan terhadap Jepang serta kekhawatiran akan kembalinya Belanda memotivasi pemuda untuk segera bertindak. Ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya bergantung pada legalitas internasional, tetapi juga pada aksi nyata rakyat di lapangan.



3. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dengan Kekuatan Senjata

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak hanya berjuang melalui jalur diplomasi tetapi juga melalui pertempuran fisik yang melibatkan kekuatan senjata. Ini terjadi karena pasukan Sekutu yang diwakili oleh **AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)** datang ke Indonesia dengan tujuan menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Namun, kedatangan mereka diboncengi oleh **NICA (Netherlands Indies Civil Administration)** yang ingin memulihkan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini menimbulkan bentrokan antara rakyat Indonesia dan Sekutu di berbagai daerah. Berikut adalah beberapa pertempuran besar yang terjadi saat itu:

Pertempuran Medan Area (9 Oktober 1945-10 Desember 1945)

Pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan menjadi salah satu pertempuran besar yang memperlihatkan semangat juang rakyat Sumatera dalam mempertahankan kemerdekaan. Konflik ini berawal dari kedatangan pasukan AFNEI yang dipimpin oleh **Brigadir Jenderal T.E.D Kelly**, pada 9 Oktober 1945. Pasukan AFNEI ini disertai oleh NICA yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda.

Ketegangan meningkat pada 13 Oktober 1945 ketika terjadi insiden antara pemuda Indonesia dengan seorang tentara NICA. Insiden hotel di Jalan Bali, di mana seorang pemuda Indonesia ditembak oleh pasukan NICA karena menurunkan bendera Belanda, memicu amarah rakyat Medan. Bentrokan pun tidak dapat dihindari.

Pasukan **TKR (Tentara Keamanan Rakyat)** di Medan, yang dipimpin oleh **Kolonel Ahmad Tahir**, segera melakukan perlawanan. Mereka dibantu oleh laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan Medan dari serangan pasukan NICA. Pertempuran ini dikenal dengan "Medan Area" karena wilayah pertempuran meluas dari pusat kota hingga ke pinggiran kota Medan.

a. **Tokoh penting:** Kolonel Ahmad Tahir.

b. **Akhir pertempuran:** Pada 10 Desember 1945, pertempuran mencapai puncaknya ketika pasukan AFNEI menyerang wilayah Medan dengan kekuatan besar. Namun, perlawanan sengit dari rakyat terus berlangsung hingga akhirnya menjadi simbol perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap kembalinya kolonialisme Belanda.



Ilustrasi pasukan perang Medan Area – Mojave Experiment

Pertempuran Palagan Ambarawa (20 November 1945-15 Desember 1945)

Pertempuran ini terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah, yang merupakan wilayah strategis karena posisinya yang berada di antara Semarang dan Yogyakarta. Pertempuran ini dimulai ketika pasukan Sekutu yang dipimpin oleh **Brigjen Bethell** tiba di Ambarawa untuk membebaskan tahanan perang Jepang. Namun, keberadaan NICA yang menyertai Sekutu menyebabkan ketegangan antara pasukan Indonesia dan Sekutu.

Pada 20 November 1945, terjadi bentrokan di Magelang antara pasukan Indonesia dan Sekutu. Setelah bentrokan, Sekutu mundur ke Ambarawa, namun pasukan Indonesia yang dipimpin oleh **Kolonel Sudirman** (kemudian dikenal sebagai Jenderal Soedirman) mengepung kota tersebut. Serangan balik dilancarkan oleh pasukan TKR pada 12 Desember 1945, dikenal sebagai "Palagan Ambarawa".

- a. **Tokoh penting:** Kolonel Soedirman.
- b. **Taktik Pertempuran:** Kolonel Soedirman menggunakan taktik "supit urang" atau pengepungan dari dua sisi untuk memukul mundur pasukan Sekutu dari Ambarawa.
- c. **Akhir pertempuran:** Pada 15 Desember 1945, pasukan Sekutu terpaksa mundur ke Semarang setelah dikepung oleh pasukan Indonesia. Kemenangan ini menjadi salah satu kemenangan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Jawa Tengah.

Pertempuran Surabaya (10 November 1945)

Pertempuran Surabaya adalah salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pertempuran ini terjadi setelah kedatangan pasukan AFNEI yang dipimpin oleh **Brigadir Jenderal Mallaby** akhir Oktober 1945. Awalnya, Mallaby berusaha untuk berdamai dengan rakyat Surabaya. Namun, ketegangan memuncak setelah insiden penembakan yang menyebabkan tewasnya Mallaby pada 30 Oktober 1945.

Setelah kematian Mallaby, Sekutu mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 agar seluruh rakyat Surabaya menyerah dan meletakkan senjata. Ultimatum ini diabaikan oleh rakyat Surabaya, yang dipimpin oleh **Bung Tomo**, seorang tokoh pemuda yang menjadi simbol perlawanan rakyat melalui siaran radio.

Pada 10 November 1945, Sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran berlangsung selama beberapa minggu, dengan ribuan korban di pihak Indonesia.

- a. **Tokoh penting:** Bung Tomo, Kolonel Sungkono (komandan TKR di Surabaya).
- b. **Akhir pertempuran:** Meskipun kota Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Sekutu, perlawanan rakyat yang gigih membuat pertempuran ini dikenal sebagai "Hari Pahlawan", dan 10 November diperingati sebagai hari besar nasional.

Pertempuran Merah Putih di Manado (14 Februari 1946)

Di Manado, Sulawesi Utara, terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Pertempuran Merah Putih. Pada 14 Februari 1946, para pemuda nasionalis yang tergabung dalam **Laskar Pemberontak Republik Indonesia Sulawesi (LAPRIS)** mengadakan serangan mendadak terhadap markas pasukan NICA dan **KNIL (Koninkrijk Nederlandsch-Indisch Leger)**, yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di wilayah Sulawesi.

Serangan ini dipimpin oleh **Mayor Ventje Sumual**, yang kemudian berhasil merebut markas NICA dan mengibarkan bendera Merah Putih. Namun, pasukan NICA yang lebih terorganisir melakukan serangan balasan, sehingga pertempuran terus berlangsung selama beberapa hari.

a. **Tokoh penting:** Mayor Ventje Sumual.

b. **Akhir pertempuran:** Meskipun berhasil merebut markas NICA, pasukan pemuda Indonesia di Manado tidak dapat mempertahankan kota dari serangan balasan NICA dan KNIL. Namun, semangat perjuangan rakyat Manado menginspirasi perlawanan di wilayah-wilayah lain di Sulawesi.

Pertempuran Bandung Lautan Api (23 Maret 1946)

Pertempuran ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, dan dipicu oleh kedatangan pasukan Sekutu dan NICA yang berusaha merebut kembali Bandung dari tangan pejuang Indonesia. Pada 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada pejuang Indonesia di Bandung untuk meninggalkan kota dan menyerahkan senjata mereka.

Merespons ultimatum tersebut, para pemimpin pejuang Indonesia di Bandung, termasuk **Kolonel A.H. Nasution**, memutuskan untuk meninggalkan kota tetapi dengan strategi yang dramatis. Para pejuang dan rakyat Bandung membakar kota mereka sendiri sebelum meninggalkan Bandung Selatan, agar tidak bisa digunakan oleh Sekutu dan NICA. Aksi pembakaran ini dikenal dengan sebutan "Bandung Lautan Api".

a. **Tokoh penting:** Kolonel A.H. Nasution.

b. **Akhir pertempuran:** Pasukan Indonesia berhasil mengosongkan dan membakar kota Bandung Selatan, membuat Sekutu dan NICA hanya mendapati reruntuhan kota ketika mereka mengambil alih.

Puputan Margarana (20 November 1946)

Di Bali, pertempuran terjadi di Margarana pada 20 November 1946, dipimpin oleh **I Gusti Ngurah Rai**, seorang komandan TKR yang memimpin pasukan Indonesia di Bali. Setelah kedatangan NICA yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda, Ngurah Rai memutuskan untuk melancarkan perlawanan habis-habisan dalam apa yang disebut sebagai "Puputan", yang berarti pertempuran sampai mati.

Pertempuran terjadi di Desa Margarana, ketika pasukan Ngurah Rai bertempur melawan pasukan NICA yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap. Meskipun kalah dalam jumlah, pasukan Ngurah Rai bertempur dengan gagah berani hingga titik darah penghabisan.

a. **Tokoh penting:** I Gusti Ngurah Rai.

b. **Akhir pertempuran:** Ngurah Rai dan seluruh pasukannya gugur dalam pertempuran ini, namun semangat juangnya menjadi simbol perlawanan gigih rakyat Bali terhadap penjajah Belanda.

Perlawanan Rakyat Makassar (8-12 Desember 1946)



Ilustrasi Perlawanan Rakyat Makassar – idsejarah.net

Perlawanan ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, dipimpin **oleh Jenderal Sudirman Dg Baco Karaeng Mallombassi**, seorang komandan lokal yang menolak kehadiran NICA di Sulawesi Selatan. Pada 8 Desember 1946, pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap markas NICA di Makassar.

Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, dengan serangan balasan dari pasukan NICA yang dibantu oleh pasukan KNIL. Meskipun jumlah pasukan Indonesia jauh lebih sedikit dan persenjataan yang terbatas, mereka melakukan perlawanan gigih.

- a. **Tokoh penting:** Jenderal Sudirman Dg Baco Karaeng Mallombassi.
- b. **Akhir pertempuran:** Pasukan Indonesia akhirnya terdesak, tetapi perlawanan mereka menunjukkan tekad rakyat Makassar untuk menolak kembalinya kolonialisme Belanda di Sulawesi Selatan.

Contoh Soal

Menurut pendapatmu, apakah tindakan Bung Tomo dalam membakar semangat rakyat Surabaya melalui siaran radio sebelum pertempuran 10 November 1945 merupakan bentuk kepemimpinan efektif dalam masa revolusi? Jelaskan alasanmu.

Jawaban:

Ya, karena Bung Tomo mampu menggerakkan semangat rakyat melalui pidato-pidatonya di radio, membentuk semangat juang yang luar biasa melawan Sekutu, meskipun dengan persenjataan yang tidak seimbang.

Pembahasan:

Keefektifan kepemimpinannya tampak dari bagaimana rakyat Surabaya tidak menyerah meskipun diancam ultimatum. Pidato-pidatonya mengangkat semangat nasionalisme, dan ini penting dalam situasi revolusi di mana moral rakyat sangat menentukan hasil pertempuran. Jadi, Bung Tomo bukan hanya berperan secara fisik, tapi juga psikologis dan ideologis.

Kegiatan Kelompok 1

Pada kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan mengidentifikasi perlawanan bersenjata di berbagai daerah, mengenal tokoh-tokohnya, serta menganalisis dampaknya bagi kelangsungan kemerdekaan Indonesia.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang, lalu pelajari data perlawanan bersenjata berikut:

Tabel sederhana data perlawanan bersenjata

Peristiwa	Lokasi	Tokoh Penting	Dampak
Pertempuran Surabaya	Surabaya	Bung Tomo, Arek Suroboyo	Simbol perlawanan, lahirnya Hari Pahlawan
Pertempuran Ambarawa	Ambarawa	Kolonel Soedirman	Penguatan semangat perlawanan rakyat
Medan Area	Medan	Pemuda Medan, Tentara Keamanan Rakyat	Perlawanan terhadap upaya Belanda masuk Sumatera

2. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut:
 - a. Apa latar belakang terjadinya pertempuran di masing-masing daerah?

- b. Siapa saja tokoh penting yang terlibat dan apa perannya?
 - c. Apa dampak pertempuran tersebut terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan?
 - d. Bagaimana peran rakyat dalam pertempuran-pertempuran tersebut?
 - e. Apa yang dapat kita pelajari dari semangat perjuangan bersenjata para pahlawan?
3. Susun hasil diskusi kelompok dalam bentuk peta konsep atau tabel ringkasan.



4. Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan melalui Diplomasi

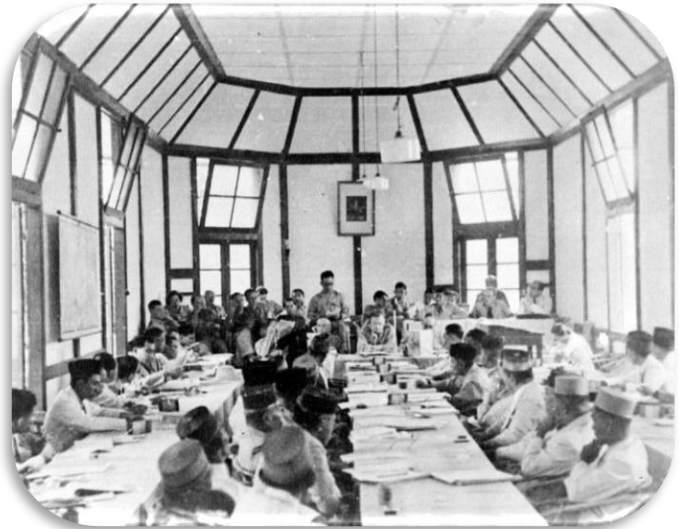
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui jalur **diplomasi**. Diplomasi adalah upaya mencapai tujuan politik melalui perundingan damai, dan dalam konteks Indonesia, diplomasi bertujuan untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan serta menyelesaikan konflik dengan Belanda. Ada tiga cara utama yang dilakukan dalam diplomasi:

- 1) **Perundingan langsung** antara Indonesia dan Belanda, seperti yang terlihat dalam berbagai perjanjian (Linggajati, Renville, Roem-Royen).
- 2) **Keterlibatan pihak ketiga** sebagai mediator internasional, termasuk melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh PBB seperti **Komisi Tiga Negara (KTN)** dan **UNCI (United Nations Commission for Indonesia)**.
- 3) **Penggunaan organisasi internasional** seperti **PBB** untuk mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan hukum internasional.

Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia:

Perundingan Pendahuluan dan Konferensi Malino (16-25 Juli 1946)

Pada masa awal kemerdekaan, Belanda mencoba membentuk negara-negara federal di luar kekuasaan Republik Indonesia melalui konferensi-konferensi seperti **Konferensi Malino**. **Konferensi Malino** diadakan di Sulawesi Selatan dari 16 hingga 25 Juli 1946 oleh **NICA (Netherlands Indies Civil Administration)**, dengan tujuan membentuk negara-negara federal yang akan bergabung dalam suatu federasi yang diinginkan Belanda. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kalimantan dan Indonesia Timur. Tokoh-tokoh penting yang hadir termasuk **W.J. van Mook**, Gubernur Jenderal Belanda, yang mengusulkan pembentukan negara boneka seperti **Negara Indonesia Timur (NIT)**. Dalam konferensi ini, Belanda berusaha memperkuat cengkeramannya di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan, meskipun Republik Indonesia tidak dilibatkan.



Konferensi di Malino yang Melibatkan 39 Orang - Wikipedia.com

Perundingan Linggarjati (10-15 November 1946)

Perundingan Linggarjati adalah salah satu perundingan besar yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik pasca kemerdekaan. Perundingan ini diadakan di **Linggarjati, Kuningan**, dan dimulai pada **10-15 November 1946**, meskipun hasil resminya baru diumumkan pada **25 Maret 1947**.

a. Hasil Perundingan Linggarjati

Perundingan ini menghasilkan beberapa poin penting:

- Belanda mengakui secara **de facto** kekuasaan Republik Indonesia atas **Jawa, Sumatra, dan Madura**.
- Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk **Republik Indonesia Serikat (RIS)** yang terdiri dari negara-negara bagian, termasuk Republik Indonesia sebagai salah satu komponennya.

- ▷ RIS akan menjadi bagian dari **Uni Indonesia-Belanda** yang dihubungkan oleh kerajaan Belanda dalam urusan luar negeri dan pertahanan.

b. **Dinamika Internal Pasca-Perjanjian Linggarjati**

Hasil perundingan Linggarjati menimbulkan reaksi yang beragam di Indonesia. Banyak pihak, terutama golongan radikal, menganggap perjanjian ini terlalu menguntungkan Belanda. Di dalam tubuh pemerintahan sendiri terjadi ketegangan, dengan beberapa tokoh nasionalis seperti **Sutan Sjahrir** mendukung perjanjian tersebut, sementara lainnya seperti **Tan Malaka** dan kelompok sayap kiri menentang keras.

Komisi Tiga Negara (KTN)

Setelah terjadinya **Agresi Militer Belanda I** pada Juli 1947, PBB membentuk **Komisi Tiga Negara (KTN)** sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. KTN dibentuk oleh **Committee of Good Offices for Indonesia**, sebuah badan di bawah PBB yang bertugas memfasilitasi perundingan damai. Berikut adalah anggota KTN:

- a. **Australia** (dipilih oleh Indonesia), diwakili oleh **Richard Kirby**.
- b. **Belgia** (dipilih oleh Belanda), diwakili oleh **Paul van Zeeland**.
- c. **Amerika Serikat** (dipilih bersama), diwakili oleh **Frank Porter Graham**.

KTN memainkan peran penting dalam memantau gencatan senjata dan memfasilitasi **Perundingan Renville**.

Perundingan Renville (8 Desember 1947 - 17 Januari 1948)

Perundingan Renville berlangsung di atas kapal perang Amerika Serikat, **USS Renville**, dan dimulai pada 8 Desember 1947. Perundingan ini diadakan sebagai tindak lanjut dari upaya KTN untuk menyelesaikan konflik setelah Agresi Militer Belanda I. Perundingan ini berakhir pada **17 Januari 1948**.

a. **Hasil Perundingan Renville**

Perundingan ini menghasilkan beberapa poin penting:

- ▷ Pengakuan **garis demarkasi Van Mook** yang membagi wilayah kekuasaan antara Belanda dan Republik Indonesia. Garis ini sangat merugikan Indonesia karena banyak wilayah yang jatuh ke tangan Belanda.
- ▷ Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia, tetapi hanya di wilayah yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil perundingan Linggarjati.

b. **Tanggapan Indonesia**

Pemerintah Indonesia, terutama pihak yang mendukung perjuangan diplomasi seperti **Amir Sjarifuddin**, terpaksa menerima hasil perundingan ini, meskipun banyak penolakan dari dalam negeri. Kelompok-kelompok radikal seperti **Partai Komunis Indonesia (PKI)** dan **Tan Malaka** menentang keras hasil ini.

c. **Tanggapan Belanda: Pembentukan Negara-Negara Boneka dan Agresi Militer II**

Belanda terus berusaha melemahkan Republik Indonesia dengan mendirikan **negara-negara boneka**, seperti **Negara Indonesia Timur** dan **Negara Pasundan**, di bawah bendera **BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg)**, sebuah forum negara-negara federal buatan Belanda.

Belanda kemudian melancarkan **Agresi Militer II** pada **19 Desember 1948**, yang berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Penangkapan Soekarno dan Hatta menjadi puncak serangan ini.

d. Serangan Umum 1 Maret 1949

Namun, perlawanan rakyat tidak berhenti. Pada **1 Maret 1949**, **Letnan Kolonel Soeharto** memimpin **Serangan Umum di Yogyakarta**, yang berhasil merebut kota selama 6 jam dari tangan Belanda. Serangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan untuk melawan, dan memberikan pengaruh besar dalam perundingan diplomasi selanjutnya.



Fakta Unik di Balik Sejarah



*Pertemuan Pleno Pertama di Kapal
Pengangkut Pasukan Amerika Renville –
Wikimedia.commons*

Perundingan Damai di Atas Kapal Perang

Perundingan Renville berlangsung di atas kapal perang milik Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di Teluk Jakarta. Ini menarik karena biasanya perundingan dilakukan di tempat netral atau gedung konferensi yang menggambarkan betapa tegang dan gentingnya situasi saat itu. Fakta ini juga menunjukkan peran aktif Amerika Serikat dalam menjadi penengah, lewat Komisi Tiga Negara.

Perundingan Roem-Royen (14 April-7 Mei 1949)

Perundingan ini dinamai dari tokoh perwakilan Indonesia, **Mohammad Roem**, dan perwakilan Belanda, **Dr. J.H. van Royen**. Perundingan ini diadakan setelah PBB mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan akibat tekanan internasional dan Serangan Umum 1 Maret. Berikut adalah hasil perundingan Roem-Royen:

- Belanda sepakat untuk menghentikan agresi militer dan mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke **Yogyakarta**.
- Pasukan TNI akan berhenti berperang dan ditempatkan di wilayah yang telah disepakati.
- Konferensi Meja Bundar (KMB) akan segera diadakan untuk menentukan nasib Indonesia selanjutnya.

Konferensi Inter-Indonesia (19-22 Juli 1949)

Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk memperkuat persatuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara bagian di bawah naungan **BFO**. Konferensi ini merupakan upaya Indonesia untuk mencapai kesepakatan internal sebelum menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Berikut adalah hasil Konferensi Inter-Indonesia:

- BFO dan Republik Indonesia sepakat untuk menyusun bentuk **Republik Indonesia Serikat (RIS)** sebagai negara federal.
- Kesepakatan untuk menyatukan militer antara Republik Indonesia dan negara-negara bagian di bawah RIS.

Tokoh yang terlibat termasuk **Mohammad Hatta** dan **Wali Negara Pasundan, Mr. Soemitro Kolopaking**.

Konferensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949)

Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di **Den Haag, Belanda**, dan dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Belanda, dan BFO. Konferensi ini merupakan puncak dari perjuangan diplomasi Indonesia.

a. Hasil KMB

- ▷ Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada **27 Desember 1949**, kecuali wilayah **Irian Barat** yang masih diperdebatkan.
- ▷ Indonesia akan berbentuk **Republik Indonesia Serikat (RIS)**, dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai perdana menteri.
- ▷ Penarikan pasukan Belanda secara bertahap dari wilayah Indonesia.

b. Tokoh-tokoh penting

- ▷ **Mohammad Hatta** sebagai pemimpin delegasi Indonesia.
- ▷ **Willem Drees** sebagai Perdana Menteri Belanda.

Dengan hasil KMB, perjuangan diplomasi Indonesia mencapai puncaknya, di mana Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan secara resmi kepada Indonesia. Namun, masalah Irian Barat masih belum selesai dan akan menjadi isu diplomasi di masa mendatang.

Contoh Soal

Bandingkan hasil Perundingan Linggarjati dan Renville.

Evaluasilah perbedaan dampaknya terhadap posisi politik dan wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Mana yang lebih merugikan Indonesia? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Perundingan Linggarjati masih menguntungkan karena Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Sumatra, dan Madura. Sedangkan Renville sangat merugikan karena:

- ▷ Garis Van Mook membuat wilayah RI semakin sempit.
- ▷ Legitimasi politik Indonesia melemah karena pengaruh Belanda semakin kuat dengan pembentukan negara-negara boneka.

Jadi, Perundingan Renville lebih merugikan Indonesia.

Pembahasan:

Linggarjati masih memberi ruang gerak yang lebih luas untuk Republik Indonesia secara wilayah dan diplomatik. Sebaliknya, Renville justru mempersempit kekuasaan RI, dan digunakan Belanda sebagai dalih untuk terus menciptakan negara-negara federal buatan. Ini memperjelas bahwa perundingan tidak selalu berarti keuntungan, tergantung konteks dan hasil konkretnya.

Kegiatan Kelompok 2

Pada kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan memetakan secara visual peristiwa-peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menghubungkan perjuangan fisik dan diplomasi, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memahami rangkaian sejarah bangsa.

1. Bentuk kelompok berisi 4–5 orang, lalu siapkan kertas besar atau gunakan lembar peta Indonesia
2. Tandai lokasi-lokasi berikut di peta:
 - ▷ Surabaya (Pertempuran Surabaya)
 - ▷ Ambarawa (Pertempuran Ambarawa)
 - ▷ Medan (Medan Area)
 - ▷ Jakarta (Perundingan Linggarjati)
 - ▷ Kaliurang (Perundingan Renville)
3. Di setiap titik lokasi, tuliskan secara ringkas
 - ▷ Apa yang terjadi?
 - ▷ Siapa tokoh utamanya?
 - ▷ Apa dampaknya terhadap perjuangan bangsa?
4. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis, sehingga terlihat jelas keterkaitan perjuangan bersenjata dan diplomasi.
5. Tambahkan gambar sederhana atau ikon untuk memperjelas informasi.
6. Tuliskan kesimpulan: Bagaimana kombinasi perjuangan fisik dan diplomasi memperkuat upaya mempertahankan kemerdekaan?



5. Pengakuan Kedaulatan

Setelah melalui perjuangan panjang, baik melalui diplomasi maupun kekuatan senjata, Indonesia akhirnya mencapai pengakuan kedaulatan secara internasional. Proses ini merupakan puncak dari negosiasi yang telah dilakukan selama beberapa tahun antara Indonesia dan Belanda, terutama melalui **Konferensi Meja Bundar (KMB)** yang berlangsung dari **23 Agustus hingga 2 November 1949** di **Den Haag, Belanda**.

Pada tanggal **27 Desember 1949**, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada **Republik Indonesia Serikat (RIS)**. Pengakuan kedaulatan ini menandai akhir dari perjuangan diplomatik yang panjang dan menjadi titik awal baru bagi Indonesia untuk berdiri sebagai negara merdeka yang diakui secara internasional. Namun, proses menuju pengakuan kedaulatan ini tidaklah mudah dan melibatkan berbagai tokoh penting serta negosiasi yang kompleks.

Delegasi RIS dan Misi

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB), delegasi dari **Republik Indonesia Serikat (RIS)** dipimpin oleh **Mohammad Hatta**, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Delegasi ini memiliki tugas utama yaitu memperoleh **pengakuan kedaulatan** dari Belanda.

a. Misi Utama

- ▷ **Menegosiasikan bentuk negara baru** yang akan dibentuk, yaitu **Republik Indonesia Serikat (RIS)**, di mana Belanda berharap RIS akan menjadi federasi yang lebih mudah diatur.
- ▷ **Menuntaskan pengalihan kedaulatan** dari Belanda kepada RIS, yang mencakup urusan administratif, militer, dan ekonomi.
- ▷ **Membahas isu Irian Barat**, yang masih menjadi sengketa dan belum diserahkan kepada Indonesia. Irian Barat akan dipertimbangkan dalam perundingan berikutnya karena Belanda menolak menyerahkannya secara langsung.

b. Tokoh-tokoh dalam Delegasi RIS

- ▷ **Mohammad Hatta** sebagai pemimpin delegasi Indonesia.
- ▷ **Mohammad Roem**, tokoh penting yang berperan dalam perundingan **Roem-Royen**.
- ▷ **Sultan Hamid II**, yang juga terlibat sebagai perwakilan dari BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*), atau perhimpunan negara-negara federal bentukan Belanda.
- ▷ **Dr. Leimena, A.A. Maramis**, dan **Wilopo** juga merupakan tokoh-tokoh yang mendukung delegasi ini.



Presiden Soekarno, Ir. Juanda dan Beame di Kemayoran menyambut kedatangan Moh. Hatta yang menjadi Delegasi RIS dari Den Haag – khastara.perpusnas.go.id

Pengalihan Kedaulatan: Tanggal 27 Desember 1949

Pada **27 Desember 1949**, di **Istana Dam, Amsterdam**, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada upacara tersebut, **Ratu Juliana** dari Belanda menyerahkan dokumen pengakuan kedaulatan kepada **Mohammad Hatta**, sebagai perwakilan dari Indonesia. Di Indonesia, Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS.

Selain upacara di Belanda, pada hari yang sama, di **Yogyakarta**, pemerintah Indonesia mengadakan upacara serupa di mana Soekarno menerima pengakuan resmi dari pemerintah RIS dan mulai menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. **Sultan Hamengkubuwono IX** berperan penting dalam upacara di Yogyakarta sebagai simbol persatuan bangsa.

Pengakuan kedaulatan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya Indonesia diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda, meskipun dalam bentuk federasi **RIS**. Meskipun demikian, RIS adalah bentuk negara sementara, dan dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan kembali menjadi negara kesatuan.

Zaken Kabinet: Pemerintahan Ahli

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia membentuk **Zaken Kabinet**, atau kabinet ahli, sebagai langkah awal untuk menjalankan pemerintahan RIS. **Zaken Kabinet** adalah kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu, bukan karena afiliasi politik. Kabinet ini dibentuk dengan tujuan untuk menghadapi tantangan awal yang dihadapi oleh Indonesia yang baru diakui sebagai negara merdeka. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam Zaken Kabinet:

- a. **Mohammad Hatta** sebagai Perdana Menteri RIS.
- b. **Sultan Hamid II** sebagai Menteri Negara.
- c. **Dr. Leimena** sebagai Menteri Kesehatan.
- d. **A.A. Maramis** sebagai Menteri Keuangan.

Zaken Kabinet bertugas untuk membangun struktur pemerintahan yang stabil dan menjalankan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan untuk memperkuat perekonomian dan administrasi negara yang baru saja berdaulat. Kabinet ini menjadi dasar pemerintahan Indonesia selama transisi dari RIS menuju negara kesatuan.

Masalah yang Muncul dalam Proses Pengakuan Kedaulatan

Meskipun pengakuan kedaulatan Indonesia merupakan pencapaian besar, terdapat beberapa masalah yang masih perlu diselesaikan:

a. Irian Barat

Irian Barat belum diserahkan kepada Indonesia, dan akan menjadi perdebatan panjang yang baru terselesaikan pada tahun 1960-an.

b. Negara-Negara Bagian dalam RIS

Negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda, seperti **Negara Indonesia Timur** dan **Negara Pasundan**, menimbulkan ketegangan antara wilayah-wilayah tersebut dengan Republik Indonesia. Beberapa negara bagian ini dianggap sebagai **negara boneka** yang dibentuk oleh Belanda untuk melemahkan Republik Indonesia.

c. Transisi Kekuasaan

Proses transisi kekuasaan dari Belanda ke Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Banyak urusan administratif, ekonomi, dan militer yang membutuhkan waktu dan negosiasi lebih lanjut.

Pengakhiran Republik Indonesia Serikat dan Kembali ke Negara Kesatuan

Meskipun RIS merupakan bentuk negara yang disepakati dalam KMB, banyak pihak di Indonesia yang tidak setuju dengan bentuk federal tersebut, karena dianggap sebagai upaya Belanda untuk melemahkan kedaulatan Indonesia. Setelah berbagai konflik internal dan ketidakpuasan di berbagai wilayah, akhirnya pada **17 Agustus 1950**, Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**, dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Contoh Soal

Evaluasilah bagaimana pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949 mempengaruhi perkembangan politik dan pemerintahan Indonesia dalam jangka pendek dan panjang!

Jawaban:

Dalam jangka pendek, pengakuan kedaulatan menandai kemenangan diplomasi Indonesia dan awal terbentuknya pemerintahan RIS dengan sistem federal. Namun, dalam jangka panjang, bentuk federal ini menimbulkan ketegangan dan instabilitas politik, karena banyak wilayah menolak sistem RIS. Hal ini menyebabkan pembubaran RIS dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Pembahasan:

Pengakuan kedaulatan adalah titik balik sejarah, tapi membawa tantangan baru: pengelolaan negara yang plural dalam struktur federal yang dianggap "warisan kolonial." Perubahan ke bentuk NKRI adalah refleksi dari keinginan rakyat untuk kembali ke satu identitas nasional yang kuat.



6. Kembali ke Bentuk Negara Kesatuan (17 Agustus 1950)

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada **27 Desember 1949**, Indonesia resmi menjadi **Republik Indonesia Serikat (RIS)**. Bentuk negara federal ini terdiri dari berbagai negara bagian, seperti **Negara Indonesia Timur (NIT)** dan **Negara Pasundan**, yang dibentuk oleh Belanda selama masa penjajahan. Namun, dalam waktu kurang dari satu tahun, muncul banyak ketegangan dan ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal ini. Tekanan politik, masalah ekonomi, dan ancaman keamanan menyebabkan RIS dianggap tidak stabil, sehingga akhirnya Indonesia kembali ke bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** pada **17 Agustus 1950**.

Faktor yang Melatarbelakangi Bubarnya RIS

a. Ketidakpuasan terhadap Sistem Federal

- ▷ Banyak pihak di Indonesia, terutama para pemimpin dari **Republik Indonesia** yang dipimpin oleh **Soekarno** dan **Mohammad Hatta**, merasa bahwa federalisme hanya merupakan "warisan" dari Belanda untuk memecah belah Indonesia. Sistem ini dianggap sebagai strategi Belanda untuk melemahkan kedaulatan Indonesia dan mempertahankan pengaruhnya di wilayah-wilayah yang tergabung dalam negara-negara bagian.
- ▷ **Negara-negara bagian** seperti **Negara Indonesia Timur** dan **Negara Pasundan** dianggap sebagai **negara boneka** yang tidak memiliki legitimasi kuat di kalangan rakyat.

b. Masalah Ekonomi

- ▷ Setelah pembentukan RIS, perekonomian Indonesia masih dalam kondisi yang sangat lemah. Inflasi yang tinggi, kurangnya investasi, dan keterbatasan sumber daya membuat sistem federal sulit untuk berfungsi secara efektif. Sistem ekonomi terpecah di berbagai negara bagian dan koordinasi antara mereka sering tidak berjalan dengan baik.
- ▷ **Ekonomi Indonesia** pada waktu itu sangat bergantung pada impor, sementara ekspor terganggu akibat perang dan ketidakstabilan politik. Hal ini memperburuk kondisi keuangan negara.

c. Ancaman Keamanan

Salah satu faktor utama yang mempercepat bubarnya RIS adalah ancaman keamanan dari berbagai kelompok milisi dan gerakan separatis. Beberapa dari kelompok ini menolak pemerintahan pusat dan mendukung negara-negara bagian untuk mempertahankan kekuasaan otonom.

Masalah Keamanan dan Perlawanan Militer

Setelah terbentuknya RIS, muncul berbagai ancaman militer dan gerakan separatis yang mencoba mempertahankan status negara bagian mereka atau bahkan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Beberapa konflik besar yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional adalah:

a. APRIS dan KNIL

- ▷ Setelah pengakuan kedaulatan, militer Indonesia diatur dalam satu kesatuan yang disebut **APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat)**, yang terdiri dari unsur-unsur TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan **KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger)**, tentara kolonial Belanda.
- ▷ Integrasi ini menimbulkan banyak masalah, terutama karena loyalitas sebagian besar prajurit KNIL masih kepada Belanda. Banyak mantan prajurit KNIL tidak setuju untuk bergabung dengan APRIS, sehingga mereka mendukung gerakan separatis.

b. APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

- **APRA** adalah kelompok milisi yang dipimpin oleh **Raymond Westerling**, seorang mantan perwira KNIL. Pada **23 Januari 1950**, Westerling melakukan pemberontakan di **Bandung** dengan tujuan mempertahankan bentuk negara federal dan menjaga status Negara Pasundan sebagai bagian dari RIS. Westerling ingin APRA dijadikan sebagai milisi resmi Negara Pasundan.
- **Pemberontakan APRA** berhasil dipadamkan oleh APRIS, namun pemberontakan ini memperlihatkan ketidakstabilan RIS, terutama di wilayah Jawa Barat, di mana Negara Pasundan berpusat.



Panglima Besar Jenderal Soedirman, Panglima Tentara Nasional Indonesia Pertama – Wikipedia.com

c. RMS (Republik Maluku Selatan)

- Pada **25 April 1950**, **Republik Maluku Selatan (RMS)** diproklamasikan oleh **Christian Robert Steven Soumokil**, seorang mantan jaksa di NIT. Gerakan ini menolak RIS dan ingin mendirikan negara merdeka di Maluku.
- APRIS segera dikirim untuk menumpas gerakan RMS. Pada bulan November 1950, sebagian besar kekuatan RMS berhasil ditumpas, namun pemberontakan ini menambah ketidakstabilan di Indonesia dan mempercepat proses pembubaran RIS.

Kembali ke Negara Kesatuan (17 Agustus 1950)

Melihat situasi politik, ekonomi, dan keamanan yang semakin tidak stabil, banyak pihak mendesak agar Indonesia kembali ke bentuk **Negara Kesatuan**. Pada bulan Mei 1950, melalui **Konferensi Inter-Indonesia**, perwakilan dari negara-negara bagian dan Republik Indonesia sepakat untuk membubarkan RIS dan membentuk kembali negara kesatuan. Akhirnya, pada **17 Agustus 1950**, tepat lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia resmi kembali menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan penting:

- Soekarno** sebagai Presiden.
- Mohammad Hatta** sebagai Wakil Presiden.
- Mohammad Natsir** yang mengusulkan **Mosi Integral Natsir**, yang menjadi landasan penting dalam upaya mengembalikan bentuk negara kesatuan.



Fakta Unik di Balik Sejarah

Banyak Eks Tentara KNIL Mendukung RMS

Sebagian besar pendukung RMS adalah bekas tentara KNIL (*Koninklijk Nederlands Indisch Leger*) asal Maluku. Ketika Indonesia merdeka, mereka merasa terpinggirkan dan akhirnya memilih mendukung RMS.



Foto grup KNIL antara tahun 1905 dan 1915 – Wikipedia.com

UUD Sementara 1950 (UUDS 1950)

Setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, dibentuklah **Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950)** yang mulai berlaku pada **17 Agustus 1950**. UUDS 1950 ini disusun sebagai langkah sementara untuk menggantikan UUD 1945, dengan tujuan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih demokratis. Berikut adalah beberapa poin penting dalam UUDS 1950:

- Bentuk negara adalah **negara kesatuan** dengan sistem pemerintahan parlementer.
- Presiden menjadi kepala negara, tetapi kepala pemerintahan berada di tangan **Perdana Menteri** yang dipilih oleh parlemen.
- Sistem **multi partai** dan pemilihan umum yang lebih terbuka, yang memberikan ruang bagi partisipasi politik dari berbagai golongan masyarakat.

Namun, UUDS 1950 hanya bersifat sementara karena pada **5 Juli 1959**, Presiden Soekarno mengeluarkan **Dekret Presiden** untuk kembali ke **UUD 1945**, dengan alasan bahwa sistem parlementer yang diatur dalam UUDS 1950 tidak efektif dalam menghadapi tantangan nasional pada masa itu.

Contoh Soal

Bagaimana peran Mosi Integral Natsir dalam proses pembubaran RIS dan kembalinya Indonesia ke negara kesatuan, dan mengapa mosi tersebut menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia?

Jawaban:

Mosi Integral Natsir yang diajukan oleh Mohammad Natsir di parlemen RIS merupakan langkah politik yang menyatukan kembali berbagai negara bagian ke dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Mosi ini menjadi titik penting karena berhasil mendapatkan dukungan luas dari berbagai tokoh dan daerah, menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa RIS tidak efektif. Mosi ini juga mempercepat proses transisi kembali ke NKRI secara konstitusional dan damai, tanpa kekerasan besar.

Pembahasan:

Mosi Integral menjadi simbol perlawanan terhadap federalisme buatan Belanda dan menunjukkan bahwa perubahan bisa dicapai melalui jalur konstitusional yang cerdas dan demokratis. Ini penting dalam pembelajaran sejarah politik Indonesia.

Rangkuman

Bab ini mencakup perjalanan panjang Indonesia dalam mempertahankan dan memperkuat kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun telah menyatakan kemerdekaan, Indonesia harus menghadapi tantangan besar dari kedatangan Sekutu dan NICA yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda. Berbagai pertempuran besar, seperti Pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, dan Pertempuran Surabaya, menunjukkan semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan mereka.

Selain perjuangan bersenjata, diplomasi juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati dan Renville merupakan contoh perundingan yang diadakan dengan Belanda untuk mencapai kesepakatan damai, meskipun sering menimbulkan ketidakpuasan di dalam negeri. Pada akhirnya, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, menandai titik awal pengakuan internasional bagi negara ini.

Meskipun demikian, pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang disepakati dalam KMB tidak bertahan lama. Krisis politik, ancaman keamanan dari gerakan separatis seperti APRA dan RMS, serta ketidakstabilan ekonomi mempercepat proses pembubaran RIS. Berbagai ancaman militer ini menunjukkan ketidakstabilan yang dihadapi negara baru tersebut, yang akhirnya mengarahkan Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

Pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan ini diperkuat dengan diterapkannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950), yang menjadi dasar pemerintahan parlementer di Indonesia. Namun, tantangan dalam mengelola negara yang baru merdeka masih ada, termasuk dalam menghadapi masalah keamanan dan ekonomi.

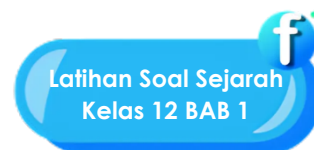
Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Langkah ini mengakhiri sistem parlementer yang dianggap tidak efektif dan memperkuat pemerintahan presidensial yang lebih terpusat. Kesimpulannya, perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan menunjukkan betapa pentingnya kombinasi antara kekuatan senjata dan diplomasi dalam mencapai kedaulatan penuh.

Latihan Soal

1. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan untuk membentuk negara dan pemerintahan yang sah. Salah satu langkah awal yang penting dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah...
 - A. Membentuk TNI sebagai kekuatan pertahanan utama negara
 - B. Menunjuk Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis melalui pemilu
 - C. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara
 - D. Menjalin hubungan diplomatik pertama dengan Belanda
 - E. Menetapkan ibukota negara secara resmi di Yogyakarta
2. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pengambilalihan kekuasaan dan aset dari tangan Jepang tidak berjalan mulus di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa proses pengambilalihan ini tidak dapat dilakukan secara seragam di semua daerah, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan tantangan nyata dalam membangun pemerintahan yang berdaulat?
 - A. Karena pemuda di daerah tidak memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk merebut kekuasaan dari Jepang.
 - B. Karena pemerintah pusat melarang pengambilalihan kekuasaan agar tidak menimbulkan konflik dengan Jepang.
 - C. Karena status quo yang ditetapkan Sekutu mengharuskan Jepang tetap memegang kekuasaan sementara hingga Sekutu datang.
 - D. Karena Jepang secara sukarela menyerahkan semua aset dan kekuasaan kepada pemuda Indonesia di setiap daerah.
 - E. Karena seluruh proses pengambilalihan hanya dilakukan oleh organisasi pemuda pusat, bukan inisiatif lokal.
3. Setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai daerah di Indonesia mengalami pertempuran fisik melawan Sekutu dan NICA. Meskipun menghadapi keterbatasan persenjataan dan jumlah personel, semangat perjuangan rakyat tidak surut. Dari pertempuran yang terjadi, mana di antara peristiwa berikut yang menunjukkan strategi "menghancurkan sumber daya sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh", dan apa alasan utama di balik keputusan tersebut?
 - A. Pertempuran Surabaya, karena rakyat memilih perlawanan habis-habisan setelah ultimatum dari Sekutu diabaikan.
 - B. Palagan Ambarawa, karena Kolonel Soedirman menggunakan taktik "supit urang" untuk mengepung dan mengusir musuh.
 - C. Bandung Lautan Api, karena pejuang dan rakyat Bandung membakar kota sebelum mundur agar tidak dimanfaatkan oleh musuh.
 - D. Puputan Margarana, karena seluruh pasukan memilih bertempur sampai mati untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa.
 - E. Pertempuran Medan Area, karena rakyat Medan melakukan perlawanan secara luas di sekitar kota dan mempertahankan daerah mereka dari kolonialisme.
4. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal perang milik negara...
 - A. Belanda
 - B. Inggris

- C. Amerika Serikat
 - D. D. Australia
 - E. E. Prancis
5. Setelah Perundingan Linggarjati disepakati, berbagai pihak di Indonesia menunjukkan reaksi yang berbeda. Beberapa kalangan menilai bahwa perjanjian tersebut terlalu menguntungkan Belanda. Berdasarkan analisis politik dan sosial saat itu, mengapa perundingan seperti Linggarjati tetap dipilih sebagai strategi oleh pemerintah Indonesia, meskipun mendapat kritik dari dalam negeri?
- A. Karena perundingan Linggarjati menjamin kemerdekaan penuh Indonesia tanpa syarat.
 - B. Karena Indonesia belum memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang cukup untuk melawan Belanda dalam perang terbuka.
 - C. Karena Belanda secara sepihak telah mengakui wilayah Indonesia secara de jure di seluruh Nusantara.
 - D. Karena tekanan dari negara-negara Barat agar Indonesia tunduk kepada Belanda.
 - E. Karena kehadiran pasukan Jepang masih dominan dan mengancam keamanan Indonesia.
6. Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dilaksanakan di kota...
- A. Amsterdam
 - B. Yogyakarta
 - C. Jakarta
 - D. Den Haag
 - E. Rotterdam
7. Gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan oleh...
- A. Raymond Westerling
 - B. Sultan Hamid II
 - C. Mohammad Natsir
 - D. C.R.S. Soumokil
 - E. A.A. Maramis

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- K. P. (u.d.). Jejak sejarah panjang dalam mempertahankan kemerdekaan [E-book]. <https://kemdikbud.go.id>
- Hamengkubuwono IX, S. (1945). Dukungan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta: Keraton Yogyakarta.
- Hatta, M. (1949). Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Den Haag: Pemerintah Belanda.
- Soekarno, I. (1950). Pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pembubaran RIS. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
- Subardjo, A. H. (1945). Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Indonesia. Jakarta: Pemerintah Indonesia.

BAB 2

DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA DARI DEMOKRASI LIBERAL HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Mandiri

Memahami perubahan politik dan ekonomi yang terjadi selama periode-periode demokrasi tersebut. Mereka juga mampu mengidentifikasi konflik dan kompromi politik yang terjadi, serta membuat keputusan berdasarkan analisis mereka terhadap sejarah.

▷ Bernalar Kritis

Mengevaluasi dan menganalisis kebijakan serta sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam periode Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

Tujuan Pembelajaran: Perkembangan demokrasi Indonesia dan dampaknya pada politik, sosial, dan ekonomi

1. Menggali Awal Mula Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

- ▷ Mengeksplorasi bagaimana Indonesia menerapkan prinsip demokrasi di masa awal kemerdekaan dan tantangan yang dihadapi.
- ▷ Menelusuri evolusi sistem pemerintahan dan cara rakyat berpartisipasi melalui pemilu serta perkembangan partai politik.
- ▷ Mengidentifikasi peran tokoh-tokoh kunci dalam membangun sistem demokrasi di Indonesia.
- ▷ Menelaah konflik dan kompromi politik yang terjadi di masa awal demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Kata Kunci: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Pemerintahan Indonesia, Pemilu, Partai Politik.

2. Memetakan Kebijakan Pemerintah di Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

- ▷ Mengidentifikasi kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan pemerintah selama masa Demokrasi Liberal dan perubahannya pada Demokrasi Terpimpin.
- ▷ Mengupas bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia bergeser antara kedua periode ini.
- ▷ Menguraikan dampak kebijakan sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat selama kedua masa pemerintahan.
- ▷ Menjelaskan peran kebijakan-kebijakan ini dalam membentuk identitas politik Indonesia di mata dunia internasional.

3. Memetakan Kebijakan Pemerintah di Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

- ▷ Mengidentifikasi kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan pemerintah selama masa Demokrasi Liberal dan perubahannya pada Demokrasi Terpimpin.
- ▷ Mengupas bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia bergeser antara kedua periode ini.
- ▷ Menguraikan dampak kebijakan sosial dan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat selama kedua masa pemerintahan.
- ▷ Menjelaskan peran kebijakan-kebijakan ini dalam membentuk identitas politik Indonesia di mata dunia internasional.

4. Menyelami Kondisi Ekonomi dan Politik dalam Dua Era Demokrasi

- ▷ Menggambarkan keadaan ekonomi Indonesia selama masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, serta faktor-faktor yang membentuknya.
- ▷ Menjelaskan dinamika politik yang melibatkan berbagai partai dan kelompok sosial pada masa Demokrasi Liberal.
- ▷ Menganalisis krisis ekonomi yang dihadapi pemerintah, dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin.
- ▷ Menilai ketegangan politik antara pro-demokrasi dan otoritarianisme yang berujung pada munculnya Demokrasi Terpimpin.



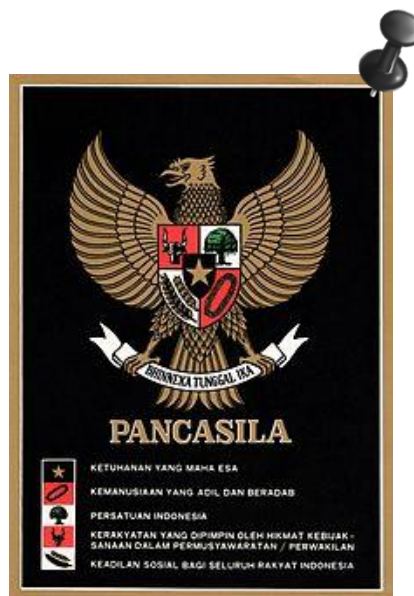
1. Transformasi Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis dalam mengembangkan sistem pemerintahan dan demokrasinya. Sejak kemerdekaan, bangsa ini telah melalui berbagai perubahan signifikan, baik dalam struktur politik maupun sistem pemerintahan, yang dipengaruhi oleh pergantian era dan kepemimpinan. Setiap fase demokrasi membawa pelajaran penting, mulai dari demokrasi awal, liberal, terpimpin, hingga reformasi. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang perjalanan demokrasi di Indonesia beserta pergantian sistem pemerintahan dari waktu ke waktu.

Indonesia Menjunjung Demokrasi dari Masa ke Masa

Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah berusaha menempatkan **demokrasi** sebagai prinsip utama dalam pemerintahan. Meskipun sering menghadapi tantangan, demokrasi di Indonesia terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik bangsa. Demokrasi di Indonesia tidak hanya melibatkan proses pemilihan umum, tetapi juga bagaimana nilai-nilai musyawarah dan mufakat menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan.

- a. **Masa Demokrasi Awal (1945-1950):** Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia berupaya menerapkan demokrasi dengan konsep **kedaulatan rakyat**, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan presidensial diterapkan dengan **UUD 1945** sebagai konstitusi negara.
- b. **Pemilu 1955:** Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pemilu ini diselenggarakan untuk memilih anggota parlemen dan konstituante.
- c. **Masa Demokrasi Pancasila:** Di era **Orde Baru**, **Demokrasi Pancasila** ditekankan, dengan konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai **Pancasila** dan stabilitas politik sebagai tujuan utama. Demokrasi pada masa ini dikelola dengan sangat terpusat pada pemerintahan Soeharto.



Pancasila – commons.wikimedia.org

Para Pendiri Bangsa dalam Merumuskan Demokrasi Indonesia

Para pendiri bangsa Indonesia berperan penting dalam merumuskan sistem pemerintahan yang demokratis setelah kemerdekaan. **Soekarno**, **Mohammad Hatta**, **Sutan Sjahrir**, dan banyak tokoh lainnya memberikan kontribusi besar dalam membentuk arah politik bangsa. Mereka memahami pentingnya demokrasi untuk menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa yang sangat beragam. Setiap tokoh memiliki peran dan visi yang unik dalam membentuk dasar pemerintahan Indonesia.

- a. **Soekarno dan Pancasila:** **Soekarno**, sebagai proklamator, merumuskan **Pancasila** sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bagi Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Pancasila menekankan persatuan, keadilan sosial, dan musyawarah.
- b. **Mohammad Hatta dan Demokrasi:** **Hatta**, Wakil Presiden pertama Indonesia, merupakan pendukung kuat sistem demokrasi dengan menekankan pentingnya **musyawarah dan mufakat** dalam pengambilan keputusan, serta penguatan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.
- c. **Sutan Sjahrir:** Sebagai perdana menteri pertama, Sjahrir memainkan peran kunci dalam mengarahkan Indonesia pada **demokrasi parlementer** dan pengembangan pemerintahan sipil yang terlepas dari pengaruh militer.

Perjalanan UUD: Dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami perubahan konstitusi yang mencerminkan perubahan sistem politik. Pada awal kemerdekaan, **UUD 1945** diadopsi sebagai konstitusi dasar negara yang mengatur pemerintahan dengan sistem presidensial. Namun, seiring perkembangan politik, pada **1950**, Indonesia menggunakan **UUD Sementara 1950** yang memperkenalkan sistem parlementer.

- a. **UUD 1945:** UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan **presidensial**. Konstitusi ini dirancang untuk memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden dalam mengelola negara.
- b. **UUDS 1950:** Pada masa **Demokrasi Liberal (1950-1959)**, UUD 1945 digantikan oleh **UUD Sementara 1950**, yang memperkenalkan sistem **parlementer**, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.
- c. **Kembali ke UUD 1945:** Pada **5 Juli 1959**, Presiden Soekarno mengeluarkan **Dekret Presiden** untuk kembali ke UUD 1945 setelah melihat ketidakstabilan sistem parlementer. Dekrit ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal dan memulai era **Demokrasi Terpimpin**.



Fakta Unik di Balik Sejarah



Monumen Pancasila Sakti untuk Mengenang Perjuangan Pahlawan Revolusi – Wikipedia.com

Salah Satu Tragedi Kemanusiaan Terbesar di Asia Tenggara

Pasca peristiwa G30S/PKI, terjadi pembersihan massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, dengan korban yang diperkirakan mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa. Ini adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara yang masih menjadi kontroversi hingga kini.

Peristiwa G30S/PKI: Babak Baru dalam Sejarah Demokrasi

Peristiwa **G30S/PKI** pada 30 September 1965 menjadi titik balik dalam sejarah demokrasi Indonesia. Gerakan yang dituduh dilakukan oleh **Partai Komunis Indonesia (PKI)** ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mendirikan negara komunis. Akibat dari peristiwa ini, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap anggota PKI dan simpatisannya, yang diikuti dengan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

- a. **G30S/PKI:** Gerakan yang dituduh dilakukan oleh PKI ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah ideologi negara. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan politik dan sosial yang besar.
- b. **Kebangkitan Soeharto:** Setelah **Supersemar** (Surat Perintah Sebelas Maret) diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto, militer mulai memegang kendali, dan Soeharto menjadi pemimpin de facto. Soeharto kemudian memimpin transisi menuju **Orde Baru**, menggantikan Demokrasi Terpimpin dengan **Demokrasi Pancasila**.
- c. **Pembersihan PKI:** Peristiwa ini diikuti oleh pembersihan besar-besaran terhadap anggota PKI dan pengikutnya, yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik Indonesia.

Transisi Demokrasi: Dari Demokrasi Terpimpin Hingga Reformasi

Setelah peristiwa G30S/PKI dan kejatuhan Soekarno, Indonesia memasuki era **Orde Baru** di bawah pimpinan Soeharto, yang memperkenalkan konsep **Demokrasi Pancasila**. Pada masa ini, demokrasi dijalankan dengan pengawasan ketat pemerintah, yang sering kali diwarnai dengan otoritarianisme. Akhirnya, krisis ekonomi pada akhir 1990-an dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto memicu gerakan **Reformasi 1998**, yang menggulingkan Soeharto dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka.

- a. **Demokrasi Terpimpin:** Pada masa ini, Soekarno memusatkan kekuasaan di tangannya dengan mengurangi peran parlemen dan partai politik. Sistem ini berfokus pada **stabilitas politik** dan pengendalian penuh pemerintah terhadap berbagai aspek negara.
- b. **Demokrasi Pancasila:** Era Soeharto diwarnai dengan **Demokrasi Pancasila**, di mana demokrasi dijalankan secara terbatas dengan kontrol yang kuat dari pemerintahan pusat. Pemilu diadakan secara rutin, tetapi dengan hasil yang sering kali sudah diprediksi.
- c. **Krisis Ekonomi dan Reformasi:** Pada akhir 1990-an, krisis ekonomi Asia melanda Indonesia dan memicu **gerakan reformasi** yang dipimpin oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Reformasi ini berhasil menggulingkan Soeharto pada tahun 1998 dan membuka era baru demokrasi dengan sistem pemilu yang lebih bebas dan adil.

Contoh Soal

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer kembali ke sistem presidensial terjadi pada tahun 1959 melalui kebijakan yang dikenal sebagai Dekrit Presiden tanggal.....

Jawaban:

5 Juli 1959

Pembahasan:

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Kebijakan ini menandai berakhirnya sistem parlementer yang dijalankan berdasarkan UUD Sementara 1950 dan mengembalikan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial.



2. Perkembangan Demokrasi Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia segera menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia mencoba menerapkan **sistem kabinet presidensial** sebagai bentuk pemerintahan, di mana Presiden Soekarno memegang peran sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, perjalanan demokrasi di Indonesia pada saat itu diwarnai dengan berbagai perubahan politik yang dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Kabinet Presidensial (17 Agustus 1945-14 November 1945)

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menganut **sistem presidensial** di mana Presiden **Soekarno** berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. **Kabinet presidensial pertama** dibentuk tak lama setelah proklamasi, dengan Soekarno sebagai presiden dan **Mohammad Hatta** sebagai wakil presiden. Kabinet ini terdiri dari beberapa menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden untuk menjalankan roda pemerintahan.

- a. **Presiden Soekarno** menjadi pusat kekuasaan, mengontrol jalannya pemerintahan dan mengambil keputusan penting. Hal ini sesuai dengan sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat.
- b. **Mohammad Hatta** bertindak sebagai wakil presiden dan menjadi tangan kanan Soekarno dalam mengelola pemerintahan.
- c. Dalam kabinet ini, menteri-menteri tidak dipilih melalui pemilu, tetapi ditunjuk langsung oleh presiden. Beberapa tokoh penting dalam kabinet presidensial pertama antara lain **Sutan Sjahrir** dan **Amir Sjarifuddin**.

Namun, sistem ini tidak berjalan lama. Untuk mencegah terjadinya **absolutisme kekuasaan**, pemerintah mengeluarkan beberapa **maklumat** yang bertujuan membangun demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.

Maklumat Menghindari Absolutisme

Maklumat Pemerintah dikeluarkan pada **3 November 1945** oleh **Wakil Presiden Mohammad Hatta**. Tujuan dari maklumat ini adalah untuk membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi rakyat dan menghindari kekuasaan yang bersifat absolut. Maklumat ini memungkinkan pembentukan partai politik sebagai sarana rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

a. Maklumat Pembentukan Partai Politik (3 November 1945)

- Pemerintah mendorong pembentukan **partai-partai politik** yang dapat menjadi wadah partisipasi rakyat. Ini bertujuan untuk menghindari pemerintahan yang terpusat pada satu kekuasaan saja dan memberikan ruang bagi perbedaan pendapat serta kontrol rakyat terhadap pemerintah.
- Hasil dari maklumat ini adalah munculnya partai-partai besar seperti **Partai Nasional Indonesia (PNI)**, **Masyumi**, **Partai Komunis Indonesia (PKI)**, dan **Partai Sosialis Indonesia (PSI)**.

b. Maklumat Pemilu (14 November 1945)

- Pemerintah menyatakan akan mengadakan **pemilu** untuk membentuk badan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme check and balance dalam pemerintahan.
- Maklumat ini juga menandai perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.

Kabinet Sutan Sjahrir (14 November 1945-2 Oktober 1946)

Setelah maklumat pemilu, Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem **parlementer**, di mana perdana menteri menjadi kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya menjadi kepala negara. **Sutan Sjahrir** diangkat sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia pada **14 November 1945**. Kabinet Sjahrir ini menjadi simbol dari upaya pemerintah untuk lebih demokratis, di mana kekuasaan tidak lagi terpusat pada presiden, tetapi terbagi antara legislatif dan eksekutif.

- Sutan Sjahrir dipilih sebagai perdana menteri karena dianggap sebagai tokoh yang dekat dengan kaum intelektual dan mendukung sistem demokrasi yang lebih terbuka.
- Sistem parlementer memungkinkan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, yang berarti bahwa perdana menteri harus mendapat dukungan dari parlemen agar bisa menjalankan pemerintahan.
- Kabinet ini berfokus pada diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, terutama dari negara-negara besar seperti Inggris dan Belanda.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Pada masa agresi militer Belanda, situasi politik Indonesia semakin genting. Ketika Belanda melancarkan **Agresi Militer II** pada **19 Desember 1948** dan menduduki **Yogyakarta**, ibu kota Indonesia saat itu, pemerintahan Indonesia harus bergerak cepat untuk menyelamatkan republik. **Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)** dibentuk di **Bukittinggi**, Sumatra Barat, oleh **Syafruddin Prawiranegara** pada **22 Desember 1948** untuk menjaga kontinuitas pemerintahan saat Soekarno dan Hatta ditahan oleh Belanda.

- Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia tetap ada dan tidak jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda.
- PDRI berhasil menjaga komunikasi dengan para pejuang di berbagai daerah, meskipun kondisi saat itu sangat sulit.
- Setelah Yogyakarta dikembalikan pada 6 Juli 1949, PDRI menyerahkan kembali mandat kepada Soekarno dan Hatta, yang menandai kembalinya pemerintahan pusat ke Yogyakarta.



Monumen PDRI yang berada di Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat – indonesia.go.id

Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada **27 Desember 1949**, Indonesia berubah bentuk menjadi **Republik Indonesia Serikat (RIS)**. RIS merupakan hasil dari **Konferensi Meja Bundar (KMB)**, yang menyepakati Indonesia menjadi negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. **Kabinet RIS** dipimpin oleh **Mohammad Hatta** sebagai Perdana Menteri.

- a. RIS adalah negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Pasundan.
- b. Kabinet RIS di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta berusaha untuk menyatukan negara-negara bagian dalam satu pemerintahan yang stabil.
- c. Sistem federal ini tidak bertahan lama, karena banyak pihak yang merasa RIS adalah upaya Belanda untuk melemahkan persatuan Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Contoh Soal

Untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut pada awal kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan maklumat yang mendorong pembentukan partai-partai politik. Maklumat ini dikeluarkan pada tanggal....

Jawaban:

3 November 1945

Pembahasan:

Pada 3 November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang mendorong pembentukan partai politik. Tujuan utama maklumat ini adalah untuk memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi rakyat dan mencegah kekuasaan yang terpusat hanya pada satu pihak. Maklumat ini juga menjadi langkah awal dalam membangun sistem demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.



3. Perjalanan Indonesia di Era Demokrasi Liberal

Setelah Indonesia kembali menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** pada 17 Agustus 1950, negara ini memasuki periode yang dikenal sebagai **Masa Demokrasi Liberal**. Masa ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, di mana Indonesia menerapkan sistem **parlementer**. Pada masa ini, pemerintahan dipimpin oleh **perdana menteri** yang bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Meskipun masa Demokrasi Liberal menandai perkembangan demokrasi yang lebih terbuka, situasi politik dan ekonomi Indonesia diwarnai dengan pergolakan yang cukup intens. Berikut adalah gambaran kondisi politik dan ekonomi selama masa ini.

Dinamika Politik dan Pengaruh Internasional

a. Dari Negara Federal ke Negara Kesatuan: Kembali ke Akar Persatuan

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada **27 Desember 1949**, Indonesia sempat beralih menjadi **Republik Indonesia Serikat (RIS)**, yang terdiri dari berbagai negara bagian seperti **Negara Indonesia Timur** dan **Negara Pasundan**. Meskipun demikian, sistem federal ini menimbulkan banyak ketidakpuasan, terutama di kalangan partai-partai besar seperti **Partai Nasional Indonesia (PNI)** dan **Masyumi**, yang memandangnya sebagai upaya Belanda untuk memecah belah Indonesia.

- ▷ **Penolakan Partai-Politik:** Sistem federal dianggap sebagai peninggalan kolonial yang membahayakan persatuan nasional. **PNI** dan **Masyumi** menjadi dua kekuatan utama yang menolak bentuk federal ini.
- ▷ **Kembalinya ke Negara Kesatuan:** Akhirnya, melalui sidang parlemen, pada **17 Agustus 1950**, Indonesia kembali menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**, menghapus sistem negara bagian dan memperkuat pemerintahan pusat.
- ▷ **Dampak Kembali ke NKRI:** Kembalinya ke bentuk negara kesatuan menguatkan kontrol pemerintah pusat, meskipun tantangan dalam menciptakan stabilitas politik tetap ada, terutama dengan konflik di berbagai daerah.



Kabinet Republik Indonesia Serikat Pertama – commons.wikimedia.org

b. Pengunduran Diri Muhammad Hatta: Simbol Pergeseran Kekuatan Politik

Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai bapak pendiri dan Wakil Presiden pertama Indonesia, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada **1 Desember 1956**. Pengunduran diri ini diakibatkan oleh ketidakcocokan antara Hatta dengan sistem pemerintahan parlementer yang sedang berlangsung, serta perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Presiden **Soekarno**.

- ▷ **Alasan Pengunduran Diri:** Hatta merasa bahwa sistem parlementer yang memberikan kekuasaan terlalu besar kepada partai politik bertentangan dengan semangat persatuan yang ingin ia wujudkan.
- ▷ **Implikasi Politik:** Setelah Hatta mundur, Soekarno menjadi semakin dominan dalam pemerintahan, menguatkan perannya sebagai pemimpin simbolis nasional.
- ▷ **Dampak Pada Demokrasi:** Pengunduran diri Hatta menandai pergeseran politik yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno, yang kemudian berdampak pada perubahan sistem politik di masa mendatang.

c. Pergantian Kabinet: Dinamika Politik yang Tidak Stabil

Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia mengalami **frekuensi pergantian kabinet** yang sangat tinggi, sebagian besar disebabkan oleh ketidakstabilan koalisi partai-partai politik di parlemen. Sistem parlementer yang mengharuskan kabinet memperoleh dukungan mayoritas sering kali menyebabkan kabinet jatuh ketika terjadi perselisihan di parlemen.

Tabel Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Nama Kabinet	Tahun Pemerintahan
Kabinet Natsir (Masyumi)	6 September 1950 – 21 Maret 1951
Kabinet Sukiman (Masyumi)	27 April 1951 – 3 April 1952
Kabinet Wilopo (PNI)	3 April 1952 – 3 Juni 1953
Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Koalisi PNI dan Nu)	31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi)	12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956
Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Koalisi PNI, Masyumi, dan Nu)	20 Maret 1956 – 4 Maret 1957
Kabinet Djuanda	9 April 1957 – 5 Juli 1959

d. Peristiwa 17 Oktober 1952: Krisis Politik yang Mengguncang Pemerintahan

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Krisis ini terjadi ketika sekelompok perwira militer yang dipimpin oleh **Kolonel AH Nasution** menuntut pembubaran parlemen. Peristiwa ini mencerminkan ketidakpuasan militer terhadap parlemen yang dianggap tidak mendukung kepentingan angkatan bersenjata.

- ▷ **Tuntutan Militer:** Nasution dan beberapa perwira militer menuntut agar **parlemen dibubarkan** karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsi legislatif dengan baik, khususnya dalam menangani masalah militer.
- ▷ **Demonstrasi Militer:** Pada **17 Oktober 1952**, ribuan tentara berkumpul di depan **Istana Merdeka** dan mendesak **Presiden Soekarno** untuk membubarkan parlemen.
- ▷ **Sikap Soekarno:** Soekarno menolak untuk membubarkan parlemen, dan akhirnya krisis ini berhasil diredam tanpa menimbulkan kekerasan. Namun, peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara militer dan parlemen yang terus berlangsung selama masa Demokrasi Liberal.

e. Konferensi Asia Afrika: Peran Indonesia di Panggung Dunia

Pada **18-24 April 1955**, Indonesia menjadi tuan rumah bagi **Konferensi Asia Afrika (KAA)**, yang diadakan di **Bandung**. Konferensi ini dipelopori oleh Indonesia bersama empat negara lainnya, yaitu **India, Pakistan, Burma (Myanmar), dan Sri Lanka**. **Soekarno** memimpin pembukaan konferensi ini, yang

bertujuan untuk mendorong solidaritas antarnegara berkembang dan menentang kolonialisme serta imperialisme.

- ▷ **Peserta KAA:** Sebanyak **29 negara** dari Asia dan Afrika menghadiri konferensi ini, termasuk negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara yang masih berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan.
- ▷ **Tujuan Konferensi:** KAA bertujuan untuk mempererat kerja sama ekonomi dan budaya antarnegara Asia-Afrika, serta mempromosikan **perdamaian dunia**.
- ▷ **Dampak KAA:** Konferensi ini menjadi dasar bagi terbentuknya **Gerakan Non-Blok**, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan global di tengah-tengah Perang Dingin.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

a. Keamanan dan Pertahanan Negara: Ancaman Pemberontakan di Berbagai Daerah

Masalah **keamanan dan pertahanan** menjadi tantangan besar bagi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu ancaman terbesar adalah pemberontakan **Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)** yang dipimpin oleh **Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo**. Pemberontakan ini bermula sejak 1949 dengan tujuan mendirikan **negara Islam** di Indonesia, dan berlangsung hingga awal 1960-an.

- ▷ **Pemberontakan DI/TII:** Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan meluas ke beberapa wilayah lain seperti Sulawesi dan Kalimantan, menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri.
- ▷ **Upaya Penumpasan:** Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menumpas pemberontakan ini, yang memerlukan keterlibatan militer dalam operasi besar-besaran.



Papan iklan yang mempromosikan partai politik untuk pemilihan umum 1955 – commons.wikimedia.org

b. Gerakan Banteng: Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi dalam Sektor Ekspor

Selama masa Demokrasi Liberal, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sektor ekspor. Pada masa itu, ekonomi Indonesia didominasi oleh perusahaan asing, terutama dalam perdagangan dan ekspor komoditas utama seperti karet, kopi, dan minyak bumi. Untuk mengatasi dominasi tersebut, pemerintah meluncurkan **Gerakan Banteng** yang dipimpin oleh **Sjafruddin Prawiranegara**. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat peran **pengusaha pribumi** dalam sektor ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan dan ekspor, agar mereka dapat bersaing dengan perusahaan asing yang sudah mapan.

Gerakan Banteng diluncurkan dengan beberapa tujuan utama yang berfokus pada peningkatan peran pengusaha pribumi. **Sjafruddin Prawiranegara** menginisiasi gerakan ini untuk menumbuhkan kelas pengusaha lokal yang mampu bersaing dengan perusahaan asing. Gerakan ini bertujuan untuk:

- ▷ **Meningkatkan partisipasi pengusaha pribumi** dalam sektor ekonomi, terutama di bidang ekspor, yang selama ini didominasi oleh pengusaha asing dan non-pribumi.
- ▷ **Mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia** pada perusahaan asing, dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pengusaha pribumi untuk terlibat dalam perdagangan internasional.
- ▷ **Membentuk infrastruktur ekonomi yang lebih mandiri**, di mana pengusaha lokal dapat memanfaatkan sumber daya dalam negeri dan mengelola ekspor secara lebih efisien.

Sumitro Djojohadikusumo, seorang **ahli ekonomi Indonesia** dan salah satu tokoh penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi pada masa itu, juga mendukung Gerakan Banteng. Sumitro berpendapat bahwa pengusaha pribumi perlu dilibatkan lebih dalam dalam pembangunan ekonomi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berdaulat dan mandiri. Pemikiran ekonomi Sumitro banyak mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memperkuat sektor domestik.

c. Perusahaan Ali Baba

Sebagai bagian dari Gerakan Banteng, pemerintah memperkenalkan konsep **Perusahaan Ali Baba**. Gagasan ini adalah kebijakan di mana **pengusaha pribumi (Ali)** bekerja sama dengan **pengusaha non-pribumi (Baba)**, khususnya etnis Tionghoa, yang sudah memiliki pengalaman dan sumber daya dalam menjalankan bisnis. Dengan model ini, pengusaha pribumi diharapkan dapat belajar dan mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan bisnis dan perdagangan. Tujuan dari Perusahaan Ali Baba adalah untuk:

- ▷ **Mentor pengusaha pribumi**, di mana pengusaha non-pribumi yang sudah berpengalaman akan menjadi mitra dalam pengembangan bisnis lokal.
- ▷ **Mengurangi dominasi pengusaha non-pribumi** di sektor perdagangan, terutama dalam ekspor komoditas penting seperti karet dan minyak bumi.
- ▷ **Meningkatkan keahlian pengusaha pribumi** dalam menjalankan bisnis, baik dari segi manajemen maupun akses ke pasar internasional.

Namun, kebijakan ini tidak berjalan sesuai harapan. Banyak pengusaha pribumi belum memiliki pengalaman atau keterampilan yang cukup untuk mengelola bisnis besar dan bersaing di pasar internasional. Akibatnya, Perusahaan Ali Baba tidak dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan, dan perusahaan-perusahaan non-pribumi masih mendominasi sektor ekonomi, khususnya ekspor.

d. *Mutual Security Act (MSA)*: Bantuan Ekonomi dan Militer dari Amerika Serikat

Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia juga menerima bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat melalui ***Mutual Security Act (MSA)***. Program ini merupakan bagian dari upaya Amerika Serikat untuk membantu negara-negara non-komunis di tengah ketegangan **Perang Dingin**.

- ▷ **Bantuan Ekonomi**: MSA memberikan bantuan berupa **alat-alat militer** dan dukungan ekonomi kepada Indonesia untuk membantu stabilitas dalam negeri.
- ▷ **Kepentingan Amerika**: Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara non-komunis dan menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.



Fakta Unik di Balik Sejarah

Bantuan Berbentuk Barang, Bukan Dana Tunai

Bantuan dari MSA sebagian besar berupa alat, mesin, dan perlengkapan, bukan dana langsung. Hal ini membatasi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan bantuan sesuai dengan kebutuhan nasional.



Mutual Security Act of 1951 – Wikipedia.com

Contoh Soal

Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), Indonesia mengalami pergantian kabinet yang sangat sering. Apa faktor utama yang menyebabkan hal tersebut?

Jawaban:

Ketidakstabilan koalisi partai-partai dalam sistem pemerintahan parlementer

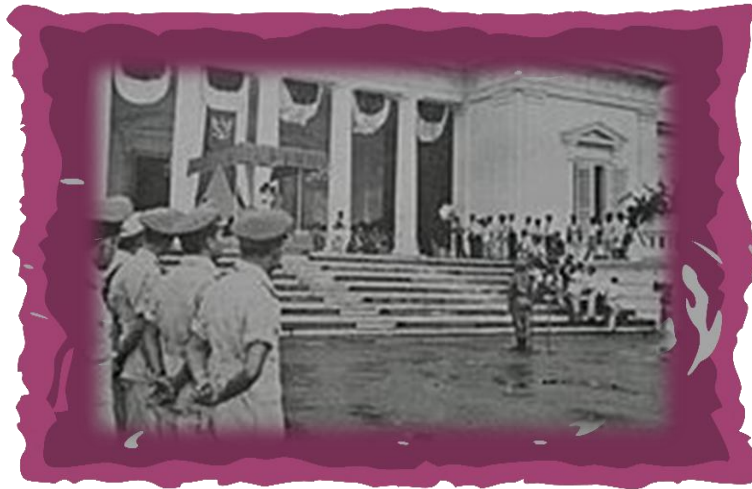
Pembahasan:

Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menganut sistem parlementer, di mana kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang harus mendapat dukungan dari mayoritas di parlemen. Namun, kondisi politik saat itu sangat terfragmentasi karena banyaknya partai politik yang memiliki kepentingan berbeda. Akibatnya, koalisi antarpolisi sering kali rapuh dan tidak bertahan lama, sehingga kabinet mudah dijatuhkan melalui mosi tidak percaya di parlemen. Hal ini menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, hingga Djuanda, yang semuanya memerintah dalam rentang waktu yang relatif singkat.



4. Perjalanan Indonesia di Era Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1959, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem pemerintahan yang dikenal sebagai **Demokrasi Terpimpin**. Sistem ini diterapkan setelah Presiden **Soekarno** mengeluarkan **Dekrit Presiden 5 Juli 1959**, yang membubarkan Konstituante dan kembali ke **Undang-Undang Dasar 1945**. Demokrasi Terpimpin menandai perubahan signifikan dalam struktur politik Indonesia, di mana kekuasaan semakin terpusat di tangan presiden. Masa ini berlangsung hingga tahun 1965 dan diwarnai dengan berbagai perubahan politik dan ekonomi yang drastis.



Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 – commons.wikimedia.org

Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

a. Latar Belakang Penerapan Demokrasi Terpimpin: Tiga Alasan Utama

Presiden Soekarno memberlakukan **Demokrasi Terpimpin** dengan alasan untuk mengatasi berbagai krisis yang dihadapi Indonesia pada masa **Demokrasi Liberal**. Terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi keputusan ini:

- ▷ **Kegagalan Sistem Parlementer:** Pada masa Demokrasi Liberal, sering terjadi pergantian kabinet yang membuat pemerintahan tidak stabil. Kabinet yang sering jatuh menyebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan dengan baik.
- ▷ **Meningkatnya Gerakan Separatis:** Banyak pemberontakan terjadi pada masa Demokrasi Liberal, seperti **DI/TII**, **PRRI**, dan **Permesta**, yang mengancam kesatuan negara. Soekarno merasa perlu memperkuat otoritas pusat untuk menjaga keutuhan Indonesia.
- ▷ **Konflik Ideologi:** Persaingan ideologi antara kelompok **nasionalis**, **agama**, dan **komunis** semakin memperburuk kondisi politik. Soekarno ingin menggabungkan kekuatan ini dalam satu wadah yang disebut **Nasakom** (Nasionalis, Agama, Komunis) demi menjaga stabilitas politik nasional.

b. MPRS dan DPA: Lembaga Penunjang Demokrasi Terpimpin

Setelah pemberlakuan Demokrasi Terpimpin, dibentuk lembaga-lembaga baru yang berfungsi sebagai penopang kekuasaan presiden. **Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)** dan **Dewan Pertimbangan Agung (DPA)** adalah dua lembaga utama yang menjadi bagian dari sistem ini.

- ▷ **MPRS** dibentuk untuk menjalankan fungsi legislatif. MPRS beranggotakan perwakilan dari berbagai organisasi dan golongan masyarakat, dan seluruh anggotanya dipilih langsung oleh presiden. MPRS bertugas menyusun **Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)** yang menjadi panduan bagi pemerintahan dalam menjalankan program pembangunan.
- ▷ **DPA** adalah lembaga yang memberikan nasihat kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan. DPA diisi oleh para ahli dan tokoh penting yang ditunjuk oleh presiden untuk memberikan masukan mengenai kebijakan negara.

c. Pembentukan Komando Operasi Tertinggi (KOTI)

Untuk memperkuat pengawasan dan kendali atas situasi keamanan dalam negeri, Soekarno membentuk **Komando Operasi Tertinggi (KOTI)** pada **19 Desember 1961**. KOTI merupakan lembaga yang berfungsi untuk menangani berbagai operasi militer dan sipil yang dianggap penting untuk mempertahankan stabilitas nasional.

- ▷ **KOTI** dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, dengan tujuan mengendalikan situasi keamanan nasional yang semakin tidak stabil akibat konflik politik dan pemberontakan.
- ▷ **KOTI** diberi wewenang penuh untuk mengkoordinasikan operasi militer dan non-militer, termasuk mengawasi gerakan separatis dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, seperti dalam **Konfrontasi Indonesia-Malaysia**.

d. Nasakom: Fusi Ideologi untuk Persatuan

Salah satu konsep yang dicetuskan oleh Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin adalah **Nasakom**. **Nasakom** adalah singkatan dari **Nasionalisme**, **Agama**, dan **Komunisme**. Konsep ini bertujuan untuk menyatukan tiga kekuatan ideologi utama di Indonesia dalam satu kesatuan politik.

- ▷ **Nasionalisme** diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (**PNI**), **agama** diwakili oleh partai-partai Islam seperti **Masyumi** dan **NU**, dan **komunisme** diwakili oleh **Partai Komunis Indonesia (PKI)**.
- ▷ Melalui Nasakom, Soekarno berharap untuk meredakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi, namun dalam praktiknya, konsep ini justru semakin memperkuat pengaruh PKI dalam pemerintahan.

e. Peristiwa Bandar Betsy dan Peristiwa Jengkol: Konflik Sosial di Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi beberapa konflik sosial yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan. Dua peristiwa penting yang mencuat adalah **Peristiwa Bandar Betsy** dan **Peristiwa Jengkol**.

- ▷ **Peristiwa Bandar Betsy** terjadi pada **16 Maret 1960** di Sumatera Utara, ketika para petani yang dipimpin oleh **PKI** mengambil alih perkebunan milik pemerintah dan swasta. Konflik ini mencerminkan meningkatnya ketegangan sosial antara petani dan pemerintah, serta semakin besarnya peran PKI dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.
- ▷ **Peristiwa Jengkol** terjadi pada tahun **1964** di Jawa Barat, yang juga melibatkan gerakan petani yang dipengaruhi oleh PKI. Konflik ini terkait dengan perebutan lahan dan kebijakan agraria yang dianggap tidak adil oleh petani.



Monumen relief Peristiwa Bandar Betsy – [Suara.com/M.Aribowo]

Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

a. Deklarasi Ekonomi (Dekon): Solusi Krisis Ekonomi

Untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi selama masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno mengeluarkan **Deklarasi Ekonomi (Dekon)** pada **28 Maret 1963**. **Dekon** bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang mandiri dan berfokus pada pembangunan nasional tanpa ketergantungan pada negara-negara Barat.

- **Tujuan Dekon:** Dekon bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara asing, terutama negara-negara kapitalis Barat, serta membangun ekonomi yang berorientasi pada **ekonomi kerakyatan**.
- **Kebijakan Pembangunan:** Dekon memprioritaskan pembangunan sektor pertanian dan industri dalam negeri untuk menciptakan ekonomi yang mandiri. Namun, pelaksanaan Dekon tidak berjalan dengan baik karena terbatasnya sumber daya dan kemampuan manajerial pemerintah.

b. Devaluasi: Upaya Menstabilkan Perekonomian

Krisis ekonomi yang semakin parah memaksa pemerintah melakukan **devaluasi** pada **25 Agustus 1959**. Langkah ini dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus merosot akibat tingginya inflasi. **Devaluasi** adalah kebijakan penurunan nilai mata uang terhadap mata uang asing dengan harapan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi defisit anggaran.

- **Pelaksanaan Devaluasi:** Pemerintah mengumumkan bahwa nilai rupiah akan **dipotong 75%**, sehingga uang kertas senilai Rp1000 hanya bernilai Rp250. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi inflasi yang tinggi.
- **Inflasi yang Tak Terkendali:** Meskipun devaluasi dilakukan, inflasi tetap menjadi masalah besar. Pada tahun 1965, tingkat inflasi mencapai **600%**, yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis.



Fakta Unik di Balik Sejarah



Uang Kertas yang Berlaku Tahun 1959 – Wikipedia.com

Devaluasi 75 Persen yang Mengejutkan

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah memangkas nilai rupiah sebesar 75 persen. Uang kertas senilai Rp1000 hanya dihargai Rp250. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi inflasi dan menstabilkan ekonomi, namun pada kenyataannya, inflasi justru terus melonjak hingga mencapai 600 persen pada tahun 1965.

c. Kabinet Gotong Royong atau Kabinet Kaki Empat

Untuk mengatasi masalah politik dan ekonomi, Soekarno membentuk **Kabinet Gotong Royong** atau sering disebut **Kabinet Kaki Empat** pada **18 Februari 1960**. Kabinet ini beranggotakan wakil dari empat kekuatan utama di Indonesia: **nasionalis, agama, komunis, dan militer**. Masing-masing kelompok diwakili dalam kabinet untuk menciptakan stabilitas politik dengan mengakomodasi berbagai kekuatan besar di Indonesia. Berikut adalah komposisi utama dalam Kabinet Kaki Empat:

- **Nasionalis** – Diwakili oleh **Partai Nasional Indonesia (PNI)**.

- 1) Kelompok ini membawa gagasan kebangsaan yang berakar pada perjuangan kemerdekaan dan cita-cita memajukan Indonesia sebagai negara berdaulat.
 - 2) Tokoh penting dari PNI yang masuk dalam kabinet ini adalah **Ali Sastroamidjojo**, mantan perdana menteri Indonesia.
- ▷ **Agama** – Diwakili oleh partai-partai berbasis agama, seperti **Nahdlatul Ulama (NU)**.
- 1) Kelompok agama diwakili dalam kabinet untuk mengakomodasi suara masyarakat yang religius, khususnya Islam, yang memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan sosial dan politik.
 - 2) Tokoh penting dari kalangan NU yang sering terlibat adalah **KH Idham Chalid**, pemimpin NU yang juga berperan dalam kabinet sebelumnya.
- ▷ **Komunisme** – Diwakili oleh **Partai Komunis Indonesia (PKI)**.
- 1) PKI menjadi bagian penting dari kabinet ini, dengan Soekarno berusaha menggabungkan ideologi komunisme dalam politik Indonesia untuk menciptakan keseimbangan kekuatan.
 - 2) Pemimpin **DN Aidit**, Ketua PKI, adalah tokoh penting yang memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan selama masa Demokrasi Terpimpin.
- ▷ **Militer** – Diwakili oleh angkatan bersenjata Indonesia.
- 1) Kekuatan militer sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri. Militer juga diberi peran besar dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan.
 - 2) Tokoh penting dari militer yang berpengaruh pada masa itu adalah **Jenderal AH Nasution**, yang merupakan tokoh militer senior dan pernah memegang jabatan penting di kabinet sebelumnya.

Kabinet Kaki Empat ini diharapkan oleh Soekarno dapat menjadi representasi dari semua kekuatan besar di Indonesia, sehingga menciptakan stabilitas politik yang kuat di tengah krisis dan ketegangan yang dihadapi negara.

Contoh Soal

Apa dampak dari devaluasi rupiah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1959?

Jawaban:

Penurunan nilai rupiah yang drastis terhadap mata uang asing

Pembahasan:

Devaluasi yang dilakukan pada tahun 1959 menurunkan nilai rupiah sebesar 75%, yang menyebabkan uang kertas senilai Rp1000 hanya bernilai Rp250. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi inflasi, meskipun inflasi tetap menjadi masalah besar hingga akhir masa Demokrasi Terpimpin.



5. Perbedaan Pelaksanaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Pada perjalanan sejarah Indonesia, terjadi perubahan besar dalam sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini. Setelah merdeka, Indonesia mengadopsi **Demokrasi Liberal** yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Namun, pada 1959, Presiden **Soekarno** mengeluarkan **Dekrit Presiden 5 Juli 1959** yang membubarkan Konstituante dan mengakhiri masa Demokrasi Liberal. Sebagai gantinya, Indonesia memasuki era **Demokrasi Terpimpin**, di mana kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan presiden. Perbedaan antara kedua sistem ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk masalah **kedaulatan rakyat**, **pembagian kekuasaan**, dan **pengambilan keputusan**.

Keterkaitannya dengan Masalah Kedaulatan Rakyat

Pada **masa Demokrasi Liberal**, kedaulatan rakyat dijalankan melalui **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**. DPR berfungsi sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, dan memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. DPR berperan sebagai perwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, di mana suara rakyat disalurkan melalui wakil-wakil mereka di parlemen.

Namun, pada **masa Demokrasi Terpimpin**, peran DPR berkurang secara signifikan, dan kedaulatan rakyat digantikan oleh **Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)** dan **Presiden Soekarno** yang memiliki kekuasaan eksekutif sangat besar. **MPRS** dibentuk pada tahun 1960 sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki tugas untuk menetapkan **Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)**, dan seluruh anggota MPRS diangkat oleh presiden, bukan dipilih oleh rakyat.



Pelantikan dan pengambilan sumpah Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia ke-2 oleh Ketua MPRS – Wikimedia.commons

- 1) **Demokrasi Liberal:** Kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh **DPR**. DPR dipilih melalui pemilu dan memiliki kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
- 2) **Demokrasi Terpimpin:** Kedaulatan rakyat dijalankan oleh **MPRS** yang anggotanya dipilih langsung oleh presiden, dan kekuasaan semakin terpusat di tangan **Presiden Soekarno**.

Selain MPRS, Soekarno juga membentuk **Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)** pada tahun 1960, yang anggotanya juga ditunjuk oleh presiden. DPR-GR tidak memiliki kekuasaan seperti DPR pada masa Demokrasi Liberal, melainkan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh presiden dan MPRS.

Keterkaitannya dengan Masalah Pembagian Kekuasaan

Pada masa **Demokrasi Liberal**, kekuasaan terbagi antara **eksekutif** dan **legislatif**, di mana DPR memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam sistem parlementer yang diterapkan, kabinet (eksekutif) bertanggung jawab kepada DPR, dan kabinet dapat jatuh jika kehilangan dukungan parlemen. Pergantian kabinet terjadi secara reguler, seperti pada masa **Kabinet Wilopo** dan **Kabinet Burhanuddin Harahap**. Hal ini menunjukkan adanya sistem check and balance yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Namun, pada **masa Demokrasi Terpimpin**, pembagian kekuasaan berubah drastis. Kekuasaan legislatif dilemahkan, sementara kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden semakin diperkuat. **Presiden Soekarno** memegang kendali penuh atas pemerintahan dan militer. Pada tahun **1963**, jabatan **Presiden Soekarno** ditetapkan **seumur hidup** oleh **MPRS** sebagai bentuk legitimasi terhadap kekuasaan absolut yang ia pegang. Ini berarti Soekarno tidak lagi tunduk pada mekanisme demokratis seperti pemilu atau pengawasan parlemen.

- a. **Demokrasi Liberal:** Kekuasaan terbagi antara **eksekutif** dan **legislatif**, di mana DPR memiliki kontrol terhadap kabinet dan pemerintahan.
- b. **Demokrasi Terpimpin:** Kekuasaan terkonsentrasi di tangan **presiden**, yang pada akhirnya dijadikan presiden seumur hidup oleh MPRS, menghilangkan konsep check and balance yang kuat.

Keterkaitannya dengan Masalah Pengambilan Keputusan

Pada masa **Demokrasi Liberal**, pengambilan keputusan politik dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan **DPR**. DPR menjadi forum utama di mana berbagai partai politik saling berdebat dan mengajukan usulan kebijakan. Keputusan politik dibuat melalui proses pemungutan suara yang mencerminkan perbedaan pandangan antara partai-partai politik. Sistem ini memungkinkan adanya diskusi dan persaingan ideologi yang lebih terbuka dalam menentukan arah kebijakan negara.

Sebaliknya, pada masa **Demokrasi Terpimpin**, pengambilan keputusan dilakukan secara **terpusat** melalui **MPRS** dan **DPR Gotong Royong (DPR-GR)**. Namun, berbeda dengan DPR pada masa Demokrasi Liberal, **MPRS** dan **DPR-GR** tidak berfungsi sebagai lembaga yang independen. Semua keputusan harus mengikuti arahan presiden, dan suara bulat menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Tidak ada perdebatan atau perlawanan dari parlemen, karena keputusan yang diambil sudah ditentukan oleh **Presiden Soekarno** dan lembaga-lembaga yang berada di bawah kendalinya.

- a. **Demokrasi Liberal:** Keputusan diambil melalui proses **musyawarah di DPR**, dengan adanya perdebatan antara berbagai partai politik dan mekanisme pemungutan suara.
- b. **Demokrasi Terpimpin:** Keputusan politik diambil oleh **MPRS** dan **DPR-GR** dengan prinsip **suara bulat**, yang menghapus perdebatan terbuka, dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh presiden.

Contoh Soal

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan pada masa Demokrasi Liberal dibandingkan dengan masa Demokrasi Terpimpin?

Jawaban:

Pada Demokrasi Liberal, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah di DPR dengan perdebatan terbuka, sedangkan pada Demokrasi Terpimpin keputusan diambil dengan prinsip suara bulat oleh MPRS dan DPR Gotong Royong.

Pembahasan:

Pada masa Demokrasi Liberal, keputusan politik diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan perdebatan terbuka antara berbagai partai politik di DPR. Sebaliknya, pada Demokrasi Terpimpin, pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip suara bulat yang menghilangkan perdebatan terbuka, dan semua keputusan harus mengikuti arahan presiden.

Kegiatan Kelompok 1

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan memahami perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta melatih kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan menghargai perbedaan pandangan politik.

1. Bentuklah dua kelompok besar, masing-masing mewakili:
 - ▷ Kelompok pendukung Demokrasi Liberal.
 - ▷ Kelompok pendukung Demokrasi Terpimpin.
2. Siapkan argumen terkait:
 - ▷ Sistem pemerintahan.
 - ▷ Stabilitas politik.
 - ▷ Dampak sosial-ekonomi.
 - ▷ Posisi Indonesia di dunia internasional.
3. Lakukan debat mini secara bergiliran, pastikan setiap anggota kelompok menyampaikan argumennya masing-masing
4. Setelah debat, tuliskan kesimpulan bersama:
 - ▷ Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing era?
 - ▷ Apa pelajaran yang dapat diambil untuk masa depan demokrasi Indonesia?



6. Langkah Strategis Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia dari Ancaman Disintegrasi

Setelah proklamasi kemerdekaan pada **17 Agustus 1945**, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah ancaman disintegrasi bangsa. Baik pada masa **Revolusi Fisik (1945-1950)**, **Demokrasi Liberal (1950-1959)**, maupun **Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**, Indonesia harus menghadapi sejumlah pemberontakan dan gerakan separatis yang berusaha memecah belah kesatuan negara. Pemerintah Indonesia, dengan berbagai strategi, baik diplomasi maupun operasi militer, berusaha keras menjaga integritas dan keutuhan NKRI.

Masa Revolusi Fisik (1945-1950)

Pada periode ini, Indonesia baru saja merdeka dan menghadapi berbagai ancaman dari dalam negeri yang berusaha menggoyahkan persatuan negara.

a. Pemberontakan PKI Madiun (1948)



Sekelompok pria yang diborgol saat ditahan TNI, Madiun, September 1948 – Wikimedia.commons

Pada **18 September 1948**, **Partai Komunis Indonesia (PKI)** yang dipimpin oleh **Musso** memproklamkan berdirinya **Republik Soviet Indonesia** di **Madiun, Jawa Timur**. Musso dan pengikutnya berusaha menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah dan menggantinya dengan negara komunis. Pemberontakan ini diwarnai dengan pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan tokoh-tokoh yang dianggap anti-komunis.

- ▷ **Latar Belakang:** Musso kembali dari Uni Soviet dengan tujuan menyebarkan ideologi komunis dan mendirikan negara komunis di Indonesia.
- ▷ **Penumpasan:** Pemerintah yang dipimpin oleh **Mohammad Hatta** segera bertindak. Dengan bantuan **Divisi Siliwangi**, pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpas pemberontakan. Pada akhir bulan September 1948, pemberontakan berhasil dipadamkan, dan Musso tewas dalam pertempuran.

b. Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia)

Pemberontakan **DI/TII** dipimpin oleh **Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo** yang mendirikan **Negara Islam Indonesia (NII)** pada **7 Agustus 1949** di **Tasikmalaya, Jawa Barat**. Kartosuwiryo menolak pemerintahan Republik Indonesia yang sekuler dan ingin mendirikan negara Islam.

- ▷ **Latar Belakang:** Kartosuwiryo, seorang mantan tokoh Sarekat Islam dan sahabat dekat Soekarno, kecewa dengan Republik Indonesia yang dianggapnya terlalu sekuler dan dipengaruhi oleh Belanda.
- ▷ **Penumpasan:** Pemerintah melancarkan berbagai operasi militer, seperti **Operasi Pagar Betis** pada 1962, untuk mengepung dan menangkap Kartosuwiryo. Akhirnya, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dieksekusi pada **16 Agustus 1962**.

c. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara kolonial Belanda, memimpin pemberontakan **Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)** pada **23 Januari 1950** di **Bandung, Jawa Barat**. Westerling menolak kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan dan ingin mempertahankan Negara Pasundan sebagai bagian dari **Republik Indonesia Serikat (RIS)**.

- ▷ **Tujuan Westerling:** Membentuk kerajaan Ratu Adil yang otonom di bawah kendalinya.
- ▷ **Penumpasan:** Pemberontakan ini berhasil dipadamkan dalam waktu singkat oleh pemerintah Republik Indonesia, dan Westerling melarikan diri ke luar negeri.

d. Gerakan Andi Azis di Sulawesi Selatan

Pada **April 1950**, **Andi Azis**, seorang pahlawan KNIL (tentara kolonial Belanda), memimpin pemberontakan di **Makassar** dengan tujuan mempertahankan **Negara Indonesia Timur (NIT)** sebagai bagian dari RIS. Dia menolak integrasi NIT ke dalam NKRI.

- ▷ **Penumpasan:** Pemerintah mengirimkan pasukan militer dari Jawa untuk memadamkan pemberontakan ini, dan Andi Azis akhirnya menyerah pada **21 April 1950** setelah didesak oleh **Letnan Kolonel Suharto**.

e. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pada **25 April 1950**, **Soumokil**, mantan jaksa Negara Indonesia Timur, memproklamasikan berdirinya **Republik Maluku Selatan (RMS)**. RMS didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap integrasi Maluku ke dalam NKRI.

- ▷ **Penumpasan:** Pemerintah mengirimkan **Operasi Merdeka** untuk menumpas RMS. Pada November 1950, pasukan TNI berhasil merebut Ambon, meskipun pemberontakan RMS masih terus berlanjut di bawah tanah hingga Soumokil ditangkap pada 1963.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pada periode **Demokrasi Liberal**, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah regional yang memicu gerakan separatisme di daerah-daerah. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat yang dianggap kurang adil.

a. Terbentuknya Dewan-dewan Daerah

Selama masa Demokrasi Liberal, beberapa daerah membentuk **dewan-dewan daerah** yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih independen dari pemerintah pusat. Dewan ini pada akhirnya berperan dalam mendukung pemberontakan separatistis. **Dewan Banteng** di Sumatera Barat, **Dewan Gajah** di Sumatera Utara, dan **Dewan Garuda** di Sumatera Selatan adalah contoh dewan-dewan daerah yang merasa tidak puas dengan kebijakan pusat.

Tabel Dewan-Dewan Daerah yang Terbentuk di Sumatera

No.	Nama Dewan Daerah	Provinsi	Tanggal Pembentukan	Pemimpin
1	Dewan Banteng	Sumatra Tengah	20 Desember 1956	Letkol Ahmad Husein
2	Dewan Gajah	Sumatra Utara	22 Desember 1956	Kol. Maludin Simbolon
3	Dewan Garuda	Sumatra Selatan	24 Desember 1956	Letkol Barlian

b. Pemberontakan PRRI/Permesta (1957-1961)

Ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah pusat mencapai puncaknya dalam bentuk **Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)** yang diproklamasikan pada **15 Februari 1958** di Sumatera. **Dewan Banteng** di bawah pimpinan **Ahmad Husein** memainkan peran penting dalam pemberontakan ini. Di Sulawesi, gerakan serupa dikenal sebagai **Permesta** (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) dipimpin oleh **Ventje Sumual**.

- ▷ **Latar Belakang:** Pemberontakan ini disebabkan oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan ekonomi yang terlalu memusat di Jawa serta dugaan korupsi di pemerintah pusat.
- ▷ **Penumpasan:** Pemerintah melancarkan **Operasi 17 Agustus** dan **Operasi Sadar** untuk menumpas pemberontakan ini. PRRI dan Permesta akhirnya berhasil dipadamkan pada **1961**, setelah operasi militer besar-besaran oleh TNI.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa **Demokrasi Terpimpin**, ancaman disintegrasi datang dalam bentuk perpecahan ideologis yang tajam, terutama dengan bangkitnya pengaruh **Partai Komunis Indonesia (PKI)** dan puncaknya dalam **Gerakan 30 September (G30S/PKI)**.

a. Pemberontakan G30S/PKI (1965)

Pada malam **30 September 1965**, sekelompok perwira militer yang diduga disusupi oleh **PKI** melancarkan pemberontakan dengan menculik dan membunuh tujuh jenderal Angkatan Darat dalam upaya menggulingkan pemerintahan dan mendirikan negara komunis. Peristiwa ini dikenal sebagai **G30S/PKI**.

- ▷ **Latar Belakang:** PKI, yang dipimpin oleh **DN Aidit**, berusaha memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan. Dengan dukungan dari sebagian militer, mereka mencoba menghapus kepemimpinan Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang.
- ▷ **Jalannya Pemberontakan:** Pada dini hari tanggal **1 Oktober 1965**, kelompok G30S menculik dan membunuh para jenderal, termasuk **Jenderal Ahmad Yani**. **Mayjen Soeharto**, yang saat itu memimpin Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), segera mengambil alih situasi dan memimpin operasi untuk menumpas pemberontakan tersebut.
- ▷ **Operasi Penumpasan:** Melalui **Operasi Penumpasan**, Mayjen Soeharto mengendalikan situasi dengan cepat dan menguasai Jakarta. Pada **3 Oktober 1965**, Soeharto memerintahkan pengejaran dan penangkapan para pimpinan PKI, termasuk DN Aidit, yang akhirnya dieksekusi.

b. Upaya Penumpasan oleh Pemerintah

Pemberontakan ini dengan cepat berhasil ditumpas. **Mayjen Soeharto** memimpin **Operasi Merdeka** untuk menumpas sisa-sisa kekuatan PKI di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ribuan simpatisan PKI ditangkap atau dieksekusi, dan PKI dilarang di Indonesia. Soekarno kemudian kehilangan kekuasaannya dan digantikan oleh **Soeharto** pada tahun **1967**.

Contoh Soal

Apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta pada masa Demokrasi Liberal?

Jawaban:

Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi yang terlalu memusat di Jawa.

Pembahasan:

Pemberontakan PRRI/Permesta dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu memusat di Jawa dan kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil. Pemberontakan ini diproklamkan pada 15 Februari 1958 di Sumatera dan Sulawesi dengan tujuan untuk memperjuangkan pemerintahan yang lebih otonom di daerah-daerah tersebut. Pemerintah Indonesia merespons dengan operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini, yang akhirnya berhasil dipadamkan pada 1961.

Kegiatan Kelompok 2

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan menganalisis bagaimana dinamika politik dalam dua era demokrasi memengaruhi kehidupan rakyat, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan solutif dalam merumuskan langkah menjaga keutuhan bangsa.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang.
2. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut:
 - ▷ Bagaimana kondisi ekonomi rakyat pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin?
 - ▷ Bagaimana ketegangan politik dan pergantian pemerintahan memengaruhi kesejahteraan masyarakat?
 - ▷ Apa potensi ancaman disintegrasi bangsa yang muncul akibat konflik politik saat itu?
 - ▷ Menurut kalian, langkah apa yang paling tepat untuk mencegah perpecahan bangsa di tengah situasi politik yang tidak stabil?
3. Tuliskan hasil analisis kelompok kalian secara sistematis.

Rangkuman

Materi ini mencakup perjalanan panjang Indonesia dalam mengembangkan sistem pemerintahan dan demokrasi sejak kemerdekaan hingga periode reformasi. Setiap fase demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, baik pada masa Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin, serta upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Setiap era menandai perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan yang sangat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan Demokrasi Presidensial dengan UUD 1945 sebagai konstitusi. Presiden Soekarno memegang peran sentral sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, untuk menghindari absolutisme, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pembentukan Partai Politik pada 1945 yang memungkinkan terbentuknya partai politik sebagai sarana kontrol rakyat terhadap pemerintah. Seiring dengan perkembangan, Indonesia beralih ke sistem parlementer pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Pada masa ini, demokrasi berkembang dengan diadakannya pemilu 1955 dan terbentuknya kabinet-kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Namun, periode ini juga ditandai dengan ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang sering terjadi.

Setelah masa Demokrasi Liberal, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang dimulai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada era ini, kekuasaan presiden semakin besar, sementara peran parlemen dan partai politik berkurang. MPRS dan DPR Gotong Royong dibentuk sebagai lembaga yang mendukung kebijakan presiden. Konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) diperkenalkan oleh Soekarno sebagai upaya untuk mempersatukan tiga ideologi besar di Indonesia. Meskipun demikian, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin kuat pada masa ini, yang berujung pada Peristiwa G30S/PKI pada 1965, sebuah kudeta yang gagal oleh PKI yang berusaha menggulingkan pemerintah dan menggantikan ideologi negara dengan komunisme.

Selain menghadapi tantangan politik, Indonesia juga berhadapan dengan ancaman disintegrasi bangsa sejak awal kemerdekaan. Pada masa Revolusi Fisik (1945-1950), Indonesia harus menghadapi berbagai pemberontakan seperti Pemberontakan PKI Madiun (1948) dan Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Gerakan-gerakan separatis ini mengancam persatuan Indonesia, namun berhasil ditumpas melalui operasi militer yang terkoordinasi dengan baik. Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), ancaman disintegrasi juga muncul dalam bentuk pembentukan Dewan-dewan Daerah yang memproklamasikan pemberontakan PRRI/Permesta sebagai bentuk ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), tantangan disintegrasi bangsa semakin kompleks dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemerintah Indonesia di bawah komando Mayjen Soeharto melakukan operasi penumpasan terhadap PKI dan simpatisannya. Peristiwa ini berakhir dengan pelarangan PKI dan pengalihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, menandai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan awal dari Orde Baru.

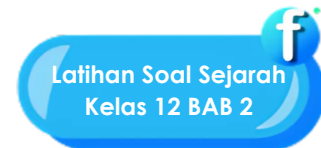
Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bagaimana bangsa ini terus beradaptasi dengan berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Dari Demokrasi Liberal yang memberi ruang bagi pluralisme politik hingga Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden, setiap periode memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dan sosial Indonesia. Upaya pemerintah dalam menjaga persatuan dan mengatasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Latihan Soal

1. Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959), sistem pemerintahan yang diterapkan adalah...
 - A. Demokrasi Presidensial
 - B. Sistem Parlementer
 - C. Demokrasi Terpimpin
 - D. Monarki Konstitusional
 - E. Demokrasi Sosial
2. Apa yang menjadi tantangan utama selama masa Demokrasi Liberal di Indonesia?
 - A. Ketidakstabilan politik akibat pergantian kabinet yang sering
 - B. Pemberontakan PKI Madiun
 - C. Ketegangan antara nasionalis, agama, dan komunis
 - D. Pemberontakan Republik Maluku Selatan
 - E. Perpecahan ideologi antara Pancasila dan komunisme
3. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin yang dimulai pada 1959, apa yang terjadi dengan peran parlemen dan partai politik?
 - A. Parlemen menjadi lebih kuat dalam mengambil keputusan
 - B. Peran parlemen dan partai politik berkurang, dan kekuasaan presiden semakin besar
 - C. Parlemen dibubarkan dan digantikan oleh DPR Gotong Royong
 - D. Presiden Soekarno tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar
 - E. Partai politik diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan programnya
4. Jika kamu adalah seorang ahli politik pada masa Demokrasi Terpimpin, apa yang menurut kamu akan menjadi dampak jangka panjang dari penerapan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) dalam mengelola konflik ideologi di Indonesia?
 - A. Menyatukan berbagai ideologi yang bertentangan dan mengurangi ketegangan
 - B. Meningkatkan dominasi ideologi komunis dalam pemerintahan
 - C. Memperburuk ketegangan politik antara nasionalis, agama, dan komunis
 - D. Memperkuat posisi militer dalam politik Indonesia
 - E. Menghapuskan peran partai politik dalam kehidupan demokrasi
5. Pada masa Revolusi Fisik (1945-1950), pemberontakan yang terjadi di Madiun pada 1948 dipimpin oleh...
 - A. Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo
 - B. Musso
 - C. Raymond Westerling
 - D. Andi Aziz
 - E. Soumokil

6. Bagaimana kamu menilai efektivitas operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta pada masa Demokrasi Liberal dalam menjaga keutuhan negara?
- A. Operasi militer tersebut sangat efektif dan dapat menyatukan semua daerah yang terlibat pemberontakan
 - B. Operasi militer hanya berhasil di daerah-daerah tertentu dan memperburuk ketidakpercayaan daerah terhadap pemerintah pusat
 - C. Operasi militer tidak efektif karena kurangnya dukungan dari masyarakat lokal
 - D. Operasi militer mempercepat proses pembentukan negara kesatuan yang lebih kuat
 - E. Operasi militer hanya menambah ketegangan sosial antara pusat dan daerah
7. Pada tahun 1965, peristiwa besar yang melibatkan PKI dan militer Indonesia adalah:
- A. Pemberontakan DI/TII
 - B. Pemberontakan PRRI
 - C. Peristiwa 30 September (G30S/PKI)
 - D. Pembentukan MPRS
 - E. Pembentukan Dewan-dewan Daerah

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Anderson, B. R. (1972). *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Cornell University Press.

Elson, R. E. (2009). *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge University Press.

Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. .

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (4th ed.)*.

Soemarno, H. (2003). *Politik Ekonomi Indonesia Masa Orde Lama: Sebuah Kajian dari Perspektif Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar.

Suwarto, H. (1999). *Perjalanan Sejarah Indonesia: Dari Masa Demokrasi Liberal Hingga Demokrasi Terpimpin*. PT Gramedia Pustaka Utama.



BAB 3

MENGGALI DINAMIKA INDONESIA DI ERA ORDE BARU

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Mandiri

Mengembangkan sikap hormat terhadap sejarah bangsa dan menghargai perjuangan para pemimpin dan rakyat Indonesia.

▷ Bernalar Kritis

Menganalisis dan menilai secara kritis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru, serta membedakan dampak positif dan negatif dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan sosial.

Kata Kunci: Orde Baru, Krisis Politik, Militer, Stabilisasi Politik, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur.

Tujuan Pembelajaran: Memahami Sejarah dan Dampak Pemerintahan Orde Baru di Indonesia

1. Menjelaskan Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

- ▷ Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa kunci yang memicu lahirnya Orde Baru, termasuk krisis politik yang dihadapi negara.
- ▷ Menggambarkan peran militer dan tokoh-tokoh utama dalam peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto.

2. Mengidentifikasi Kondisi Politik, Ekonomi, dan Sosial Masa Orde Baru

- ▷ Menganalisis sistem politik di bawah pemerintahan Soeharto, termasuk peran militer dan Golkar dalam penguasaan politik.
- ▷ Menggambarkan perkembangan ekonomi yang terjadi di masa Orde Baru.

- ▷ Menjelaskan dampak kebijakan sosial pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk kebijakan kependudukan dan pembangunan infrastruktur.

3. Mengidentifikasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

- ▷ Menguraikan kebijakan ekonomi Orde Baru.
- ▷ Mengidentifikasi kebijakan politik, seperti kontrol terhadap media dan pembatasan kebebasan berpendapat.
- ▷ Menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Orde Baru yang berfokus pada kestabilan regional dan hubungan dengan negara-negara Barat.

4. Menganalisis Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru

- ▷ Menggambarkan berbagai keberhasilan yang dicapai Orde Baru dalam stabilisasi politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur.
- ▷ Menelusuri dampak positif kebijakan pemerintahan Orde Baru.
- ▷ Menilai bagaimana keberhasilan Orde Baru dalam mempertahankan stabilitas nasional dan menjaga hubungan internasional.

5. Menganalisis Sebab-Sebab Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru

- ▷ Mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi.
- ▷ Menganalisis gerakan reformasi dan tuntutan perubahan dari masyarakat yang mengarah pada lengsernya Soeharto pada tahun 1998.
- ▷ Meneliti peran media, mahasiswa, dan organisasi masyarakat dalam mendorong jatuhnya Orde Baru dan transisi menuju era reformasi.



1. Latar Belakang Lahirnya Pemerintahan Orde Baru

Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia berada di ambang krisis besar. Negara ini yang baru dua dekade lepas dari penjajahan, kini kembali terjebak dalam situasi penuh gejolak. Di bawah pemerintahan **Presiden Soekarno**, Indonesia menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari konflik politik hingga keruntuhan ekonomi. Keadaan semakin tak terkendali pasca **Peristiwa Gerakan 30 September 1965** atau yang dikenal sebagai G30S/PKI, sebuah pemberontakan yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat dan mengguncang stabilitas nasional.

Rakyat mulai merasa resah. Situasi ini tidak hanya memicu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno, tetapi juga melahirkan berbagai aksi protes dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari kaum muda, mahasiswa, dan kelompok militer yang merasa bahwa tindakan pemerintah sudah melenceng dari arah perjuangan kemerdekaan. Di tengah gejolak tersebut, lahirlah era **Orde Baru**, sebuah rezim yang dipimpin oleh **Mayor Jenderal Soeharto**, yang mengklaim akan mengembalikan tatanan nasional dan menegakkan **Pancasila** sebagai ideologi negara.

Sebelum kita masuk ke peristiwa-peristiwa penting yang mengantarkan lahirnya Orde Baru, mari kita lihat bagaimana situasi di Indonesia berkembang hingga pada akhirnya Soekarno menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Soeharto.

Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

Pada awal tahun 1966, mahasiswa dan kelompok pemuda Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti **KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia)** dan **KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia)**, mulai melakukan aksi-aksi protes besar-besaran. Mereka merasa bahwa pemerintahan Soekarno telah gagal menegakkan stabilitas negara. Krisis ekonomi yang parah ditandai dengan inflasi mencapai lebih dari 600% serta ketidakmampuan Soekarno mengendalikan konflik politik setelah G30S/PKI membuat situasi semakin memburuk.



Aksi Tritura 1966 – mediaindonesia.com

Pada tanggal **12 Januari 1966**, KAMI bersama dengan elemen-elemen pemuda dan mahasiswa mengajukan **Tri Tuntutan Rakyat** atau **Tritura** kepada pemerintah. Isi dari Tritura ini adalah:

- Pembubaran PKI** beserta organisasi-organisasi massanya.
- Pembersihan kabinet** dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30S.
- Penurunan harga** barang-barang kebutuhan pokok yang melonjak tinggi.

Tuntutan ini disampaikan melalui aksi-aksi massa di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Aksi-aksi ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. **KAMI** dan **Front Pancasila** yang dibentuk sebagai aliansi dari berbagai kelompok anti-komunis, menjadi motor penggerak utama dari gerakan ini. Mereka bahkan mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh militer yang memiliki kekhawatiran serupa, termasuk **Mayor Jenderal Soeharto** yang mulai menonjol sebagai sosok pemimpin militer saat itu.

Pada saat itu, situasi semakin tegang ketika demonstrasi-demonstrasi ini dihadapi dengan keras oleh pemerintah. Tembakan peringatan, gas air mata, hingga penahanan mahasiswa menjadi pemandangan sehari-hari di jalanan Jakarta. Namun, gerakan massa ini tidak surut, dan dukungan publik terus mengalir.

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Puncak dari krisis politik terjadi pada **11 Maret 1966**, ketika **Surat Perintah Sebelas Maret** atau **Supersemar** ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Pada hari itu, Soekarno tengah memimpin sidang kabinet di Istana Negara ketika sekelompok tentara yang dipimpin oleh Mayor Jenderal **Sabur** melaporkan bahwa ada pasukan tak dikenal yang mengepung istana. Merasa terancam dan tidak aman, Soekarno kemudian memutuskan untuk memberikan **mandat kepada Soeharto** untuk "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu" guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara.

Supersemar menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Melalui surat ini, **Soeharto** memperoleh kekuasaan *de facto* untuk mengendalikan pemerintahan, meskipun secara formal Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Setelah mendapatkan Supersemar, langkah pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan **PKI** pada tanggal **12 Maret 1966**, sesuai dengan tuntutan Tritura.

Tidak hanya itu, Soeharto juga mulai membersihkan pemerintahan dari pejabat-pejabat yang dianggap pro-komunis atau loyalis Soekarno. Dengan kekuasaan yang diperolehnya melalui Supersemar, Soeharto perlahan-lahan menggeser posisi Soekarno di panggung politik Indonesia. Keputusan penting lainnya adalah pembentukan kabinet baru tanpa unsur-unsur PKI, serta upaya stabilisasi ekonomi dengan bantuan dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional.

Pada tanggal **13 Maret 1966**, hanya dua hari setelah Supersemar ditandatangani, Mayor Jenderal Soeharto mengeluarkan kebijakan besar berdasarkan **Surat Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966**. Isi dari SK tersebut adalah:

- a. **Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)** beserta organisasi-organisasi afiliasinya.
- b. **Pelaksanaan pembersihan** di semua aspek pemerintahan, militer, dan kehidupan politik dari unsur-unsur yang terlibat atau mendukung PKI.
- c. **Pengamanan terhadap sisa-sisa gerakan kontra-revolusi** yang mengancam stabilitas negara.

SK ini menjadi pijakan hukum yang digunakan oleh Soeharto untuk menindak lebih lanjut para simpatisan PKI, serta membersihkan pemerintahan dari pejabat-pejabat yang dianggap loyal kepada Soekarno dan PKI. Dalam waktu singkat, ribuan orang yang dituduh terlibat dalam gerakan komunis ditangkap atau diberhentikan dari jabatannya. Dengan dasar hukum yang kuat dari SK tersebut, Soeharto berhasil memperoleh kendali penuh atas pemerintah dan militer, meskipun secara konstitusional Soekarno masih menjabat sebagai presiden.



Fakta Unik di Balik Sejarah

Dualisme Kekuasaan: Presiden Ada Dua, Kekuasaan Ada Satu

Antara 1966 dan 1967, Indonesia mengalami situasi unik di mana Soekarno masih menjabat sebagai presiden secara resmi, tetapi kendali pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Soeharto. Ini menciptakan ketegangan politik yang akhirnya berakhir dengan pencabutan mandat Soekarno oleh MPRS.



Pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI ke-2 – Wikimedia.commons

Dualisme Kepemimpinan dan Akhir Pemerintahan Sukarno

Pada tahun 1966 hingga 1967, Indonesia berada dalam situasi kepemimpinan ganda atau **dualisme kepemimpinan**. Di satu sisi, **Soekarno** masih menjadi presiden secara konstitusional, namun di sisi lain, **Soeharto** yang memiliki kekuatan militer dan kontrol politik secara efektif memegang kendali pemerintahan. Ketegangan antara keduanya semakin memuncak ketika **Sidang Umum MPRS** pada **Maret 1967** secara resmi mencabut mandat Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai **Pejabat Presiden**.

Keputusan MPRS ini didasarkan pada laporan **Nawaksara** yang disampaikan Soekarno, di mana Soekarno dianggap tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan terkait perannya dalam peristiwa G30S/PKI. Meskipun Soekarno berusaha mempertahankan posisinya dengan merujuk pada jasa-jasanya dalam memimpin revolusi kemerdekaan, dukungan politik terhadapnya telah hilang. Militer, yang kini berada di bawah kendali Soeharto, memainkan peran utama dalam memastikan Soekarno kehilangan pengaruh politiknya.

Akhirnya, pada **12 Maret 1967**, Soekarno secara resmi dilengserkan dari jabatannya dan Soeharto ditunjuk sebagai presiden sementara. Dengan demikian, berakhirilah era **Orde Lama** yang dipimpin oleh Soekarno, dan dimulailah **Orde Baru** di bawah kepemimpinan Soeharto, yang membawa janji-janji tentang stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Contoh Soal

Bagaimana dampak jangka panjang dari adanya dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto pada tahun 1966-1967 terhadap stabilitas politik Indonesia?

Jawaban:

Mengarah pada ketegangan politik yang memuncak, sehingga berakhir dengan pengalihan kekuasaan

Pembahasan:

Pada tahun 1966-1967, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan, di mana Soekarno masih menjabat sebagai presiden secara konstitusional, namun Soeharto mengendalikan pemerintahan secara efektif. Ketegangan politik meningkat akibat ketidaksepakatan dan persaingan antara keduanya. Soekarno, meskipun masih menjadi presiden, tidak dapat lagi mempertahankan pengaruh politiknya karena kehilangan dukungan, terutama dari militer yang sekarang berada di bawah kendali Soeharto.

Pada akhirnya, ketegangan ini memuncak ketika Sidang Umum MPRS pada 1967 mencabut mandat Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Dengan pengalihan kekuasaan ini, Indonesia memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, yang menjanjikan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Dualisme kepemimpinan ini memberikan dampak jangka panjang berupa transisi politik yang berujung pada dominasi militer dan pemerintahan yang lebih otoriter.



2. Penataan Kehidupan Politik Indonesia Masa Orde Baru

Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1967, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah politiknya. Saat itu, negara sedang mencari arah baru setelah ketidakstabilan di era sebelumnya. Soeharto berusaha menata kehidupan politik yang lebih terkendali dan stabil, agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Dengan kekuasaan yang semakin terpusat, ia mengubah banyak aspek pemerintahan.

Langkah-langkah Soeharto bukan hanya tentang mengamankan kekuasaannya, tapi juga menciptakan sistem politik yang dirancang agar lebih mudah dikendalikan. Perubahan besar ini membawa dampak yang luas, baik dalam politik maupun kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Pada masa ini, **MPR** ditetapkan sebagai lembaga tertinggi, sementara **DPR** diberi tugas dalam pengawasan keputusan-keputusan MPR. Ada beberapa Hak DPR yang bergerak dalam bidang legislatif maupun bidang pengawasan. Berikut sejumlah hak-haknya:

a. Dalam Bidang Legislatif

▷ Hak Inisiatif

Hak inisiatif adalah hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) secara mandiri, tanpa harus menunggu usulan dari pemerintah. DPR dapat menyusun dan merancang undang-undang yang dianggap perlu bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam praktiknya, hak ini memungkinkan anggota DPR untuk berperan aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun di masa Orde Baru, hak inisiatif sering kali dibatasi oleh kendali eksekutif yang kuat di bawah Soeharto.

▷ Hak Amendemen

Hak amendemen adalah hak DPR untuk mengusulkan perubahan atau perbaikan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah atau oleh DPR sendiri. Dalam proses pembahasan undang-undang, anggota DPR dapat mengajukan perubahan pasal, menambah, atau menghapus bagian-bagian tertentu dari rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan sejalan dengan kepentingan nasional.

▷ Hak Budget

Hak budget atau hak anggaran adalah hak DPR untuk menyetujui, menolak, atau mengubah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah. Setiap tahun, pemerintah mengajukan rancangan anggaran kepada DPR untuk dibahas dan disahkan. Dalam pembahasan ini, DPR memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran negara dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.

b. Dalam Bidang Pengawasan

▷ Hak Bertanya



Edisi cetak UUD 1945 –
[Wikimedia.commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UUD_1945.jpg)

Hak bertanya memberikan wewenang kepada anggota DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, pelaksanaan undang-undang, dan hal-hal lain yang terkait dengan pemerintahan. Pertanyaan ini bisa diajukan secara lisan maupun tertulis, dan pemerintah wajib memberikan jawaban yang jelas dan memadai. Hak bertanya merupakan salah satu cara bagi DPR untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah secara langsung.

▷ **Hak Interpelasi**

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu yang dianggap penting dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat atau jalannya pemerintahan. Interpelasi biasanya dilakukan ketika DPR merasa ada kebijakan yang kontroversial atau memerlukan penjelasan lebih mendalam dari pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk menjelaskan kebijakan tersebut secara rinci di hadapan sidang DPR.

▷ **Hak Mosi**

Hak mosi adalah hak DPR untuk menyatakan sikap atau pendapat resmi terhadap suatu kebijakan pemerintah. Mosi bisa berupa **mosi percaya**, yang menyatakan dukungan DPR terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah, atau **mosi tidak percaya**, yang menunjukkan bahwa DPR menolak atau tidak mendukung kebijakan pemerintah. Mosi tidak percaya biasanya berujung pada rekomendasi untuk mengubah kebijakan, atau bahkan pergantian pejabat yang dianggap bertanggung jawab.

▷ **Hak Angket**

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan hak angket, DPR dapat membentuk **panitia khusus** untuk menyelidiki masalah tertentu, meminta dokumen, dan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan. Hasil penyelidikan ini akan menjadi dasar bagi DPR untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan mengajukan tuntutan politik terhadap pemerintah.

▷ **Hak Petisi**

Hak petisi adalah hak DPR untuk menyampaikan usulan, permintaan, atau protes resmi kepada pemerintah terkait dengan masalah yang dianggap perlu diperhatikan atau diubah. Petisi bisa diajukan oleh DPR sebagai bentuk pengaduan atau tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan atas isu-isu tertentu. Hak petisi ini memungkinkan DPR untuk mewakili aspirasi rakyat secara formal kepada pemerintah.

Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)

Setelah meletusnya **Peristiwa G30S/PKI** pada tahun **1965**, Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap sebagai ancaman utama bagi stabilitas nasional. Maka, langkah pertama yang dilakukan oleh Soeharto ketika mendapatkan kekuasaan melalui **Supersemar** adalah **membubarkan PKI** secara resmi pada tanggal **12 Maret 1966**. Pembubaran PKI disertai dengan penangkapan besar-besaran terhadap para simpatisan dan anggota partai tersebut. PKI, yang sempat menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia, dilumpuhkan secara total. Operasi militer terhadap sisa-sisa PKI terus dilakukan di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang dianggap sebagai basis komunis, seperti **Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali**.

Dengan pembubaran PKI, Orde Baru tidak hanya memusnahkan partai komunis dari arena politik, tetapi juga memberlakukan kebijakan yang melarang segala bentuk ideologi komunis di Indonesia. Hingga kini, **komunisme** dianggap sebagai ideologi terlarang di Indonesia, dan penegakan hukum terhadap segala aktivitas yang terkait dengan PKI dilakukan dengan ketat selama pemerintahan Soeharto.

Penyederhanaan Partai Politik

Untuk menciptakan stabilitas politik yang lebih terkontrol, **Presiden Soeharto** menerapkan kebijakan penyederhanaan partai politik pada awal 1970-an. Langkah ini diambil untuk mengurangi fragmentasi politik dan menguatkan kendali pemerintah atas proses politik. **Pemilu 1971**, yang merupakan pemilu pertama di bawah pemerintahan Orde Baru, menjadi titik awal dari perubahan besar ini.

Pada **5 Juli 1971**, pemilu diadakan dengan melibatkan **9 partai politik** sebagai peserta. Berikut adalah daftar sembilan partai yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut:

- 1) **Golongan Karya (Golkar)**: Organisasi non-partai yang mewakili "golongan karya" atau kelompok profesional dan birokrasi, didukung kuat oleh militer dan pemerintah.
- 2) **Partai Nasional Indonesia (PNI)**: Partai nasionalis yang didirikan oleh Soekarno dan memiliki sejarah panjang sebagai pendukung utama kemerdekaan Indonesia.
- 3) **Nahdlatul Ulama (NU)**: Organisasi Islam tradisional yang juga aktif di bidang politik, mewakili kepentingan umat Islam tradisional di Indonesia.
- 4) **Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)**: Partai berbasis Islam yang memiliki pengikut dari kelompok Islam modernis.
- 5) **Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)**: Partai yang merupakan kelanjutan dari Masyumi, salah satu partai besar sebelum dibubarkan, mewakili Islam modernis.
- 6) **Partai Katolik**: Partai politik berbasis agama Katolik yang berjuang untuk kepentingan umat Katolik di Indonesia.
- 7) **Parkindo (Partai Kristen Indonesia)**: Partai politik berbasis agama Kristen Protestan.
- 8) **Partai Islam PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)**: Partai yang mewakili umat Islam dengan fokus pada pendidikan dan dakwah.
- 9) **Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)**: Partai yang beranggotakan para pejuang kemerdekaan dan veteran militer, dengan platform nasionalis dan militeristik.

Pada Pemilu 1971, **Golkar** muncul sebagai pemenang dengan perolehan suara mayoritas, mengalahkan delapan partai politik lainnya. Setelah Pemilu 1971, Soeharto mulai menerapkan kebijakan **penyederhanaan partai politik**, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partai politik dan memusatkan kekuatan politik pada beberapa kelompok besar saja.

Dua partai politik yang diizinkan untuk tetap eksis adalah:

- 1) **Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, yang merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam seperti **NU**, **PSII**, dan **Parmusi**.
- 2) **Partai Demokrasi Indonesia (PDI)**, yang merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis dan Kristen, seperti **PNI**, **Partai Katolik**, dan **Partai Kristen Indonesia (Parkindo)**.

Golkar, yang bukan merupakan partai politik melainkan **golongan karya**, didukung penuh oleh birokrasi dan militer. Golkar memiliki posisi dominan dalam setiap pemilu selama masa Orde Baru, selalu keluar sebagai pemenang.



Proses Penyederhanaan Partai pada Masa Orde Baru – buguruku.com

Pelaksanaan Pemilu yang Berkesinambungan

Pemilu 1971 adalah pemilu pertama di bawah pemerintahan Orde Baru, yang menjadi tonggak awal pelaksanaan **pemilu secara berkala** setiap **lima tahun sekali**. Pemilu ini dilaksanakan untuk menciptakan kesan bahwa pemerintahan Soeharto menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dalam praktiknya, pemilu ini lebih merupakan sarana untuk memperkuat dominasi Golkar, yang hampir selalu memenangkan pemilu dengan mayoritas suara.

Pemilu pada masa Orde Baru sangat terkontrol dan dikendalikan oleh pemerintah. **Birokrasi, militer, dan aparatur negara** diinstruksikan untuk mendukung Golkar, sehingga peluang bagi partai-partai politik lain untuk mendapatkan kekuasaan sangat terbatas. **Pemilu 1971** diikuti oleh **9 partai politik**, tetapi setelah kebijakan penyederhanaan partai, hanya PPP dan PDI yang bertahan sebagai partai oposisi, meskipun dalam kenyataan, mereka tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk menantang Golkar.

Peran Ganda atau Dwifungsi ABRI

Kebijakan politik yang sangat menonjol selama masa Orde Baru adalah penerapan **Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)**. **Dwifungsi** berarti bahwa ABRI tidak hanya bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam politik dan pemerintahan. Di bawah Dwifungsi, para perwira militer ditempatkan di berbagai posisi penting dalam pemerintahan, mulai dari **DPR, MPR**, hingga posisi kepala daerah dan jabatan strategis di birokrasi.

Melalui Dwifungsi, Soeharto memperkuat cengkeramannya atas militer, sekaligus menjadikan militer sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Dwifungsi ABRI dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik, namun di sisi lain, kebijakan ini juga menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia karena militer memegang kendali yang terlalu besar dalam pemerintahan.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada masa **Orde Baru**, **Presiden Soeharto** memperkuat legitimasi politiknya dengan menegaskan kembali **Pancasila** sebagai satu-satunya ideologi negara. Untuk memastikan Pancasila menjadi panduan hidup bangsa, pemerintah memperkenalkan program **Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)** yang diresmikan melalui **TAP MPR Nomor II/MPR/1978** pada **12 Maret 1978**. Tujuan program ini adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, demi menjaga stabilitas politik dan mencegah bangkitnya ideologi lain, terutama komunisme.

Dipimpin oleh **Roeslan Abdulgani**, Komisi Penasihat Presiden merancang program P4 untuk diterapkan di semua lapisan masyarakat. **Lembaga pendidikan** mewajibkan siswa mengikuti penataran P4, sementara

pegawai negeri dan **organisasi masyarakat** juga diwajibkan mengamalkan Pancasila melalui pelatihan dan penataran formal. P4 menjadi bagian penting dari pendidikan moral dan pembinaan nasional.

Meski bertujuan baik, program ini mendapat kritik karena dianggap terlalu formalistik dan sering kali menjadi alat indoktrinasi politik. Banyak yang merasa pelaksanaannya hanya rutinitas tanpa makna yang mendalam, serta lebih berfokus pada penegasan loyalitas terhadap negara ketimbang penghayatan sejati terhadap nilai-nilai Pancasila.

Penataan Politik Luar Negeri Indonesia

Di bawah **Presiden Soeharto**, kebijakan luar negeri Indonesia menjadi lebih pragmatis dan berfokus pada **kepentingan ekonomi**. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti **ASEAN**, **OKI**, **OPEC**, dan **APEC**. Salah satu pencapaian penting adalah terbentuknya **ASEAN** melalui **Persetujuan Bangkok** pada **8 Agustus 1967**, di mana Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas kawasan **Asia Tenggara**.

Sebelumnya, pada masa **Orde Lama**, Indonesia pernah **keluar dari PBB** pada **7 Januari 1965** sebagai bentuk protes terhadap keanggotaan Malaysia di Dewan Keamanan PBB di tengah **Konfrontasi Indonesia-Malaysia**. Setelah Soeharto berkuasa, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada **28 September 1966**, yang membuka jalan bagi **bantuan ekonomi** dan **investasi asing** dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional, mendukung pembangunan ekonomi Orde Baru.

Contoh Soal

Tujuan utama dari kebijakan penyederhanaan partai politik yang diterapkan oleh Presiden Soeharto pada awal 1970-an?

Jawaban:

Mengurangi fragmentasi politik dan menguatkan kendali pemerintah atas proses politik

Pembahasan:

Kebijakan penyederhanaan partai politik yang diterapkan oleh Presiden Soeharto bertujuan untuk mengurangi fragmentasi politik yang terjadi pada masa sebelumnya. Dengan mengurangi jumlah partai politik yang ada, Soeharto memperkuat kendali pemerintah atas proses politik dan menjaga stabilitas politik dengan dominasi Golkar sebagai pemenang utama dalam setiap pemilu.



3. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru

Setelah berhasil menata stabilitas politik, perhatian **Presiden Soeharto** beralih ke **pembangunan ekonomi**. Indonesia yang selama ini dirundung krisis ekonomi dan inflasi tinggi butuh landasan baru untuk bergerak maju. Soeharto memahami bahwa stabilitas politik saja tidak cukup; rakyat membutuhkan peningkatan kualitas hidup yang nyata. Maka, **Orde Baru** berfokus pada upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita merupakan kebijakan ekonomi jangka panjang yang diinisiasi oleh pemerintahan **Presiden Soeharto** dalam kerangka pembangunan nasional Indonesia. Repelita ini dirancang untuk dilaksanakan dalam lima tahapan utama, di mana setiap tahap memiliki fokus dan tujuan spesifik guna menggerakkan ekonomi Indonesia ke arah modernisasi dan diversifikasi. Repelita dimulai dengan **Repelita I** pada tahun 1969 dan berlanjut hingga **Repelita V** pada akhir 1980-an.



Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada 27 Maret 1968 – Wikimedia.commons

a. Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)

Fokus utama **Repelita I** adalah **pemulihan ekonomi** pasca krisis ekonomi yang terjadi di masa **Orde Lama**. Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa krisis ekonomi yang melanda negara membutuhkan solusi cepat dan menyeluruh. Pada periode ini, program pembangunan difokuskan pada **peningkatan produksi pangan**, terutama beras, guna mencapai **kemandirian pangan**.

Target utama pada **Repelita I** meliputi:

- ▷ **Peningkatan produksi beras dan padi**, yang menjadi makanan pokok rakyat Indonesia.
- ▷ **Pengendalian inflasi**, yang pada masa itu mencapai tingkat yang sangat tinggi.
- ▷ **Pemulihan sektor pertanian**, dengan mendorong investasi dalam teknologi pertanian dan irigasi.
- ▷ **Pembangunan infrastruktur dasar**, seperti jalan raya, jembatan, dan bendungan, untuk memperlancar distribusi hasil-hasil pertanian dan kebutuhan pokok.

Meskipun skala pembangunan masih terbatas, **Repelita I** menjadi fondasi bagi perbaikan ekonomi nasional, khususnya dalam bidang **pertanian**. Pada periode ini, Indonesia berusaha keluar dari masa krisis dengan menstabilkan produksi pangan dan mengendalikan inflasi yang sebelumnya sangat mengganggu perekonomian.

b. Repelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)

Memasuki **Repelita II**, pemerintah mulai memfokuskan pembangunan pada **diversifikasi ekonomi**, dengan tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, tetapi juga mengembangkan **industri** sebagai penopang utama ekonomi nasional. Pemerintah juga mulai meningkatkan investasi dalam **infrastruktur** dan **pendidikan** untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil.

Fokus utama **Repelita II** meliputi:

- ▷ **Pengembangan industri pengolahan**, yang mulai memberikan nilai tambah pada produk-produk lokal seperti minyak sawit, karet, dan kayu.
- ▷ **Pembangunan infrastruktur lebih luas**, termasuk proyek jalan raya lintas provinsi dan **pembangunan pelabuhan** untuk meningkatkan ekspor.
- ▷ **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui pembangunan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan pusat-pusat pelatihan kerja untuk mendukung industrialisasi.

Pada akhir **Repelita II**, terjadi peningkatan signifikan dalam sektor **minyak dan gas**. Ini sangat membantu keuangan negara, apalagi di tengah melonjaknya harga minyak dunia pada masa itu. Peningkatan pendapatan dari sektor minyak juga memberikan modal yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan industri.

c. Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

Pada periode **Repelita III**, Indonesia mulai fokus pada **industrialisasi** lebih dalam. Pemerintah mengidentifikasi pentingnya **sektor manufaktur** sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pada masa ini, terjadi lonjakan dalam **ekspor minyak** dan gas, yang memberikan pemasukan besar bagi negara, memungkinkannya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan besar-besaran.

Tujuan utama **Repelita III** meliputi:

- ▷ **Penguatan sektor industri** melalui investasi di sektor manufaktur dan pengolahan hasil tambang serta perkebunan.
- ▷ **Pengembangan sektor energi**, dengan peningkatan produksi minyak, gas alam, serta eksplorasi sumber daya alam lainnya.
- ▷ **Pembangunan infrastruktur strategis**, termasuk **bandara**, **pelabuhan**, serta **pembangunan bendungan** seperti **Bendungan Karangates** (1977) untuk memperbaiki irigasi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air.
- ▷ Pada akhir **Repelita III**, Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen minyak terbesar dunia, dan pendapatan dari minyak menjadi andalan ekonomi nasional.

d. Repelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)

Pada **Repelita IV**, pemerintah berfokus pada **peningkatan kualitas sumber daya manusia** serta diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Setelah mencapai swasembada beras pada awal 1980-an, perhatian pemerintah beralih pada **pengembangan sektor industri non-migas**, serta **teknologi** dan **pendidikan** yang mendukung industrialisasi lebih lanjut.

Tujuan utama **Repelita IV** adalah:

- ▷ **Mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas** sebagai sumber pendapatan utama, dengan meningkatkan sektor manufaktur dan industri.
- ▷ **Pembangunan infrastruktur pendidikan**, termasuk sekolah-sekolah dan universitas, untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dalam mendukung industrialisasi.

- ▷ **Peningkatan pembangunan transportasi**, seperti pengembangan **Bandara Soekarno-Hatta**, yang diresmikan pada **1 Mei 1985**, menjadi salah satu bandara internasional terbesar di Asia Tenggara.

Pada periode ini, pemerintah juga mulai mendorong **pemanfaatan teknologi** lebih luas, termasuk proyek **satelit komunikasi Palapa** yang diluncurkan pada **9 Juli 1976** dan mempercepat modernisasi telekomunikasi di Indonesia.

e. **Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)**

Repelita V berfokus pada **modernisasi lebih lanjut**, dengan tetap menjaga momentum pembangunan industri dan infrastruktur. Pemerintah semakin mendorong **pembangunan ekonomi yang merata** ke seluruh wilayah, serta terus meningkatkan kualitas **sumber daya manusia** untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Fokus **Repelita V** mencakup:

- ▷ **Peningkatan daya saing industri**, terutama dalam produk-produk manufaktur dan teknologi.
- ▷ **Percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal**, dengan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di luar Jawa.
- ▷ **Pembangunan infrastruktur besar-besaran**, termasuk pengembangan jalan tol dan proyek **Trans-Jawa** serta **Trans-Sumatera**.

Selain itu, pemerintah mulai memperhatikan **lingkungan hidup**, dengan memperkenalkan kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.



Fakta Unik di Balik Sejarah



*Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta –
Wikimedia.commons*

Bandara Soekarno-Hatta Dibuka: Pintu Internasional Indonesia

Bandara Soekarno-Hatta diresmikan pada 1 Mei 1985, di tengah Repelita IV. Bandara ini dirancang untuk menjadi salah satu yang terbesar dan tersibuk di Asia Tenggara, menggantikan fungsi utama Bandara Kemayoran.

Revolusi Hijau

Salah satu kebijakan yang sangat signifikan di sektor pertanian pada masa Orde Baru adalah **Revolusi Hijau**. Program ini diluncurkan untuk meningkatkan hasil pertanian, terutama beras, sebagai upaya untuk mencapai **swasembada pangan**. Pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, pemerintah memperkenalkan teknologi baru dalam pertanian, termasuk penggunaan **benih unggul**, **pupuk kimia**, **obat-obatan hama**, serta irigasi yang lebih modern.

Dengan teknologi pertanian yang lebih maju, produksi beras Indonesia meningkat drastis. Pada **1984**, Indonesia bahkan berhasil mencapai **swasembada beras**, sebuah pencapaian besar yang sangat membanggakan di era Orde Baru. **Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)** memberikan penghargaan kepada Soeharto atas keberhasilan ini pada tahun yang sama.

Empat program Revolusi Hijau yang diterapkan pada sektor pertanian di Indonesia, antara lain:

- 1) Intensifikasi,
- 2) Ekstensifikasi,
- 3) Diversifikasi, dan
- 4) Rehabilitasi.

Revolusi Hijau tak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Namun, meski memberikan dampak positif dalam jangka pendek, Revolusi Hijau juga menimbulkan masalah seperti ketergantungan pada pupuk kimia dan penurunan kualitas tanah dalam jangka panjang.

Pancausaha Tani

Pancausaha Tani adalah program pendukung **Revolusi Hijau** yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Lima usaha utama dalam Pancausaha Tani adalah:

- a. **Pengolahan tanah yang baik** untuk mempersiapkan lahan pertanian secara optimal.
- b. **Pengairan dan irigasi yang teratur** untuk memastikan tanaman mendapat suplai air yang cukup.
- c. **Pemilihan bibit unggul** yang bisa menghasilkan panen lebih banyak.
- d. **Penggunaan pupuk** dan obat hama secara teratur untuk mendukung pertumbuhan tanaman.
- e. **Pemberantasan hama** untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit.

Melalui Pancausaha Tani, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap aspek penting dalam proses pertanian dikelola dengan baik. Dengan penerapan teknologi dan pelatihan yang tepat, petani di seluruh Indonesia mampu meningkatkan produktivitas lahan mereka.

Pembangunan Infrastruktur pada Masa Orde Baru

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama kebijakan **Orde Baru** di bawah kepemimpinan **Presiden Soeharto**. Infrastruktur yang baik dianggap sebagai fondasi penting untuk **pertumbuhan ekonomi** dan **pembangunan nasional**, karena mempermudah **akses ke pasar**, **distribusi barang**, serta **mobilitas manusia**. Upaya ini tidak hanya meliputi pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara, tetapi juga pengembangan sektor teknologi serta **industri strategis** yang mendukung modernisasi.

a. Transportasi Darat: Jalan Raya dan Kereta Api

Pemerintahan Orde Baru secara besar-besaran membangun **jalan raya lintas provinsi** di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau besar seperti **Sumatera** dan **Jawa**. Jalan **Lintas Sumatera** dan **Jalan Lintas Jawa** menjadi proyek besar yang dirancang untuk mempercepat mobilitas barang dan orang di kedua pulau tersebut, yang memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Jalan-jalan ini memungkinkan pengiriman barang dari pelabuhan-pelabuhan utama ke kota-kota di pedalaman menjadi lebih efisien, sehingga biaya logistik menurun dan akses pasar meningkat.



Jalan Lintas Sumatera – commons.wikimedia.org

Tidak hanya jalan raya, pemerintah juga memperkuat jaringan **kereta api**. **Perusahaan Kereta Api Indonesia (Perumka)** yang sekarang menjadi **PT KAI** ditugaskan untuk memperbaiki dan memperluas jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota utama di **Jawa** dan **Sumatera**. Salah satu pencapaian penting adalah pembangunan **Jalur Ganda** (double track) di **Pantura** (Pantai Utara Jawa) yang memungkinkan transportasi kereta barang dan penumpang menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain transportasi darat, pemerintah juga memperkenalkan bus antarkota, yang dikenal sebagai **DAMRI** (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblrik Indonesia), yang menghubungkan berbagai kota di seluruh Indonesia, membantu memperlancar transportasi masyarakat.

b. Bendungan dan Irigasi

Untuk mendukung sektor **pertanian**, pembangunan **bendungan** dan **sistem irigasi** menjadi prioritas utama. Proyek **Bendungan Karangates**, yang diresmikan pada **1977** di **Jawa Timur**, merupakan salah satu contoh penting dari proyek infrastruktur yang dibangun untuk mendukung sistem irigasi. Bendungan ini membantu mengairi lahan pertanian, terutama di area pertanian padi, sekaligus menyediakan **pembangkit listrik tenaga air (PLTA)** untuk wilayah sekitarnya.

Selain Bendungan Karangates, **Bendungan Jatiluhur** di **Jawa Barat** juga menjadi proyek irigasi besar yang mendukung pertanian padi dan menyediakan air minum bagi penduduk. Bendungan ini, yang dibangun sejak masa Orde Lama dan diresmikan kembali pada masa Orde Baru, menjadi salah satu proyek bendungan terbesar di Asia Tenggara.

Proyek irigasi juga diperluas di luar Jawa, seperti di **Sumatera** dan **Sulawesi**, untuk meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh nusantara. **Sistem irigasi teknis** yang diperkenalkan memungkinkan petani untuk menanam lebih dari sekali dalam setahun, sehingga produksi pertanian meningkat secara signifikan.

c. Transportasi Udara: Bandara Soekarno-Hatta dan Pengembangan Maskapai

Transportasi udara juga mendapat perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru. Salah satu proyek terpenting adalah pembangunan **Bandara Soekarno-Hatta**, yang dibuka secara resmi pada **1 Mei 1985** di **Tangerang**, Banten. Bandara ini dirancang sebagai **hub internasional** untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang dan kargo dari dan ke luar negeri. Bandara Soekarno-Hatta menjadi pintu gerbang utama bagi Indonesia dalam hubungan internasional, baik untuk pariwisata, perdagangan, maupun investasi.

Selain pembangunan bandara, **maskapai penerbangan nasional** seperti **Garuda Indonesia** diperkuat untuk mendukung konektivitas domestik dan internasional. **Garuda Indonesia**, yang merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia, mengalami modernisasi armada selama masa Orde Baru, dengan pengadaan pesawat **Boeing 747** untuk rute-rute jarak jauh. Selain Garuda, ada juga maskapai domestik seperti **Merpati Nusantara Airlines** yang melayani rute-rute penerbangan di dalam negeri, termasuk ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Pemerintah juga memperkenalkan subsidi untuk penerbangan domestik, guna memastikan bahwa daerah-daerah terpencil di Indonesia tetap terhubung secara baik dengan pusat-pusat ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatera.

d. Pengembangan Teknologi dan Industri: LAPAN dan Satelit Palapa

Selain infrastruktur fisik, Orde Baru juga fokus pada **pengembangan teknologi** dan **industri strategis**. Salah satu pencapaian besar di bidang teknologi adalah peluncuran **Satelit Palapa** pada **9 Juli 1976**, yang menjadikan Indonesia negara pertama di **Asia Tenggara** yang memiliki satelit komunikasi. Satelit Palapa diluncurkan dengan dukungan **LAPAN** (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan dirancang untuk meningkatkan **telekomunikasi** di seluruh nusantara. Satelit ini memungkinkan Indonesia untuk

memperluas jangkauan komunikasi radio dan televisi hingga ke pelosok negeri, yang sebelumnya sulit dijangkau.

Satelit Palapa juga mendukung **modernisasi telekomunikasi** nasional dengan menyediakan sambungan telepon yang lebih cepat dan efisien antara pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan teknologi satelit ini, jaringan komunikasi dapat lebih mudah diakses, meningkatkan efisiensi bisnis, pemerintahan, dan pendidikan di seluruh negeri.

Di samping itu, pemerintah juga memperkenalkan program pengembangan industri **pesawat terbang** melalui **Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)**, yang didirikan pada **26 April 1976**. IPTN, di bawah kepemimpinan **BJ Habibie**, menjadi salah satu industri strategis yang dirancang untuk memproduksi pesawat terbang lokal, seperti **N-250**. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pesawat dan mengembangkan kemampuan teknologi dalam negeri.



Satelit Palapa B1 – Wikimedia.commons

e. Industri Strategis Lainnya

Pada masa Orde Baru, pemerintah juga membentuk beberapa **industri strategis** lainnya seperti:

- ▷ **PT Krakatau Steel**, perusahaan baja terbesar di Indonesia yang didirikan pada **1970** di **Cilegon, Banten**, yang menjadi pilar industri berat dan manufaktur di Indonesia.
- ▷ **Pertamina**, perusahaan minyak dan gas milik negara, juga memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur energi, dengan pembangunan kilang minyak dan jaringan pipa yang mendukung produksi serta distribusi minyak dan gas di seluruh Indonesia.

Industri strategis ini mendukung upaya pemerintah untuk mendorong industrialisasi dan mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor, serta mendorong Indonesia menjadi negara dengan **basis industri** yang lebih kuat dan berdaya saing.

Contoh Soal

Apa dampak utama dari penerapan kebijakan Revolusi Hijau pada sektor pertanian Indonesia?

Jawaban:

Meningkatkan kesejahteraan petani, namun juga menurunkan kualitas tanah dalam jangka panjang

Pembahasan:

Revolusi Hijau membawa kemajuan besar dalam teknologi pertanian, termasuk penggunaan benih unggul, pupuk kimia, dan sistem irigasi modern yang meningkatkan hasil pertanian, khususnya beras. Hal ini berkontribusi pada pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan pada pupuk kimia dapat merusak kualitas tanah, yang menjadi salah satu masalah besar dari kebijakan ini.

Kegiatan Kelompok 1

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan menganalisis sistem politik, peran militer dan Golkar, kebijakan ekonomi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di era Orde Baru.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang, lalu pelajari data berikut:

Aspek	Penjelasan Singkat
Politik	Sistem satu partai dominan (Golkar), militer berperan besar, kontrol ketat terhadap media
Ekonomi	Fokus pembangunan, swasembada pangan, pertumbuhan tinggi, namun ketimpangan mulai muncul
Sosial	Program KB, pembangunan infrastruktur besar-besaran, namun pembatasan kebebasan berpendapat

2. Diskusikan dan jawab pertanyaan di bawah ini:
 - ▷ Bagaimana peran Golkar dan militer dalam menguasai politik di era Orde Baru?
 - ▷ Apa saja keberhasilan dan kelemahan sistem politik yang diterapkan?
 - ▷ Bagaimana dampak kebijakan ekonomi Orde Baru terhadap rakyat?
 - ▷ Apa dampak program pembangunan dan kependudukan terhadap masyarakat?
 - ▷ Menurut kalian, apakah pembangunan di era Orde Baru lebih banyak membawa manfaat atau justru masalah? Jelaskan alasannya.
3. Buatlah tabel sederhana berisi kelebihan dan kekurangan sistem politik dan ekonomi Orde Baru berdasarkan hasil diskusi.



4. Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan **Orde Baru**, yang dimulai pada tahun **1966** di bawah kepemimpinan **Presiden Soeharto**, dianggap sebagai salah satu periode di mana pembangunan ekonomi dan infrastruktur Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Berbeda dengan masa **Orde Lama**, yang penuh dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi, Orde Baru berhasil menciptakan **fondasi ekonomi yang lebih kuat** melalui serangkaian kebijakan yang terencana dan sistematis. Salah satu pilar utama keberhasilan Orde Baru adalah **Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)**, yang memberikan kerangka kerja bagi pembangunan nasional.

Pembangunan Fisik: Transportasi dan Infrastruktur

Salah satu keberhasilan paling terlihat pada masa Orde Baru adalah **pembangunan fisik**, terutama dalam sektor **transportasi**. Pemerintah gencar membangun infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jalan-jalan utama seperti **Jalan Lintas Sumatera** dan **Jalan Lintas Jawa** dibangun untuk mempermudah akses transportasi darat dan mempercepat pengiriman barang antar kota dan provinsi. Pembangunan jalan tol juga dimulai di Jawa, mempercepat mobilitas barang dan orang di pulau terpadat di Indonesia ini.

Tak hanya di darat, sektor transportasi udara juga mendapat perhatian besar. Pembangunan **Bandara Soekarno-Hatta**, yang diresmikan pada **1 Mei 1985**, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan **pusat transportasi udara** terbesar di Asia Tenggara. Bandara ini mendukung konektivitas internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi di kawasan. Selain itu, **pelabuhan-pelabuhan** utama seperti **Pelabuhan Tanjung Priok** di Jakarta dan **Pelabuhan Belawan** di Sumatera Utara juga diperluas untuk meningkatkan kapasitas angkutan laut dan mendukung perdagangan internasional.

Swasembada Pangan: Pencapaian Besar Orde Baru



Lahan Pertanian yang Subur – Shutterstock.com. 2580230363

Salah satu pencapaian besar dalam bidang perekonomian yang dicapai pada masa Orde Baru adalah **swasembada beras**. Sebelum Orde Baru, Indonesia bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Namun, berkat program **Revolusi Hijau** yang diluncurkan pada akhir 1960-an hingga 1970-an, pemerintah berhasil meningkatkan produksi pangan dalam negeri, khususnya beras.

Revolusi Hijau memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih modern kepada para petani Indonesia. Program ini melibatkan penggunaan **bibit unggul**, **pupuk buatan**, **pestisida**, serta **peralatan pertanian**

modern yang lebih efisien. Selain itu, pemerintah membangun sistem **irigasi teknis** untuk memastikan lahan pertanian selalu mendapatkan pasokan air yang cukup, yang memungkinkan petani untuk melakukan panen lebih dari sekali dalam setahun.

Pada tahun **1984**, Indonesia secara resmi mencapai **swasembada beras**, yang berarti negara tidak lagi perlu mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Bahkan, Indonesia mulai mengekspor beras ke negara lain. Pencapaian ini sangat dihargai di tingkat internasional, dan Indonesia menerima penghargaan dari **Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)** atas keberhasilan tersebut.

Pengendalian Penduduk: Program Keluarga Berencana (KB)

Sukses lainnya yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Orde Baru adalah **pengendalian laju pertumbuhan penduduk** melalui program **Keluarga Berencana (KB)**. Pada masa awal Orde Baru, **angka kelahiran** di Indonesia sangat tinggi, yang mengakibatkan ledakan penduduk dan menambah beban ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tak terkendali bisa menghambat pembangunan ekonomi.

Untuk itu, pemerintah memperkenalkan program Keluarga Berencana yang mendorong masyarakat untuk membatasi jumlah anak dengan slogan **"Dua Anak Cukup."** Program KB ini didukung oleh **BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)** dan berbagai kampanye yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk **puskesmas**, tokoh agama, dan media massa. **Alat kontrasepsi** seperti pil KB, kondom, dan IUD dipromosikan secara luas, dengan tujuan mengendalikan angka kelahiran dan menciptakan keluarga yang lebih sejahtera.

Melalui program ini, **laju pertumbuhan penduduk** dapat ditekan secara signifikan. Hasilnya, Indonesia mampu menjaga stabilitas penduduk, yang pada akhirnya mendukung proses pembangunan ekonomi lebih lanjut.

Stabilitas Politik dan Pengendalian Inflasi

Orde Baru juga dikenal dengan keberhasilannya dalam menciptakan **stabilitas politik**, yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Setelah masa penuh gejolak pada akhir Orde Lama, Soeharto berhasil memulihkan ketertiban politik melalui kebijakan-kebijakan yang menekankan pada stabilitas. Sistem politik yang terpusat, dengan kontrol kuat oleh pemerintah dan dukungan militer, berhasil menciptakan kondisi politik yang relatif stabil selama masa Orde Baru.

Salah satu krisis terbesar yang diwarisi Soeharto dari pemerintahan sebelumnya adalah **inflasi yang meroket**. Pada tahun **1965**, inflasi mencapai puncaknya di angka **650%**, menyebabkan harga-harga barang melambung tinggi dan daya beli rakyat jatuh. Namun, di bawah pemerintahan Soeharto, laju inflasi dapat ditekan dengan cepat. Pada akhir 1960-an, inflasi berhasil dikendalikan hingga **120%**, dan terus menurun dalam beberapa tahun berikutnya.

Penekanan inflasi ini dilakukan melalui berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Pemerintah melakukan **stabilisasi harga barang**, mengurangi subsidi yang tidak perlu, serta memperbaiki manajemen keuangan negara. **Bank Indonesia** diberi peran besar dalam menjaga **kestabilan mata uang**, yang juga membantu menstabilkan perekonomian secara keseluruhan.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

Melalui **Repelita** dan berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara konsisten. Pada akhir 1980-an, **pertumbuhan ekonomi** rata-rata mencapai angka **7% per tahun**, salah satu yang tertinggi di Asia pada saat itu. Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya **produk domestik bruto (PDB)**, meningkatnya investasi asing, serta pengembangan sektor industri dan pertanian.

Selain itu, upaya penurunan angka kemiskinan juga menjadi salah satu fokus utama Orde Baru. Melalui program-program seperti **intensifikasi pertanian** dan **pembangunan pedesaan**, angka kemiskinan berhasil

ditekan dari **40%** pada akhir 1960-an menjadi **20%** pada akhir 1980-an. Program intensifikasi pertanian yang diperkenalkan dalam **Revolusi Hijau** memungkinkan petani meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan teknologi yang lebih baik dan menghasilkan lebih banyak panen.

Contoh Soal

Apa salah satu keberhasilan utama dalam sektor transportasi yang dicapai pada masa Orde Baru?

Jawaban:

Pembangunan Bandara Soekarno-Hatta sebagai pusat transportasi udara internasional

Pembahasan:

Salah satu pencapaian besar dalam sektor transportasi pada masa Orde Baru adalah pembangunan Bandara Soekarno-Hatta, yang diresmikan pada 1 Mei 1985. Bandara ini dirancang sebagai hub internasional yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bandara ini mendukung konektivitas internasional dan memainkan peran penting dalam memperlancar perdagangan dan investasi global.



5. Berakhirnya Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada pertengahan **1990-an**, angin perubahan mulai terasa di Indonesia. Pemerintahan **Orde Baru** yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun di bawah kepemimpinan **Presiden Soeharto**, mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Jika pada awalnya Orde Baru dikenal dengan stabilitas politik dan keberhasilan pembangunan ekonomi, di penghujung dekade tersebut, masalah-masalah besar muncul ke permukaan. Kondisi ekonomi yang dulunya kuat mulai goyah, dan ketidakpuasan rakyat yang semakin membesar terhadap praktik **korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)** yang melibatkan pejabat tinggi negara serta elite-politik, membuat legitimasi Soeharto semakin dipertanyakan.

Puncak dari ketidakpuasan ini meletus pada **Mei 1998**, ketika krisis ekonomi yang menghancurkan ekonomi Asia menghantam Indonesia dengan keras. **Aksi massa** yang melibatkan ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil terjadi di berbagai kota besar, terutama di **Jakarta**, dengan satu tuntutan utama: **Reformasi**. Tuntutan ini bukan hanya meminta perubahan ekonomi, tetapi juga **perubahan sistem politik** yang lebih demokratis dan mengakhiri kekuasaan Soeharto.

Sebelum kita menyelami lebih dalam penyebab dan aksi-aksi yang mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru, mari kita lihat sejumlah faktor utama yang menyebabkan keruntuhan rezim yang telah lama berkuasa ini.

Masalah Penyebab Berakhirnya Orde Baru

Pada tahun-tahun terakhir Orde Baru, banyak masalah yang menghantam Indonesia secara bersamaan, menyebabkan kerapuhan sistem pemerintahan yang selama ini terlihat kuat. Berikut adalah faktor-faktor penting yang mempercepat kejatuhan Orde Baru:

a. Krisis Moneter

Pada tahun **1997**, Indonesia terkena dampak krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia. **Nilai tukar rupiah** anjlok drastis dari **Rp 2.500** per dolar AS menjadi **Rp 17.000** per dolar AS pada awal 1998. Krisis ini memicu lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok dan membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bank-bank gagal membayar hutang luar negeri dan banyak yang bangkrut. **Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)** dibentuk oleh pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan, tetapi kondisi ekonomi tetap memburuk.



Logo Badan Penyehatan Perbankan Nasional – commons.wikimedia.org

b. Utang Luar Negeri Indonesia

Pada masa Orde Baru, pembangunan besar-besaran yang dilakukan pemerintah dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang sangat besar. Pada **1998**, **utang luar negeri Indonesia** mencapai lebih dari **\$150 miliar**, yang sebagian besar jatuh tempo pada saat krisis melanda. Ketidakmampuan negara membayar hutang ini memperburuk kondisi ekonomi nasional.

c. Dikuasai oleh Para Pengusaha Besar

Di bawah Orde Baru, ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan. Kelompok ini dikenal sebagai **keluarga cendana** dan jaringan kroni bisnis Soeharto, yang mendapat banyak keuntungan dari kedekatan dengan pemerintah. Sistem ini menimbulkan

ketimpangan ekonomi yang semakin jelas antara segelintir elite yang sangat kaya dan mayoritas rakyat yang miskin.

d. Sistem Pemerintahan yang Terpusat dengan Jakarta

Sistem pemerintahan Orde Baru sangat **sentralistik**, dengan kekuasaan yang terpusat di Jakarta. Hal ini menyebabkan daerah-daerah lain merasa terpinggirkan, terutama daerah-daerah di luar Jawa. Ketidakadilan dalam pembagian hasil pembangunan ini memicu ketidakpuasan yang mendalam di banyak wilayah, termasuk **Aceh** dan **Papua**, yang menginginkan otonomi lebih besar.

e. Kekuatan Politik yang Terpusat dan Rezim Otoriter

Pada masa Orde Baru, kekuatan politik sangat terkonsentrasi di tangan Soeharto dan **Golongan Karya (Golkar)**, partai politik yang selalu menang dalam setiap pemilu. Pemilu di bawah Orde Baru dianggap tidak demokratis karena hanya Golkar yang memiliki akses penuh ke kekuasaan, sementara dua partai oposisi, **PPP** dan **PDI**, hanya menjadi "pemanis" dalam sistem politik yang dikontrol ketat oleh pemerintah.

f. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

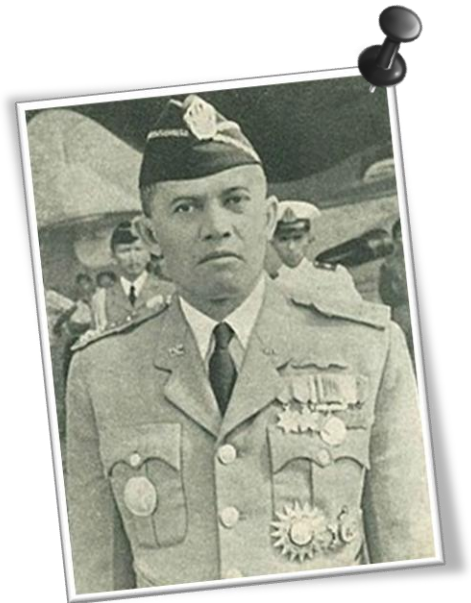
KKN menjadi ciri khas Orde Baru, di mana banyak kebijakan ekonomi dan proyek-proyek besar dikuasai oleh keluarga dan kroni dekat Soeharto. KKN merajalela di seluruh lapisan pemerintahan dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah. Praktik ini juga membuat kesenjangan ekonomi semakin tajam.

g. Dualisme Fungsi ABRI

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang berfungsi ganda sebagai penjaga keamanan dan kekuatan politik, semakin dikritik. Dualisme fungsi ABRI ini menempatkan militer dalam posisi strategis di pemerintahan, yang sering kali menghalangi demokratisasi. **Dwifungsi ABRI** memungkinkan militer berperan aktif dalam pemerintahan, termasuk dalam parlemen, yang memperkuat cengkeraman militer di bidang politik.

h. Kebijakan Khusus Terhadap Warga Tionghoa

Warga **Tionghoa** di Indonesia selama Orde Baru sering kali menjadi sasaran kebijakan diskriminatif. Pembatasan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan dan ekonomi, membuat mereka seringkali menjadi target sentimen negatif, terutama di masa-masa sulit. Hal ini menambah ketegangan sosial yang muncul di tengah krisis ekonomi.



Jenderal Abdul Haris Nasution, pengagas Konsep "Jalan Tengah" dan Dwifungsi ABRI – commons.wikimedia.org

Contoh Soal

Apa faktor utama yang mempercepat kejatuhan Orde Baru di Indonesia pada tahun 1998?

Jawaban:

Krisis ekonomi yang menyebabkan anjloknya nilai tukar rupiah dan lonjakan harga barang

Pembahasan:

Krisis ekonomi yang melanda Asia menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok dari Rp 2.500 per dolar AS menjadi Rp 17.000 per dolar AS pada awal 1998. Krisis ini memicu lonjakan harga barang kebutuhan

pokok, menambah kesulitan rakyat, dan memperburuk kondisi ekonomi yang sudah tertekan oleh utang luar negeri yang besar. Keadaan ini memperburuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, yang akhirnya berujung pada tuntutan reformasi besar-besaran pada 1998.

Aksi Massa Menuntut Reformasi

Kondisi krisis ekonomi yang semakin memburuk dan ketidakpuasan terhadap sistem politik membuat aksi-aksi massa mulai marak. Rakyat dan mahasiswa turun ke jalan, menuntut **reformasi** dalam berbagai sektor, terutama politik dan ekonomi. Berikut adalah enam poin penting dalam aksi massa yang menandai akhir dari Orde Baru:

a. Tuntutan Soeharto Mundur

Tuntutan utama dari aksi massa adalah **pengunduran diri Soeharto** sebagai presiden. Setelah 32 tahun berkuasa, rakyat menginginkan perubahan dan melihat Soeharto sebagai simbol dari segala masalah yang terjadi di Indonesia.

b. Tuntutan Reformasi Politik

Aksi massa juga menuntut **reformasi sistem politik** yang lebih demokratis. Mereka meminta diakhirinya sistem otoriter dan **sentralisasi kekuasaan**, serta dilaksanakannya pemilu yang bebas dan adil tanpa intervensi pemerintah.

c. Krisis Moneter dan Penyelamatan Ekonomi

Massa juga menuntut penyelesaian atas **krisis moneter** yang menghancurkan perekonomian. Inflasi yang tinggi, harga barang-barang pokok yang melonjak, dan pengangguran yang semakin meningkat menjadi perhatian utama.

d. Protes atas KKN

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sudah mengakar di seluruh lapisan pemerintahan menjadi salah satu pemicu utama aksi-aksi protes. Rakyat menuntut pemberantasan KKN dan penyelidikan terhadap praktik-praktik korupsi di lingkaran kekuasaan.

e. Kematian Mahasiswa Trisakti



Tragedi Trisakti – commons.wikimedia.org

Pada **12 Mei 1998**, empat mahasiswa **Universitas Trisakti** ditembak mati oleh aparat keamanan saat melakukan demonstrasi di Jakarta. Peristiwa ini menyulut kemarahan publik dan membuat gelombang demonstrasi semakin besar.

f. Pengunduran Diri Soeharto

Akhirnya, setelah serangkaian aksi massa yang terus meluas, pada **21 Mei 1998**, **Soeharto** mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan membuka era **Reformasi**, di mana wakil presiden **BJ Habibie** mengambil alih kepemimpinan.

Tabel Gerakan Mahasiswa dan Tahapan Reformasi 1998

Tahun	Deskripsi Gerakan Mahasiswa
1997-1998	Krisis moneter Asia ini berawal di Thailand dengan jatuhnya mata uang Bath terhadap dolar AS dan utang luar negeri yang membengkak Thailand bahkan nyaris dikatakan bangkrut akibat terlilit utang. Krisis tersebut lantas menyebar ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia yang mengalami pelemahan nilai mata uang serupa. Krisis ekonomi menjadi variabel tambahan bagi krisis multidimensional Indonesia yang menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru. Mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru mulai disuarakan di berbagai kampus di Indonesia. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga dilakukan di jalan protokol ibu kota untuk menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Tidak berapa lama kemudian, kerusuhan sosial terjadi di berbagai daerah, ribuan bangunan, rumah, serta fasilitas umum dibakar, dan korban pun berjatuhan.
5 Maret 1998	20 utusan mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang disampaikan pada sidang umum MPR, dan menyerahkan agenda reformasi. Mereka pun diterima oleh fraksi ABRI
11 Maret 1998	MPR kembali menunjuk Soeharto sebagai presiden untuk yang ketujuh kalinya. Keputusan politik ini memicu aksi demonstrasi menentang Orde Baru di banyak kota.
14 Maret 1998	Presiden Soeharto mengumumkan kabinet barunya yang dinamakan Kabinet Pembangunan VII.
15 April 1998	Presiden Soeharto meminta para mahasiswa untuk mengakhiri protes dan kembali ke kampus. Sebulan lamanya para mahasiswa dari perguruan tinggi, baik dari swasta maupun negeri, telah berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi.
18 April 1998	Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan para mahasiswa di arena Pekan Raya Jakarta. Namun, cukup banyak pimpinan mahasiswa yang menolak dialog tersebut
1 Mei 1998	Presiden Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri, Hartono dan Menteri Penerangan, Alwi Dachlan, mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003.
2 Mei 1998	Pernyataan mengenai reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003, kemudian diralat oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan bahwa reformasi dapat dilakukan tahun 1998.

Tahun	Deskripsi Gerakan Mahasiswa
9 Mei 1998	Presiden Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Hal ini menjadi lawatan terakhirnya ke luar negeri sebagai Presiden RI.
12 Mei 1998	Terjadi penembakan oleh tentara terhadap empat mahasiswa Trisakti, yang kemudian dikenal dengan nama Tragedi Trisakti.
12-13 Mei 1998	Terjadi kerusuhan massal di berbagai kota besar di Indonesia. Suasana ibu kota mencekam, peristiwa anarkis terjadi dengan sasaran masyarakat Tionghoa. Para mahasiswa mendorong perubahan melalui agenda reformasi dan berhasil menduduki gedung DPR/MPR.
21 Mei 1998	Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden B. J. Habibie.

Rangkuman

Masa pemerintahan **Orde Baru** dimulai setelah berakhirnya era **Orde Lama** yang penuh dengan krisis politik dan ekonomi. Lahirnya Orde Baru dipicu oleh berbagai ketegangan politik, terutama setelah peristiwa **G30S/PKI** pada tahun 1965. Masyarakat dan militer, melalui gerakan **Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)**, mendesak pembubaran **PKI** dan stabilisasi ekonomi. Puncaknya terjadi ketika **Presiden Soekarno** menyerahkan kekuasaan kepada **Mayor Jenderal Soeharto** melalui **Supersemar** pada **11 Maret 1966**, yang memberikan Soeharto wewenang penuh untuk mengendalikan negara.

Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto fokus pada penataan kehidupan politik yang stabil dan terkendali. Salah satu kebijakan utamanya adalah **pembubaran PKI** dan penyederhanaan partai politik melalui fusi partai-partai menjadi **Golkar**, **PPP**, dan **PDI**. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai-partai politik dapat dikendalikan oleh pemerintah, sehingga stabilitas politik dapat dijaga.

Dari segi ekonomi, **Repelita** menjadi landasan utama pembangunan nasional selama pemerintahan Orde Baru. Dengan dilaksanakannya **Repelita I** hingga **Repelita V**, pemerintah berhasil memulihkan ekonomi setelah krisis di era Orde Lama. Pembangunan sektor pertanian melalui program **Revolusi Hijau** membuat Indonesia mencapai **swasembada beras** pada tahun 1984. Program pembangunan infrastruktur, seperti **jalan lintas provinsi**, **bandara**, dan **bendungan**, juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat di seluruh wilayah Indonesia.

Keberhasilan lain yang signifikan adalah pengendalian **laju pertumbuhan penduduk** melalui program **Keluarga Berencana (KB)**. Dengan slogan "Dua Anak Cukup", program ini berhasil mengurangi angka kelahiran dan mendukung stabilitas ekonomi dan sosial. Di sisi lain, stabilitas politik dan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah berhasil menurunkan inflasi yang pernah mencapai angka **650%** pada masa Orde Lama. Ini menjadi salah satu keberhasilan penting Orde Baru dalam menyehatkan perekonomian nasional.

Namun, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari beberapa masalah yang kemudian muncul di tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru. Praktik **Korupsi**, **Kolusi**, dan **Nepotisme (KKN)** semakin merajalela, di mana sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir elit yang dekat dengan kekuasaan. **Sistem pemerintahan yang sentralistik** juga menimbulkan ketidakpuasan dari daerah-daerah di luar Jawa, yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil dari pembangunan nasional.

Puncaknya terjadi pada **1997** saat Indonesia dihantam **krisis moneter** yang menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis dan ekonomi runtuh. Krisis ini, ditambah dengan tingginya utang luar negeri, menimbulkan gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa. Aksi massa semakin memuncak setelah penembakan empat mahasiswa **Trisakti** pada **12 Mei 1998**, yang memicu kerusuhan di berbagai kota besar di Indonesia. Tekanan yang terus meningkat akhirnya memaksa **Presiden Soeharto** untuk mengundurkan diri pada **21 Mei 1998**, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era **Reformasi**.

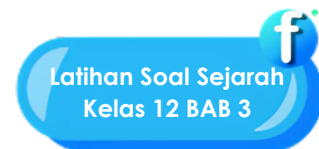
Keseluruhan dinamika Orde Baru mencerminkan perjalanan panjang Indonesia dalam mencari stabilitas politik dan ekonomi. Meskipun pemerintahan Soeharto membawa banyak keberhasilan, khususnya dalam pembangunan fisik dan pertanian, masalah seperti KKN dan krisis moneter mengakhiri kekuasaan yang sudah berjalan lebih dari tiga dekade. Era Orde Baru menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun sebuah pemerintahan yang kuat, namun tetap demokratis dan adil bagi seluruh rakyatnya.

Latihan Soal

1. Apa yang menjadi salah satu alasan utama bagi munculnya Orde Baru di Indonesia?
 - A. Krisis ekonomi yang parah pada masa Orde Lama
 - B. Ketidakpuasan terhadap keberhasilan Pancasila
 - C. Meningkatnya kekuatan militer Indonesia
 - D. Penguatan posisi Soekarno sebagai presiden seumur hidup
 - E. Pengembangan sektor teknologi dan industri
2. Siapakah yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966?
 - A. Dewan Perwakilan Rakyat
 - B. MPRS
 - C. Soekarno melalui Supersemar
 - D. PDI
 - E. Mahasiswa Indonesia
3. Program pembangunan apa yang menjadi landasan utama bagi perekonomian Indonesia selama masa Orde Baru?
 - A. Program KB
 - B. Pembangunan Infrastruktur
 - C. Repelita
 - D. Revolusi Hijau
 - E. Pemberantasan Korupsi
4. Jika kamu menjadi seorang ekonom pada masa Orde Baru, bagaimana kamu menilai dampak jangka panjang dari kebijakan penyederhanaan partai politik yang hanya mengizinkan tiga partai besar?
 - A. Meningkatkan keberagaman politik di Indonesia
 - B. Mengurangi partisipasi politik rakyat dalam pemilu
 - C. Memperkuat kontrol pemerintah atas politik, tetapi mengurangi demokrasi
 - D. Mengoptimalkan pembagian kekuasaan antara berbagai partai
 - E. Meningkatkan transparansi dalam proses politik
5. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras. Program apa yang menjadi faktor utama dalam pencapaian ini?
 - A. Program Keluarga Berencana
 - B. Program Revolusi Hijau
 - C. Pembangunan Infrastruktur
 - D. Program Pembangunan Nasional
 - E. Program Repelita

6. Apa yang menurut kamu menjadi faktor paling mendalam yang menyebabkan krisis moneter pada 1997 di Indonesia, dan bagaimana hal ini mempengaruhi berakhirnya Orde Baru?
- A. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola utang luar negeri dan ketergantungan pada sektor industri
 - B. Penurunan jumlah ekspor yang sangat drastis
 - C. Kebijakan fiskal yang sangat ketat oleh pemerintah
 - D. Ketidakstabilan politik yang menghambat investasi asing
 - E. Ketergantungan Indonesia pada sektor pertanian yang terguncang oleh perubahan iklim
7. Apa yang menjadi akar masalah ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan Orde Baru?
- A. Ketidaksetaraan dalam distribusi hasil pembangunan dan otonomi daerah yang terbatas
 - B. Keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah
 - C. Kebijakan pembangunan yang menguntungkan sektor industri besar
 - D. Pengabaian terhadap kebijakan luar negeri yang menguntungkan negara-negara Barat
 - E. Kurangnya peran sektor militer dalam pembangunan daerah

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Aspinall, E. (2002). Opposition and Elite Conflict in the Fall of Soeharto. *Journal of Asian Studies*.
- Hering, B. (2002). *Soekarno: Founding Father of Indonesia*.
- Kompas. (2016, Maret). Supersemar dan Transisi Kekuasaan Soekarno ke Soeharto. *Kompas*.
- Media Indonesia. (2016, Januari). Aksi Tritura 1966: Tekanan Besar Bagi Soekarno.
- Ricklefs, M. (2008). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta.
- TAP MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), MPRS, Jakarta.



BAB 4

JEJAK LANGKAH BANGSA DI ERA REFORMASI

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia

Menghargai perjuangan bangsa melalui reformasi dan menjaga nilai-nilai moral yang terkandung dalam semangat demokrasi yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil, mahasiswa, dan tokoh reformasi.

▷ Bernalar Kritis

Menganalisis penyebab dan dampak reformasi di Indonesia, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan yang terjadi pasca-reformasi, serta memahami dampak kebijakan pemerintah pasca-1998 terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Reformasi, Demokrasi, Gerakan Reformasi, Transisi Pasca-Reformasi, Kebebasan Politik.

Tujuan Pembelajaran: Memahami Memahami Latar Belakang dan Dampak Reformasi di Indonesia

1. Menjelaskan Latar Belakang Lahirnya Reformasi

- ▷ Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan lahirnya reformasi di Indonesia.
- ▷ Menggambarkan peran masyarakat sipil, mahasiswa, dan tokoh-tokoh utama dalam gerakan reformasi yang mengakhiri pemerintahan Soeharto.

2. Mengidentifikasi Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Pendidikan pada Masa Reformasi

- ▷ Menjelaskan perubahan dan tantangan politik yang terjadi selama masa transisi pasca-reformasi, termasuk pergeseran kekuasaan dan dinamika pemerintahan.
- ▷ Menggambarkan dampak reformasi terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia pada periode pasca-1998.
- ▷ Menjelaskan upaya perbaikan sistem pendidikan dan kebebasan berekspresi yang terjadi pada era reformasi.

3. Mengidentifikasi Kebijakan-Kebijakan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pasca-Reformasi 1998

- ▷ Menguraikan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang diambil oleh pemerintah baru dalam rangka memulihkan situasi negara.
- ▷ Mengidentifikasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diimplementasikan pada era reformasi.
- ▷ Menjelaskan reformasi dalam sektor hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan penguatan institusi demokrasi.

4. Menganalisis Berbagai Peristiwa yang Terjadi Pasca Reformasi 1998

- ▷ Menganalisis krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang dihadapi oleh pemerintahan pasca-reformasi.
- ▷ Menilai dampak reformasi terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial di Indonesia.
- ▷ Mengkaji perkembangan gerakan reformasi dari perspektif masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh pergerakan.



1. Awal Terbukanya Gerbang Reformasi Menuju Demokrasi

Tahukah kamu? Reformasi 1998 menjadi titik balik yang penting dalam sejarah Indonesia. Saat itu, negara ini tengah menghadapi krisis besar di berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi yang terpuruk, hingga ketidakpuasan politik terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Tekanan dari dalam negeri dan internasional akhirnya mendorong perubahan yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun dan membuka jalan bagi era baru yang lebih demokratis.

Definisi Reformasi Indonesia

Secara umum, **reformasi** di Indonesia merujuk pada **gerakan perubahan besar-besaran** yang terjadi pada tahun **1998** untuk menciptakan pemerintahan yang lebih **terbuka, demokratis, dan berkeadilan**. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, reformasi diartikan sebagai “perubahan besar-besaran dalam suatu tatanan untuk perbaikan.” Pada masa itu, reformasi Indonesia dimaknai sebagai usaha perombakan menyeluruh terhadap sistem politik dan pemerintahan **Orde Baru** yang dianggap **otoriter, korup, dan sentralistik**.

Tidak hanya itu, para **ahli politik** dan **sejarawan** juga memberikan penjelasan lebih dalam tentang konsep reformasi di Indonesia. Menurut **Daniel Dhakidae**, seorang peneliti senior, reformasi bukan hanya sekadar perubahan politik, tetapi merupakan upaya kolektif untuk menciptakan tatanan sosial yang **transparan dan bertanggung jawab**. Ia menekankan bahwa reformasi adalah “pergeseran dari sistem yang **terpusat** menjadi lebih **inklusif**, di mana masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk **mengekspresikan pendapat** dan **partisipasi politik**.”

Sementara itu, **Prof. Miriam Budiardjo**, seorang ahli politik terkemuka, mendefinisikan reformasi sebagai “upaya **redistribusi kekuasaan** dari pemerintah pusat ke masyarakat melalui mekanisme demokratis yang **membatasi otoritarianisme** dan **menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi**.” Menurutnya, reformasi tidak hanya menasar pada perubahan **struktural**, tetapi juga pada **budaya politik** yang mendukung **kebebasan** dan **akuntabilitas**.

Pada tahun **1998**, reformasi mencapai puncaknya ketika **rakyat** dan **mahasiswa** secara masif turun ke jalan untuk mendesak perubahan di berbagai aspek kehidupan bernegara. Gerakan reformasi ini akhirnya membawa Indonesia memasuki era **baru** dengan mengakhiri kekuasaan **Presiden Soeharto** dan membuka babak baru di bawah kepemimpinan **B.J. Habibie** sebagai presiden transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis.

Peristiwa Menjelang Reformasi

Pada **1997**, Indonesia dilanda **krisis ekonomi parah** sebagai bagian dari **Krisis Finansial Asia**. Nilai tukar **rupiah**

merosot tajam, dan utang luar negeri jangka pendek mencapai **30 hingga 40 miliar dolar AS**, membuat **sektor perbankan dan korporasi** goyah. Krisis ini memaksa **Presiden Soeharto** meminta bantuan **IMF (International Monetary Fund)** dengan dukungan **Presiden AS Bill Clinton**. Namun, kebijakan IMF seperti **pengetatan anggaran** dan **penghapusan subsidi** justru memperparah kondisi ekonomi rakyat. **Harga barang-barang pokok melonjak**, sementara **pengangguran meningkat**, yang memicu **gelombang protes** dari masyarakat, khususnya **mahasiswa**. Kebijakan pengetatan IMF, dikenal sebagai **Structural Adjustment Program**, sering dikritik karena cenderung membebani masyarakat bawah dalam jangka pendek.



International Monetary Fund –
commons.wikimedia.org

Pada **12 Mei 1998**, terjadi **Tragedi Trisakti** di mana **empat mahasiswa tewas** akibat tembakan aparat dalam demonstrasi di **Universitas Trisakti, Jakarta**. Tragedi ini memicu **kemarahan besar** dan memperluas **aksi protes** di seluruh negeri. Tekanan terhadap Soeharto kian meningkat hingga akhirnya, pada **21 Mei 1998**, Soeharto mengumumkan **pengunduran dirinya** setelah **32 tahun** berkuasa, dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada **B.J. Habibie**.

Setelah dilantik, **Presiden Habibie** membentuk **Kabinet Reformasi Pembangunan** dengan fokus pada **pemulihan ekonomi** dan **transisi politik**. Langkah-langkah awalnya meliputi **pengurangan peran militer**, **desentralisasi**, dan **reformasi konstitusi**, yang menjadi fondasi awal untuk **mewujudkan demokrasi yang lebih terbuka dan adil** di Indonesia.



Fakta Unik di Balik Sejarah

Aksi Mahasiswa Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia

Reformasi 1998 melibatkan aksi mahasiswa secara masif di lebih dari 100 kampus di seluruh Indonesia. Ini menjadi salah satu gerakan mahasiswa terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern.



Aksi Mahasiswa 1998 – Elshinta.com

Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan "reformasi" menurut Prof. Miriam Budiardjo?

Jawaban:

Perombakan struktural untuk membatasi otoritarianisme dan menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi

Pembahasan:

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, reformasi adalah upaya untuk melakukan perombakan terhadap struktur pemerintahan yang otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis. Hal ini termasuk membatasi kekuasaan yang terpusat dan menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel. Reformasi juga bertujuan untuk mengurangi praktik otoritarianisme yang menghambat kebebasan politik dan memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.



2. Era Kebebasan Politik

Tahukah kamu? Di masa reformasi, Indonesia memasuki era baru di mana kebebasan politik dan demokrasi benar-benar diberi ruang. Sebelumnya, masyarakat hidup dalam kontrol ketat, namun reformasi membawa perubahan besar, menciptakan kebebasan berpendapat, pemilihan langsung, dan kebebasan pers. Perubahan ini tidak hanya mengubah wajah politik, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan budaya kita. Mari kita lihat bagaimana kebebasan ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang lahir pada masa reformasi.

Kebebasan Berpendapat dengan Hak Asasi yang Dijamin Konstitusi

Kebebasan berpendapat adalah salah satu **Hak Asasi Manusia (HAM)** yang dijamin oleh **konstitusi** Indonesia. **Pasal 28 UUD 1945** secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, melalui **UU Nomor 29 Tahun 1999** pasal 23 ayat 2, kebebasan berpendapat semakin diperkuat, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak **menyampaikan informasi**, termasuk menyebarkan pemikiran dan pandangan tanpa rasa takut.

Lebih jauh lagi, **UU Nomor 9 Tahun 1998** tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menekankan pentingnya kebebasan ini sebagai pilar **demokrasi**. UU ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk **berunjuk rasa, mengadakan rapat umum, atau menyuarakan aspirasi**, selama dilakukan secara **tertib dan sesuai peraturan**. Kebebasan ini bukan hanya mencerminkan era keterbukaan, tetapi juga bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya.



Hak untuk berkumpul secara damai" dalam Pasal 21 ICCPR – commons.wikimedia.org

Pemilu Langsung Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Sebelum reformasi, pemilihan presiden dilakukan melalui **Sidang Umum MPR** yang menunjuk presiden sebagai **Mandataris MPR**. Namun, sistem ini dianggap tidak memberikan peran langsung kepada rakyat dalam memilih pemimpinnya. Setelah reformasi, Indonesia melakukan revisi besar-besaran pada sistem politiknya. **Revisi UU Nomor 22 Tahun 1999** menciptakan **pemilu langsung** di mana rakyat bisa memilih pemimpin mereka, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilu langsung pertama kali diselenggarakan pada **Juli 2004** dan menghasilkan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, yaitu **Susilo Bambang Yudhoyono**. Sejak saat itu, pemilu langsung menjadi simbol **demokrasi** yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kekuasaan lebih kepada rakyat. Proses ini memungkinkan **partisipasi politik** yang lebih besar dan menandai langkah maju Indonesia menuju **kedaulatan rakyat yang sesungguhnya**.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan elemen penting dalam **kebebasan politik**. Melalui **UU Nomor 40 Tahun 1999** tentang Pers, negara menjamin bahwa **pers memiliki kebebasan untuk melaporkan, mengkritik, dan memberikan informasi** kepada publik tanpa intervensi. Era reformasi memunculkan **citizen journalism**, di mana masyarakat juga menjadi pengawas melalui berbagai media baru, seperti **blog, situs berita independen, hingga media sosial**.

Contoh penting dari kebebasan pers adalah kehadiran media seperti **Kompas, Tempo, dan Detik.com**, yang menjadi corong rakyat dalam menyuarakan kebenaran. Di era digital, **UU Nomor 11 Tahun 2008** tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** mengatur kebebasan di dunia maya, memungkinkan **kebebasan berekspresi** melalui **platform digital** namun tetap memberikan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Kebebasan politik ini merupakan wujud nyata dari cita-cita reformasi, menciptakan ruang di mana **setiap suara bisa didengar, setiap pilihan bisa dihormati, dan setiap kebenaran bisa diungkapkan**. Era baru ini mengajarkan kita bahwa kebebasan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga demokrasi tetap hidup dan berkembang.

Contoh Soal

Bagaimana pengaruh kebebasan berpendapat dan pemilu langsung yang diterapkan setelah reformasi terhadap kualitas demokrasi Indonesia?

Jawaban:

Kebebasan berpendapat dan pemilu langsung memperkuat demokrasi dengan memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dan memilih pemimpin

Pembahasan:

Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan pemilu langsung yang diterapkan sejak reformasi memperkuat demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan kritik terhadap pemerintah, sementara pemilu langsung memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Kedua hal ini mendukung partisipasi politik yang lebih besar dan membantu memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.



3. Menata Kembali Fondasi Negara melalui Reformasi Birokrasi

Tahukah kamu? Ketika **reformasi** mulai mengguncang Indonesia pada akhir 1990-an, bukan hanya politik dan ekonomi yang dirombak, tetapi juga seluruh sistem pemerintahan. **Reformasi birokrasi** menjadi salah satu langkah penting untuk mengubah sistem lama yang dianggap korup, lamban, dan tidak efisien, menjadi sebuah sistem yang lebih **transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik**. Upaya reformasi ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih dekat dengan rakyat, lembaga negara yang lebih kuat, serta aturan ketenagakerjaan yang lebih adil. Yuk, kita telusuri perubahan besar ini!

Otonomi Daerah: Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di Tingkat Lokal



*Otonomi Daerah
Memberikan Kesempatan
setiap Daerah untuk
Membangun Potensi
Politik, Ekonomi, Sosial, dan
Budaya – Elshinta.com*

Reformasi tidak hanya membawa perubahan dalam dunia politik dan ekonomi, tetapi juga dalam cara negara dikelola. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penerapan **Otonomi Daerah**. Konsep ini memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kebebasan yang lebih luas untuk mengelola sumber dayanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. **Pasal 18 UUD 1945** menyebutkan bahwa Indonesia adalah **negara kesatuan** yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan **asas desentralisasi**. Langkah besar ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan menyeimbangkan kekuatan antara pusat dan daerah.

Untuk memperkuat pelaksanaan **Otonomi Daerah**, pemerintah merumuskan sejumlah **peraturan perundang-undangan** sebagai berikut:

1) **Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945):**

Dalam **Pasal 18 UUD 1945**, ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai asas otonomi daerah. Pasal ini menjadi landasan konstitusional utama bagi pelaksanaan desentralisasi kekuasaan.

2) Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah:

Ketetapan ini mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan arahan kepada pemerintah pusat untuk mendesentralisasikan sebagian besar kewenangan kepada daerah, mencakup kewenangan administrasi, keuangan, hingga kebijakan publik di tingkat lokal.

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

UU ini merupakan dasar hukum pertama yang diterbitkan setelah Reformasi 1998, yang merombak sistem pemerintahan di Indonesia dan memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Undang-undang ini mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

UU ini mengatur distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui peraturan ini, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana bagi hasil (DBH) menjadi instrumen untuk memperkuat keuangan daerah.

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999):

UU ini menyempurnakan UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan memperjelas pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat setempat.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

UU ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan penekanan lebih kuat pada penataan wewenang, pembagian urusan antara pusat dan daerah, serta penguatan otonomi daerah. Undang-undang ini mengatur kembali mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Peraturan ini menetapkan pembagian urusan yang lebih jelas di berbagai sektor, mulai dari urusan pemerintahan umum hingga urusan spesifik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah:

Peraturan ini mengatur organisasi perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana kebijakan di tingkat daerah. Struktur organisasi ini bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan melalui otonomi.

9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

UU ini memberikan kewenangan khusus kepada desa untuk mengelola urusan desa secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa yang langsung dianggarkan oleh pemerintah pusat. Dengan UU ini, desa mendapatkan otonomi yang lebih besar dalam hal pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan-peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan **Otonomi Daerah** yang lebih adil dan efektif. Dengan kewenangan yang lebih luas, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber dayanya, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Reformasi Kelembagaan Negara dan Tata Pemerintahan: Membangun Sistem yang Kuat

Reformasi birokrasi tidak berhenti di otonomi daerah saja. Langkah yang lebih dalam dilakukan dengan merombak kelembagaan negara dan menata ulang sistem tata pemerintahan. Selama masa **Orde Baru**, kekuasaan terpusat pada **presiden** dengan **sedikit pengawasan** terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh eksekutif. Situasi ini menyebabkan munculnya **korupsi**, **kolusi**, dan **nepotisme (KKN)** yang merajalela, serta merusak integritas lembaga negara dan tata pemerintahan.

Pasca-reformasi, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memperkuat sistem kelembagaan dan tata pemerintahan agar lebih **demokratis**, **terbuka**, dan **akuntabel**. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan berbagai penataan ulang dan reformasi, yang meliputi:

a. Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Salah satu terobosan besar dalam reformasi kelembagaan negara adalah pembentukan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** pada **2002**. KPK dibentuk berdasarkan **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002** tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini bersifat **independen** dan memiliki kewenangan untuk mengawasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi di Indonesia. Tujuannya adalah **mengembalikan kepercayaan publik** terhadap pemerintahan, sekaligus menegakkan prinsip **transparansi** dan **akuntabilitas**.

KPK diberikan kewenangan yang cukup luas, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, lembaga ini memiliki otoritas untuk melakukan **monitoring dan pencegahan korupsi** melalui **sosialisasi** dan **pendidikan anti-korupsi** di berbagai lembaga pemerintahan.

b. Memperkuat Peran Lembaga Legislatif

Pasca-reformasi, kekuasaan **legislatif** yang selama masa Orde Baru bersifat lemah, mulai diperkuat. Pembagian wewenang antara **eksekutif**, **legislatif**, dan **yudikatif** dijalankan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (**checks and balances**). Beberapa upaya dalam penguatan peran legislatif di antaranya adalah:

- ▷ **MPR** yang sebelumnya menjadi lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan absolut, kini menjadi lembaga yang terbatas kekuasaannya sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan dalam **UUD 1945**.
- ▷ **DPR** mendapatkan peran yang lebih besar dalam **pengawasan** terhadap **kebijakan eksekutif** dan **anggaran negara** melalui hak-hak seperti **hak interpelasi**, **hak angket**, dan **hak menyatakan pendapat**.
- ▷ **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)** juga dibentuk sebagai lembaga baru yang berfungsi untuk mewakili kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.



Fakta Unik di Balik Sejarah

Ditakuti di Asia Tenggara

Sejak dibentuk tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan ratusan tersangka, termasuk menteri, gubernur, bahkan ketua DPR. Pada puncak kejayaannya, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai lebih dari 80%.



Logo KPK – commons.wikimedia.org

c. Reformasi Lembaga Eksekutif

Di sisi **eksekutif**, reformasi dilakukan dengan **meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas** pemerintah. Penataan ulang juga menyentuh peran dan kewenangan **presiden** dan **kabinet**, sehingga distribusi kekuasaan lebih merata dan pengawasan lebih ketat. Dalam praktiknya, reformasi ini mencakup:

- ▷ **Pembatasan masa jabatan presiden** menjadi maksimal **dua periode** melalui amandemen **UUD 1945**.
- ▷ Pembentukan kabinet yang lebih **profesional** dan berbasis **kompetensi**, serta adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kinerja menteri-menteri di bawah presiden.
- ▷ **Perampingan birokrasi** untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir praktik **KKN** yang kerap terjadi di tingkat pemerintahan pusat hingga daerah.

d. Menciptakan Peradilan yang Independen

Salah satu masalah utama pada masa Orde Baru adalah kurangnya **independensi peradilan**. Reformasi di bidang hukum dan peradilan dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga **yudikatif** untuk mengawasi dan menjalankan fungsi peradilan tanpa intervensi dari pihak eksekutif. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

- ▷ Pembentukan **Mahkamah Konstitusi (MK)** pada **2003** melalui **UU Nomor 24 Tahun 2003** sebagai pengawal konstitusi dan lembaga yang memiliki wewenang untuk **menguji undang-undang** terhadap **UUD 1945**, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilu.
- ▷ **Reformasi di Mahkamah Agung (MA)** dengan mengurangi wewenang eksekutif dalam pengangkatan dan pengawasan hakim agung, serta menata ulang peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara agar lebih **efektif** dan **transparan**.

e. Meningkatkan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Selain reformasi di lembaga pemerintahan dan peradilan, pengelolaan keuangan negara juga mengalami perubahan signifikan. Pemerintah memperkenalkan **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu** melalui penerapan **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang **Keuangan Negara** dan **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang **Perbendaharaan Negara**. Undang-undang ini menekankan pada **transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi** dalam pengelolaan anggaran negara, serta melibatkan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** dalam audit keuangan secara independen.

f. Penataan Kembali Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemerintah juga melakukan penataan ulang terhadap **Aparatur Sipil Negara (ASN)** melalui **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang **ASN**. UU ini menegaskan prinsip **profesionalisme, kompetensi, integritas, dan netralitas** dalam pengangkatan dan pengelolaan ASN. Melalui peraturan ini, **manajemen kepegawaian** diharapkan lebih efisien dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Perubahan Peraturan Ketenagakerjaan: Perlindungan untuk Para Pekerja

Reformasi di bidang ketenagakerjaan menjadi agenda penting, terutama setelah peristiwa menyakitkan seperti **kasus kematian Marsinah** pada tahun **1993**. Marsinah, seorang buruh perempuan di Sidoarjo, tewas setelah memperjuangkan hak-hak rekan buruhnya. Peristiwa tragis ini menyoroti betapa rentannya hak-hak pekerja di masa Orde Baru, dan menjadi pemicu perubahan besar.

Sejalan dengan tuntutan perlindungan bagi pekerja, pemerintah mengesahkan **UU Nomor 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan lebih baik bagi buruh. Selain itu, lahir pula **Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)** melalui **UU Nomor 40 Tahun 2004**, yang menjadi dasar bagi terbentuknya

BPJS Kesehatan dan **BPJS Ketenagakerjaan**. Perubahan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja, termasuk **jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan** yang lebih merata.

Selain itu, reformasi juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dengan **UU Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih profesional, bebas dari intervensi politik, dan fokus pada pelayanan publik.

Melalui reformasi birokrasi, Indonesia tidak hanya membangun pemerintahan yang lebih efektif, tetapi juga memperbaiki tata kelola negara agar semakin **transparan** dan **berkeadilan**. Perubahan ini menjadi langkah awal dalam membangun **fondasi negara** yang lebih kokoh dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Contoh Soal

Bagaimana dampak reformasi birokrasi dan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal?

Jawaban:

Reformasi birokrasi dan otonomi daerah meningkatkan transparansi dan mempercepat distribusi sumber daya, sehingga mendorong pemerataan pembangunan yang lebih baik

Pembahasan:

Reformasi birokrasi yang dilakukan pasca-reformasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah penting adalah penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Dengan kewenangan ini, diharapkan pemerataan pembangunan dapat tercapai, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan. Reformasi birokrasi juga meminimalisir praktik korupsi yang ada di pemerintahan pusat dan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta mempercepat distribusi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Kelompok 1

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan mengidentifikasi perubahan di berbagai bidang pasca-reformasi, menganalisis tantangan yang dihadapi, serta melatih kemampuan berpikir kritis terhadap dampak reformasi terhadap kehidupan masyarakat.

1. Bentuklah kelompok berisi 4–5 orang, baca dan pahami data data di bawah ini

Aspek	Perubahan Positif	Tantangan yang Muncul
Politik	Kebebasan pers, multipartai, pemilu langsung	Konflik horizontal, politik identitas
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi perlahan pulih	Kesenjangan ekonomi masih tinggi
Sosial	Kebebasan berekspresi meningkat	Munculnya intoleransi di beberapa daerah
Budaya	Reformasi kurikulum, akses pendidikan lebih baik	Kualitas pendidikan masih belum merata

2. Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut:
 - a. Apa perubahan besar yang terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan setelah reformasi?
 - b. Apa tantangan yang masih dihadapi di setiap bidang tersebut?
 - c. Menurut kalian, bidang mana yang paling berhasil mengalami perubahan? Mengapa?
 - d. Apa saran kalian untuk perbaikan kondisi Indonesia ke depan?
3. Buatlah tabel atau mind map sebagai rangkuman hasil diskusi.



4. Reformasi Ekonomi untuk Indonesia yang Lebih Kokoh

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana beratnya menghadapi krisis ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia? Pada **1998**, saat krisis moneter melanda, nilai tukar **rupiah** terjun bebas hingga **Rp 17.000 per dolar AS**, menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan tingkat pengangguran meroket. Di tengah kondisi yang sulit ini, Presiden **B.J. Habibie** yang dilantik pada **21 Mei 1998** menghadapi tugas berat: **mengembalikan kepercayaan pasar** dan **memulihkan ekonomi** bangsa. Melalui berbagai kebijakan, ia berhasil **menaikkan nilai tukar rupiah** menjadi **di bawah Rp 10.000 per dolar AS** dalam waktu singkat. Namun, tantangan ekonomi Indonesia tidak berhenti pada Habibie saja. Presiden **Abdurrahman Wahid (Gus Dur)** yang menggantikan Habibie pada **Oktober 1999**, juga menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang mengundang berbagai respons publik.

Belakangan, Presiden **Megawati Soekarnoputri** dan **Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)** juga harus menangani stabilitas dan **pengembangan ekonomi** dengan kebijakan-kebijakan penting mereka, terutama dalam memperbaiki **iklim investasi** dan membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah yang mereka ambil dalam menghadapi tantangan ekonomi ini.

Tiga Langkah Strategis B.J. Habibie Selamatkan Ekonomi Indonesia

Setelah mengambil alih kepemimpinan dari Soeharto, Presiden **B.J. Habibie** memprioritaskan pemulihan ekonomi dengan fokus pada **stabilisasi moneter**, **restrukturisasi perbankan**, dan **pemberdayaan ekonomi rakyat**. Program-program utamanya adalah sebagai berikut:

- a. **Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah:** Menghadapi nilai tukar yang sangat fluktuatif, Habibie berhasil menstabilkan **rupiah** dari **Rp 17.000 per dolar AS** menjadi **di bawah Rp 10.000 per dolar AS** pada akhir **1998**. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah kebijakan moneter yang didukung oleh **International Monetary Fund (IMF)** dan strategi fiskal yang hati-hati.
- b. **Restrukturisasi Perbankan:** Krisis moneter menghancurkan kepercayaan terhadap **sektor perbankan** di Indonesia. Untuk mengatasinya, Habibie membentuk **Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)** pada **3 Agustus 1998** untuk **mereformasi bank-bank bermasalah** dan mengembalikan stabilitas sektor perbankan.
- c. **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:** Habibie juga memperkenalkan **program kredit usaha mikro** melalui **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada pengusaha kecil agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah krisis.



Presiden B.J. Habibie – Wikipedia.com

Tiga Kebijakan Ekonomi Gus Dur yang Mengundang Pro dan Kontra

Saat **Gus Dur** memimpin pada **Oktober 1999**, ia dikenal dengan kepemimpinannya yang progresif dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang seringkali menimbulkan perdebatan. Beberapa kebijakan tersebut adalah:

- a. **Pembubaran Departemen Sosial dan Penerangan:** Pada **Oktober 1999**, Gus Dur membubarkan kedua departemen ini dengan tujuan **meningkatkan efisiensi anggaran** dan mendorong **transparansi pemerintahan**. Meskipun niatnya baik, langkah ini dianggap mendadak dan mendapat kritik dari berbagai pihak.

- b. **Pembukaan Keran Ekspor Gas ke Cina:** Pada **tahun 2000**, Gus Dur mengizinkan peningkatan **ekspor gas alam** ke Cina untuk **menambah devisa negara**. Meskipun menguntungkan, kebijakan ini dipandang kontroversial karena prioritas yang lebih besar pada ekspor daripada kebutuhan energi domestik.
- c. **Kenaikan Gaji PNS:** Kebijakan Gus Dur untuk meningkatkan **gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)** pada **2000** mendapat sambutan baik dari kalangan PNS. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap terlalu membebani **anggaran negara** yang masih dalam kondisi pemulihan.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin di masa krisis ini, Indonesia berhasil melewati badai krisis ekonomi dan mulai membangun kembali **fondasi ekonomi** yang lebih kuat. Setiap kebijakan ini tentunya menjadi pelajaran penting dalam membangun bangsa ke depan.

Contoh Soal

Bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie dan Presiden Gus Dur dalam menghadapi krisis ekonomi 1998 berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi Indonesia dan pembangunan jangka panjang?

Jawaban:

Kebijakan stabilisasi nilai tukar dan restrukturisasi perbankan yang dilakukan Habibie memberikan dasar yang kuat untuk pemulihan ekonomi, meskipun kebijakan Gus Dur menambah ketidakpastian ekonomi

Pembahasan:

Kebijakan yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah dan restrukturisasi perbankan, berhasil memberikan dasar yang kuat untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca-krisis. Habibie menstabilkan rupiah dari Rp 17.000 per dolar AS menjadi di bawah Rp 10.000 pada akhir 1998, yang merupakan pencapaian signifikan dalam mengatasi krisis moneter. Selain itu, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) membantu mereformasi sektor perbankan yang terdampak krisis. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini memberikan dasar yang kuat untuk pemulihan, kebijakan Gus Dur, seperti pembukaan ekspor gas ke Cina dan peningkatan gaji PNS, meskipun bermanfaat dalam jangka pendek, juga menambah ketidakpastian dan perdebatan terkait prioritas pembangunan domestik dan pengelolaan anggaran negara. Hal ini menyebabkan kebijakan Gus Dur dianggap memperburuk ketidakpastian ekonomi dalam masa pemulihan.



5. Kebangkitan Budaya di Era Reformasi

Di era Reformasi, Indonesia tidak hanya mengalami transformasi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam kebudayaan. Setelah bertahun-tahun di bawah kekuasaan Orde Baru yang cenderung sentralistik, masa Reformasi membuka pintu bagi kebangkitan budaya dan pluralisme. **Pluralisme** adalah pengakuan atas keberagaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi sebagai kekayaan bangsa. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam era Reformasi, di mana negara mulai mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap keragaman budaya dan hak-hak berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.

Pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani berbagai bentuk **diskriminasi etnis** yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satu langkah monumental adalah pencabutan **Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967**, sebuah kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan ini pada dasarnya membatasi ekspresi budaya etnis **Tionghoa** di Indonesia dengan alasan politik asimilasi. Di masa Orde Baru, banyak perayaan dan tradisi seperti **Imlek**, **Barongsai**, dan penggunaan nama Tionghoa ditekan atau bahkan dilarang. Pemerintah pada waktu itu beranggapan bahwa penekanan ini diperlukan untuk "menyatukan" bangsa, tetapi kenyataannya justru menghambat kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketidakadilan bagi etnis Tionghoa.

Namun, di era Reformasi, tepatnya pada 17 September 2000, **Presiden Abdurrahman Wahid** atau **Gus Dur** mengambil keputusan yang sangat bersejarah. Beliau mencabut **Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967** dengan tujuan menghapus segala bentuk diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa. Keputusan ini menandai titik balik dalam hubungan negara dengan kelompok minoritas. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat Tionghoa Indonesia dapat kembali menjalankan tradisi dan budayanya secara terbuka. Gus Dur juga mengembalikan **Imlek** sebagai hari libur nasional yang diakui secara resmi, mengangkat semangat **persatuan dalam keberagaman**.



Kebudayaan Indonesia – shutterstock.com · 1665944008

Pencabutan kebijakan ini bukan sekadar soal perayaan Imlek atau kebebasan mengungkapkan identitas etnis. Langkah ini menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk lebih menghargai dan mengakui **keberagaman** sebagai kekuatan, bukan sebagai ancaman. Negara kini melihat **keragaman budaya** sebagai aset yang memperkaya karakter bangsa, bukan sebagai masalah yang perlu ditekan atau dihilangkan. Pada masa ini, terjadi pula perbaikan dalam hal representasi budaya di media, pendidikan, dan ruang publik.

Selain itu, di era Reformasi, pengakuan terhadap **pluralisme budaya** tidak hanya menyentuh kelompok etnis Tionghoa, tetapi juga berbagai kelompok budaya lainnya. Reformasi memberikan ruang bagi setiap etnis dan kelompok masyarakat untuk merayakan budaya dan tradisi mereka dengan bebas, tanpa rasa takut atau pembatasan yang kaku dari pemerintah. Upaya ini mencerminkan semangat Reformasi yang menitikberatkan pada **kesetaraan**, **keadilan**, dan **penghormatan terhadap hak asasi manusia**.

Transformasi ini menunjukkan bahwa Reformasi tidak hanya tentang mengganti sistem politik, tetapi juga menciptakan **lahan sosial yang lebih inklusif**, di mana keberagaman budaya benar-benar dihormati dan diapresiasi.

Contoh Soal

Bagaimana dampak pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 terhadap hubungan antar kelompok etnis dan budaya di Indonesia pasca-Reformasi?

Jawaban:

Mengarah pada penguatan identitas budaya kelompok minoritas dan memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman

Pembahasan:

Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada masa Reformasi membawa dampak positif terhadap hubungan antar kelompok etnis di Indonesia. Langkah ini memungkinkan kelompok etnis Tionghoa untuk merayakan tradisi mereka, seperti Imlek dan Barongsai, secara terbuka tanpa adanya pembatasan dari pemerintah. Selain itu, kebijakan ini memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman, di mana keragaman budaya mulai dihargai sebagai kekuatan yang memperkaya identitas bangsa Indonesia. Keputusan tersebut menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok budaya lainnya untuk merayakan dan menghormati identitas mereka tanpa diskriminasi, memperlihatkan komitmen terhadap kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia.



6. Transformasi Pendidikan di Era Reformasi

Reformasi bukan hanya mengubah wajah politik dan ekonomi, tetapi juga mengguncang sistem pendidikan nasional. Sebagai pilar penting dalam membangun masa depan bangsa, **pendidikan** mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kebijakan negara pasca-Reformasi. Dari **otonomi sekolah** hingga berbagai program bantuan pendidikan, semua diarahkan untuk mewujudkan **kesetaraan akses dan peningkatan kualitas pendidikan**.

Penting untuk diketahui, Reformasi membuka jalan bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif di sektor pendidikan. Salah satu landasan hukum penting dalam periode ini adalah lahirnya **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, yang menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Selain itu, pada tahun 2000, diterbitkan pula **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000** tentang **Program Pembangunan Nasional (Propenas)**, yang menargetkan **peningkatan akses pendidikan** di semua tingkatan, baik melalui pembangunan sekolah, pengembangan kurikulum, maupun pemberian bantuan kepada siswa yang membutuhkan.

Otonomi Sekolah di Era Gus Dur: Membebaskan Inovasi di Lingkungan Sekolah

Pada masa pemerintahan **Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)**, kebijakan otonomi sekolah menjadi salah satu agenda penting dalam rangka desentralisasi pendidikan. Dalam kerangka ini, otonomi diberikan kepada sekolah-sekolah untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri, termasuk dalam **pengelolaan anggaran** dan **pengambilan keputusan kurikulum**. Tujuannya adalah agar sekolah bisa lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal dan peserta didiknya.

Kebijakan ini memungkinkan kepala sekolah dan dewan sekolah bekerja sama dengan masyarakat dan komite sekolah untuk menentukan **prioritas pembangunan**, misalnya memperbaiki infrastruktur sekolah atau mengembangkan program pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitar. **Kebijakan otonomi sekolah** diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas, serta membuat proses pendidikan menjadi lebih **demokratis**.



Fakta Unik di Balik Sejarah



Kegiatan Belajar Siswa – Shutterstock.com · 2415924771

Otonomi Sekolah Pertama Kali Diuji di Era Gus Dur

Kebijakan otonomi sekolah yang digaungkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi tonggak awal desentralisasi pendidikan. Ini adalah kali pertama sekolah diberikan keleluasaan untuk mengatur anggaran dan kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Efeknya? Banyak sekolah di daerah mulai menciptakan program unggulan berbasis kearifan lokal, seperti pelajaran membatik, pengolahan hasil pertanian, hingga keterampilan maritim.

Komitmen Negara Terhadap Anggaran Pendidikan: Menjamin Masa Depan Generasi Bangsa

Seiring dengan berjalannya reformasi, **komitmen negara** terhadap pendidikan semakin dikuatkan melalui pengalokasian anggaran yang signifikan. Dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal **20% dari**

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)**. Ini merupakan lompatan besar dalam upaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak.

Sebagai catatan, **alokasi anggaran pendidikan** ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan fisik, seperti sekolah-sekolah baru dan perbaikan fasilitas, serta mendanai program-program pendidikan yang inovatif. Dukungan dana dari APBN dan APBD ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru serta mendukung pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Program BSM dan Bidikmisi Era SBY: Jembatan untuk Meraih Mimpi

Di bawah pemerintahan **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)**, pemerintah mencanangkan beberapa program bantuan pendidikan, di antaranya **Bantuan Siswa Miskin (BSM)** dan **Bidikmisi**. Program **BSM** bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Bantuan ini berupa subsidi langsung yang diberikan kepada siswa di tingkat dasar dan menengah.

Sementara itu, program **Bidikmisi** difokuskan pada siswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi, untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. **Program Bidikmisi** menyediakan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup bagi mahasiswa selama masa studinya. Inisiatif ini diresmikan pada tahun **2010**, dengan harapan agar tidak ada lagi anak bangsa yang harus mengubur mimpinya karena keterbatasan ekonomi. Pada tahun **2014**, **anggaran Bidikmisi** bahkan mencapai lebih dari **Rp 1,3 triliun**, mencakup lebih dari **330 ribu mahasiswa** di seluruh Indonesia.

Reformasi di bidang pendidikan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Melalui kebijakan **otonomi sekolah**, **alokasi anggaran yang tepat**, serta **bantuan untuk siswa kurang mampu**, Indonesia menapaki era baru di mana pendidikan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan **keadilan sosial** dan **kesejahteraan nasional**.

Contoh Soal

Bagaimana kebijakan otonomi sekolah dan program bantuan pendidikan di era Reformasi berkontribusi terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia?

Jawaban:

Program bantuan pendidikan seperti BSM dan Bidikmisi memperkuat sistem pendidikan dengan meningkatkan akses bagi siswa miskin dan berprestasi

Pembahasan:

Kebijakan otonomi sekolah dan program bantuan pendidikan seperti BSM dan Bidikmisi sangat berperan dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Otonomi sekolah memungkinkan setiap sekolah untuk lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Sementara itu, program BSM dan Bidikmisi memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada siswa miskin dan berprestasi, memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Kedua kebijakan ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.



7. Kebijakan Para Presiden Pasca-Reformasi 1998

Ketika Reformasi 1998 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia, tidak hanya struktur pemerintahan yang berubah, namun juga kebijakan yang diambil oleh para pemimpin pasca-reformasi. Setiap presiden membawa visi dan kebijakan mereka sendiri untuk membangun kembali Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks mulai dari stabilitas politik hingga kesejahteraan rakyat. Mari kita telusuri kebijakan yang diambil oleh B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam periode penuh dinamika ini.

Kebijakan B.J. Habibie dalam Merintis Era Reformasi

Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat sebagai presiden ke-3 Republik Indonesia pada **21 Mei 1998** setelah Soeharto mundur. Habibie membentuk **Kabinet Reformasi Pembangunan**, yang fokus pada upaya stabilisasi politik, pemerintahan, dan ekonomi di tengah krisis yang melanda. Ada beberapa kebijakan penting yang diambil oleh Habibie:

- a. **Penghapusan SBKRI** (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia), sebuah kebijakan yang menjadi simbol diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, berhasil dihapuskan pada masa pemerintahannya. Langkah ini membuka jalan untuk memulihkan hak-hak asasi manusia yang telah lama diabaikan.
- b. **Undang-Undang Otonomi Daerah** dan **Undang-Undang Politik** yang disahkan pada **1999** memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah mereka. Kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih desentralisasi dan demokratis.
- c. Dalam konteks ekonomi, Habibie berupaya melakukan **restrukturisasi perbankan**, mengurangi utang negara, serta memperbaiki iklim investasi. Meski tantangannya sangat berat, Habibie fokus pada penyelamatan perekonomian melalui reformasi besar-besaran.
- d. Salah satu kebijakan monumental adalah pelaksanaan **referendum Timor Timur** pada **30 Agustus 1999**. Referendum ini mengizinkan rakyat Timor Timur untuk memilih antara merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia, yang pada akhirnya mereka memilih kemerdekaan.



Pengambilan sumpah kepresidenan Habibie pada 21 Mei 1998 – commons.wikimedia.org

Abdurrahman Wahid: Pemerintahan Singkat dengan Kebijakan Transformatif

Abdurrahman Wahid atau **Gus Dur** diangkat sebagai presiden ke-4 Indonesia pada **20 Oktober 1999**. Masa pemerintahan Gus Dur dikenal penuh kontroversi dan pembaruan, antara lain:

- a. **Pemilu 1999 menyaksikan persaingan 48 partai politik**—pemilihan dengan jumlah partai terbanyak dalam sejarah Indonesia. Ini menandai transformasi besar dalam sistem politik yang lebih demokratis.
- b. **Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967** pada **17 Januari 2000**, yang dianggap sebagai simbol diskriminasi terhadap warga Tionghoa. Pencabutan ini menunjukkan komitmen Gus Dur terhadap pluralisme dan toleransi.
- c. **TAP MPR Nomor V/MPR/2000** menetapkan landasan untuk membentuk **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)** guna menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Meskipun KKR akhirnya gagal direalisasikan, ide ini menandai komitmen untuk menyelesaikan luka sejarah.

- d. Namun, pemerintahan Gus Dur berakhir hanya dalam **2 tahun**, akibat konflik politik dengan parlemen yang memuncak dalam **Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001**. Akhir masa jabatannya menjadi salah satu episode politik paling dramatis dalam sejarah Indonesia.

Megawati Soekarnoputri Berani Menegakkan Demokrasi dan Stabilitas

Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden ke-5 pada **23 Juli 2001**. Masa pemerintahannya diisi oleh kebijakan yang bertujuan memperkuat institusi dan perekonomian:

- a. Pembentukan **Kabinet Gotong Royong** yang mengusung semangat persatuan dan stabilitas. Megawati fokus pada **perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden** agar proses demokratis lebih baik.
- b. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** didirikan pada **27 Desember 2002** sebagai bentuk komitmen Megawati dalam memberantas korupsi yang telah mengakar dalam sistem pemerintahan.
- c. Pada masa pemerintahannya, terdapat beberapa **Undang-Undang penting** yang disahkan, termasuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) dan Undang-Undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997).
- d. Megawati juga menghadapi sengketa **Pulau Sipadan dan Ligitan** yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia pada **17 Desember 2002** berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional.
- e. **Pemilu 2004** mencatat adanya **5 pasangan calon presiden dan wakil presiden** yang berlaga dalam pemilihan langsung pertama sepanjang sejarah Indonesia, menciptakan tonggak baru dalam demokrasi Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono: Transformasi dan Stabilitas di Tengah Ujian

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden ke-6 pada **20 Oktober 2004**. Ia membentuk **Kabinet Indonesia Bersatu** yang berusaha menciptakan sinergi di antara beragam partai politik dalam pemerintahan. Beberapa kebijakan penting selama masa jabatan SBY adalah:

- a. SBY meluncurkan program **Bantuan Langsung Tunai (BLT)** untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak pada **2005**.
- b. **Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**, yang diluncurkan sejak **2005**, bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengurangi beban biaya pendidikan dasar.
- c. SBY menghadapi tantangan besar saat terjadi **Teror Bom Bali II pada 1 Oktober 2005**, yang mengharuskan pemerintah untuk memperketat keamanan dan menangani ancaman terorisme.
- d. Dalam menghadapi **gerakan separatisme** seperti di Aceh dan Papua, SBY mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog dan otonomi khusus.
- e. **Pemilu 2009** mencatat kemenangan SBY untuk periode kedua dengan 60,8% suara, menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap stabilitas pemerintahannya.
- f. Di akhir masa jabatannya, **Pemilu Legislatif 2014** menjadi pemilu yang paling demokratis dan transparan dalam sejarah Indonesia, sekaligus mengakhiri era kepemimpinan SBY.

Contoh Soal

Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam memperkuat institusi dan perekonomian Indonesia dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik jangka panjang?

Jawaban:

Pembentukan KPK dan perubahan tata cara pemilihan presiden memperkuat demokrasi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan

Pembahasan:

Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertujuan untuk memberantas korupsi yang telah lama mengakar di pemerintahan Indonesia. KPK menjadi lembaga independen yang penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Selain itu, perubahan tata cara pemilihan presiden yang lebih demokratis juga turut memperkuat proses demokrasi, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin mereka. Kebijakan-kebijakan ini memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas politik Indonesia dalam jangka panjang.

Kegiatan Kelompok 2

Di kegiatan ini kamu dan kelompokmu akan menganalisis ancaman perpecahan bangsa, merancang strategi pencegahan, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan solutif dalam menjaga persatuan Indonesia.

1. Bentuklah 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang.
2. Setiap kelompok menganalisis salah satu ancaman berikut:
 - a. Konflik horizontal berbasis agama, suku, dan ras.
 - b. Ketimpangan ekonomi antar daerah.
 - c. Intoleransi, radikalisme, dan fanatisme berlebihan.
 - d. Politik identitas dan polarisasi sosial akibat pemilu atau isu politik lainnya.
3. Lakukan analisis kritis terhadap ancaman yang kalian pilih dengan menjawab pertanyaan berikut:
 - a. Apa definisi dan karakteristik ancaman tersebut?
 - b. Bagaimana bentuk nyata atau contoh kasus ancaman tersebut di Indonesia? Berikan minimal 1 contoh nyata (misal: konflik SARA di Ambon, ketimpangan Papua–Jawa, intoleransi di media sosial, polarisasi Pilpres).
 - c. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang jika ancaman ini tidak ditangani?
4. Rancang strategi pencegahan yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat:
 - a. Tujuan spesifik: Apa yang ingin dicapai?
 - b. Sasaran utama: Siapa yang perlu dilibatkan? (masyarakat umum, pemuda, tokoh agama, pemerintah, dll)
 - c. Bentuk kegiatan: Jelaskan secara konkret, misalnya:
 - ▷ Program pendidikan toleransi berbasis sekolah dan komunitas.
 - ▷ Pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah tertinggal.

- ▷ Kampanye kreatif anti intoleransi di media sosial.
 - ▷ Forum dialog rutin antar kelompok berbeda.
 - d. Indikator keberhasilan: Bagaimana kalian mengukur apakah strategi ini efektif?
5. Tulis kesimpulan kelompok tentang:
- ▷ Apa yang kalian pelajari dari simulasi ini?
 - ▷ Mengapa menjaga keutuhan bangsa penting di era global saat ini?
 - ▷ Apa peran konkret generasi muda seperti kalian dalam mencegah disintegrasi?

Rangkuman

Setelah Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi besar-besaran yang mencakup perubahan politik, ekonomi, budaya, hingga kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa. Reformasi membuka jalan bagi terciptanya era baru yang lebih demokratis setelah jatuhnya kekuasaan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Krisis ekonomi dan tekanan politik mendorong gerakan reformasi yang menuntut perubahan besar terhadap sistem pemerintahan yang dianggap otoriter dan sentralistik. Gerakan ini berpuncak pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden transisi pada 21 Mei 1998. Era reformasi ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan tetapi juga menciptakan tatanan sosial dan politik yang lebih terbuka.

B.J. Habibie, sebagai presiden pertama pasca-Reformasi, mengambil langkah-langkah penting untuk menstabilkan kondisi negara, terutama di bidang ekonomi dan politik. Di antaranya adalah penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang selama ini menjadi simbol diskriminasi etnis Tionghoa, serta pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah untuk mendorong desentralisasi. Habibie juga berani melaksanakan referendum Timor Timur pada 30 Agustus 1999, yang menjadi keputusan bersejarah bagi rakyat Timor Timur. Meski masa pemerintahannya singkat, Habibie berhasil meletakkan fondasi awal untuk reformasi lebih lanjut dan stabilisasi ekonomi Indonesia di tengah krisis.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang diangkat sebagai presiden pada 20 Oktober 1999, membawa semangat pluralisme dan toleransi dalam pemerintahannya. Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yang menandai akhir diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan mengembalikan hak-hak budaya mereka. Ia juga memperkenalkan TAP MPR Nomor V/MPR/2000 untuk mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, masa pemerintahannya berakhir singkat hanya dalam 2 tahun karena konflik politik dengan parlemen yang mencapai puncaknya pada Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001.

Presiden Megawati Soekarnoputri, yang diangkat pada 23 Juli 2001, membawa fokus baru pada penguatan institusi demokrasi dan stabilitas ekonomi. Di bawah pemerintahannya, dibentuk Kabinet Gotong Royong serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2002 untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Megawati juga menghadapi sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, yang akhirnya dimenangkan oleh Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Masa pemerintahannya juga menandai lahirnya pemilu langsung pertama pada tahun 2004, yang menjadi tonggak demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia berfokus pada upaya stabilisasi dan pembangunan infrastruktur. SBY memimpin dengan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu pada 20 Oktober 2004 dan meluncurkan program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat miskin serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2005 untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintahannya juga diwarnai oleh berbagai ujian besar seperti Teror Bom Bali II pada 1 Oktober 2005 dan tantangan menghadapi gerakan separatisme di Aceh dan Papua, yang diselesaikan melalui pendekatan dialog dan otonomi khusus.

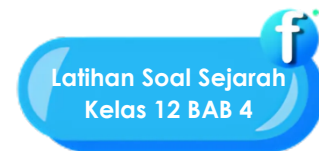
Setiap presiden pasca-reformasi memiliki peran penting dalam membentuk Indonesia yang lebih demokratis dan stabil. Habibie memulai pemulihan ekonomi, Gus Dur mendorong kebebasan politik, Megawati memperkuat institusi demokrasi, dan SBY menjaga stabilitas serta mendorong transformasi. Reformasi 1998 menjadi titik balik menuju Indonesia yang lebih inklusif dan desentralistik. Perjalanan ini menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang berani dan kebijakan yang tepat, Indonesia mampu bangkit dari krisis dan membangun fondasi negara yang lebih baik.

Latihan Soal

1. Apa yang menjadi langkah pertama yang diambil oleh B.J. Habibie untuk menstabilkan negara setelah Reformasi 1998?
 - A. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - B. Penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)
 - C. Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967
 - D. Pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah
 - E. Pelaksanaan referendum Timor Timur
2. Bagaimana keputusan Gus Dur dalam mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 berpengaruh pada hubungan sosial di Indonesia?
 - A. Meningkatkan ketegangan antar etnis di Indonesia
 - B. Mengurangi kebebasan berekspresi di kalangan etnis Tionghoa
 - C. Menandai akhir diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan meningkatkan pluralisme
 - D. Membatasi pengaruh budaya Tionghoa dalam masyarakat
 - E. Memperburuk ketegangan politik dengan kelompok oposisi
3. Kebijakan yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi korupsi di Indonesia pada tahun 2002 adalah:
 - A. Pembentukan Kabinet Gotong Royong
 - B. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - C. Pencabutan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa
 - D. Pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
 - E. Penyelesaian sengketa dengan Malaysia melalui Mahkamah Internasional
4. Apa yang menjadi pencapaian penting dalam bidang politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri?
 - A. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
 - B. Pemilu langsung pertama pada tahun 2004
 - C. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan
 - D. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
 - E. Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
5. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menangani gerakan separatisme di Aceh dan Papua memperlihatkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penyelesaian konflik?
 - A. Dengan mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan
 - B. Melalui pendekatan dialog dan otonomi khusus sebagai solusi jangka panjang
 - C. Menyelesaikan konflik dengan membentuk pemerintahan militer di wilayah tersebut
 - D. Memberikan kekuasaan penuh kepada militer dalam menangani separatisme

- E. Melaksanakan pemilu langsung untuk menentukan status wilayah Aceh dan Papua
6. Dari kebijakan yang diambil oleh para presiden pasca-reformasi, mana yang menurut Anda paling efektif dalam memperkuat demokrasi Indonesia, dan mengapa?
- A. Kebijakan stabilisasi ekonomi oleh Habibie
 - B. Penguatan peran legislatif oleh Gus Dur
 - C. Pembentukan KPK dan pemilu langsung oleh Megawati
 - D. Penyelesaian konflik di Aceh dan Papua oleh SBY
 - E. Semua kebijakan di atas memiliki dampak yang setara terhadap demokrasi
7. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur pada tahun 1999 mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan demokrasi?
- A. Dengan mengizinkan referendum untuk memilih kemerdekaan atau tetap bersama Indonesia
 - B. Menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi protes di Timor Timur
 - C. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah Timor Timur
 - D. Menghindari pembicaraan tentang status Timor Timur dan tetap menjaga status quo
 - E. Menjanjikan otonomi lebih besar kepada Timor Timur tanpa referendum

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Habibie, B. (2006). *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta.

Kompas. (1998). *Krisis & Transisi Politik Indonesia*. Retrieved from Kumpulan Artikel Utama Harian Kompas.

Lev, D. S. (2009). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*.